

DAFTAR ISI

Halaman

DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	ii
DAFTAR LAMPIRAN	iv
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN	
BAB I PENDAHULUAN	1
BAB II EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD.....	4
BAB III IKHTISAR PENCAPAIAN TARGET KINERJA KEUANGAN.....	7
BAB IV KEBIJAKAN AKUNTANSI.....	9
BAB V PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN	13
BAB VI PENJELASAN ATAS INFORMASI NON KEUANGAN	66
BAB VII PENUTUP	68

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 2.1	Data Ekonomi Makro Kabupaten Tana Toraja Tahun 2019-2021	4
Tabel 3.1	Realisasi Sasaran Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Tana Toraja T.A. 2021	7
Tabel 3.2	Realisasi Belanja Operasional.....	8
Tabel 4.1	Rincian Kualitas Piutang.....	12
Tabel 5.1	Rincian Pendapatan.....	14
Tabel 5.2	Rincian Pendapatan Asli Daerah.....	14
Tabel 5.3	Rincian Pendapatan Pajak Daerah	14
Tabel 5.4	Rincian Pendapatan Retribusi Daerah	15
Tabel 5.5	Rincian Lain - lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang Sah	16
Tabel 5.6	Rincian Pendapatan Transfer	16
Tabel 5.7	Rincian Bagi Hasil Pajak	17
Tabel 5.8	Rincian Bukan Bagi Hasil Pajak	17
Tabel 5.9	Rincian Dana Alokasi Khusus Fisik.....	18
Tabel 5.10	Rincian Dana Alokasi Khusus Non Fisik.....	19
Tabel 5.11	Rincian Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Dana Lainnya.....	20
Tabel 5.12	Rincian Pendapatan Lainnya.....	20
Tabel 5.13	Rincian Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah	21
Tabel 5.14	Rincian Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang- Undangan.....	22
Tabel 5.15	Rincian Belanja.....	22
Tabel 5.16	Rincian Belanja Operasi	22
Tabel 5.17	Rincian Belanja Pegawai	23
Tabel 5.18	Rincian Belanja Barang dan Jasa	23
Tabel 5.19	Rincian Belanja Hibah	24
Tabel 5.20	Rincian Belanja Modal	25
Tabel 5.21	Rincian Belanja Modal Peralatan dan Mesin	25
Tabel 5.22	Rincian Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	26
Tabel 5.23	Rincian Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	26
Tabel 5.24	Rincian Belanja Transfer	27
Tabel 5.25	Rincian Pembiayaan	27
Tabel 5.26	Rincian Penerimaan Pembiayaan.....	28
Tabel 5.27	Rincian Komponen SILPA	28
Tabel 5.28	Komposisi Aset, Kewajiban dan Ekuitas	29
Tabel 5.29	Rincian Aset	29
Tabel 5.30	Rincian Aset Lancar.....	29
Tabel 5.31	Rincian Kas.....	30
Tabel 5.32	Rincian Kas Daerah	30
Tabel 5.33	Rincian Kas di Bendahara Penerimaan	31
Tabel 5.34	Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran	32
Tabel 5.35	Penyetoran Kas di Bendahara Pengeluaran.....	32
Tabel 5.36	Rincian Kas di BLUD.....	33
Tabel 5.37	Rincian Kas di Bendahara Dana BOS.....	33
Tabel 5.38	Rincian Kas di Bendahara Kapitasi JKN	34
Tabel 5.39	Rincian Saldo Pajak.....	34
Tabel 5.40	Rincian Saldo Piutang Pajak.....	35
Tabel 5.41	Rincian Saldo Piutang Retribusi	35
Tabel 5.42	Rincian Saldo Piutang Lainnya.....	35
Tabel 5.43	Rincian Saldo Piutang Dum Kendaraan Dinas.....	36
Tabel 5.44	Rincian Saldo Piutang Transfer Pemerintah Provinsi	36
Tabel 5.45	Rincian Saldo Penyisihan Piutang	36
Tabel 5.46	Rincian Persediaan.....	37
Tabel 5.47	Rincian Investasi Jangka Panjang	37
Tabel 5.48	Rincian Penyertaan Modal pada PDAM	39
Tabel 5.49	Rincian Mutasi Aset Tetap.....	39
Tabel 5.50	Rincian Mutasi Tanah.....	40

Tabel 5.51	Rincian Mutasi Peralatan dan Mesin.....	41
Tabel 5.52	Komponen Aset Tetap – Peralatan Dan Mesin	42
Tabel 5.53	Rincian Mutasi Gedung dan Bangunan.....	42
Tabel 5.54	Komponen Aset Tetap – Gedung dan Bangunan	43
Tabel 5.55	Rincian Mutasi Jalan, Irigasi dan Jaringan.....	44
Tabel 5.56	Komponen Aset Tetap – Jalan, Jaringan dan Irigasi	45
Tabel 5.57	Rincian Mutasi Aset Tetap Lainnya.....	45
Tabel 5.58	Komponen Aset Tetap – Aset Tetap Lainnya	46
Tabel 5.59	Rincian Mutasi Konstruksi Dalam Pengerjaan.....	46
Tabel 5.60	Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	47
Tabel 5.61	Rincian Aset Lainnya.....	48
Tabel 5.62	Rincian Aset Lainnya.....	49
Tabel 5.63	Rincian Aset Tidak Berwujud.....	49
Tabel 5.64	Rincian Kewajiban.....	50
Tabel 5.65	Rincian Kewajiban Jangka Pendek	50
Tabel 5.66	Rincian Utang PFK.....	51
Tabel 5.67	Rincian Utang Belanja	51
Tabel 5.68	Rincian Pendapatan LO	52
Tabel 5.69	Rincian Pendapatan Pajak Daerah-LO	53
Tabel 5.70	Rincian Pendapatan Retribusi Daerah-LO	53
Tabel 5.71	Rincian Lain-lain PAD yang Sah-LO	54
Tabel 5.72	Rincian Bagi Hasil Pajak Pemerintah Pusat-LO	54
Tabel 5.73	Rincian Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam) - LO.....	55
Tabel 5.74	Rincian Dana Alokasi Khusus-LO.....	55
Tabel 5.75	Rincian Bagi Hasil Pajak Pemerintah Provinsi - LO.....	56
Tabel 5.76	Rincian Pendapatan Lainnya-LO	57
Tabel 5.77	Rincian Beban Pegawai - LO.....	57
Tabel 5.78	Rincian Beban Persediaan – LO	58
Tabel 5.79	Rincian Beban Jasa - LO.....	58
Tabel 5.80	Rincian Beban Pemeliharaan - LO.....	59
Tabel 5.81	Rincian Beban Penyusutan – LO	60
Tabel 5.82	Rincian Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud Lainnya – LO.....	60
Tabel 5.84	Rincian Beban Transfer - LO.....	61
Tabel 5.85	Rincian Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	62
Tabel 5.86	Rincian Arus Masuk Kas dari Aktivitas Operasi.....	62
Tabel 5.87	Rincian Arus Keluar Kas untuk Aktivitas Operasi.....	62
Tabel 5.88	Rincian Arus Kas Bersih untuk Aktivitas Investasi/ Investasi Aset Non Keuangan63	
Tabel 5.89	Rincian Arus Keluar Kas untuk Aktivitas Investasi	63
Tabel 5.90	Rincian Arus Kas untuk Aktivitas Transitoris/Non Anggaran	64
Tabel 5.91	Rincian Kenaikan/Penurunan Bersih Kas Selama Periode 2021	64
Tabel 5.92	Rincian Koreksi Ekuitas	65

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Rincian Pendapatan Tahun Anggaran 2021
Lampiran 2	Kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2021
Lampiran 3	Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2021
Lampiran 4	Kas di Bendahara JKN 2021
Lampiran 5	Kas Dana BOS
Lampiran 6	Piutang Pajak per 31 Desember 2021
Lampiran 7	Piutang Retribusi per 31 Desember 2021
Lampiran 8	Piutang Lain-lain PAD yang Sah per 31 Desember 2021
Lampiran 9	Piutang Transfer Pemerintah Provinsi per 31 Desember 2021
Lampiran 10	Saldo Persediaan OPD per 31 Desember 2021
Lampiran 11	Investasi Non Permanen Dana Bergulir per 31 Desember 2021
Lampiran 12	Investasi Non Permanen Bantuan Ternak per 31 Desember 2021
Lampiran 13	Kertas Kerja Aset Tetap Tahun 2021
Lampiran 14	Kertas Kerja Ekstrakomptabel per 31 Desember 2021
Lampiran 15	Kertas Kerja Aset Lain-lain (RB) per 31 Desember 2021
Lampiran 16	Penyusutan Aset Lain-lain (Rusak Berat) per 31 Desember 2021
Lampiran 17	Penyusutan Aset Tidak Berwujud per 31 Desember 2021
Lampiran 18	Rincian Utang ke Kabupaten Toraja Utara per 31 Desember 2021
Lampiran 19	Rincian Utang Tahun 2021
Lampiran 20	Kerta Kerja Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2021
Lampiran 21	Rincian Beban Penyusutan Tahun 2021
Lampiran 22	Realisasi DDS
Lampiran 23	Monitoring <i>Batch</i> Penyaluran Dana Desa 2021



BAB I PENDAHULUAN

1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Dalam rangka pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel dan transparan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Kabupaten Tana Toraja menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Tana Toraja Tahun Anggaran 2021 sebagai bentuk laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2021.

Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Tana Toraja terdiri dari : Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan. Laporan Keuangan dimaksud disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dengan menggunakan Lampiran I yang merupakan Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis Akrual. Pada dasarnya LKPD Kabupaten Tana Toraja Tahun Anggaran 2021 disusun dengan maksud untuk memenuhi kebutuhan informasi dari *stakeholders* (antara lain masyarakat, DPRD, Lembaga Pemeriksa, dan Pemerintah Pusat) yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Tana Toraja selama Tahun Anggaran 2021.

LKPD Kabupaten Tana Toraja Tahun Anggaran 2021 disusun dengan tujuan untuk menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan dengan menyediakan informasi mengenai realisasi anggaran, hasil operasi, posisi keuangan, perubahan ekuitas, perubahan saldo anggaran lebih dan arus kas.

Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Tana Toraja Tahun Anggaran 2021 disusun dengan tujuan sebagai berikut:

1. menyediakan informasi mengenai posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas dana pemerintah;
2. menyediakan informasi mengenai perubahan posisi sumber daya ekonomi, kewajiban dan ekuitas dana pemerintah;
3. menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi;
4. menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap anggarannya;
5. menyediakan informasi mengenai cara entitas pelaporan mendanai aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya;
6. menyediakan informasi mengenai potensi pemerintah untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan pemerintah;
7. menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan entitas pelaporan dalam mendanai aktivitasnya.

1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Tana Toraja Tahun Anggaran 2021 disusun berdasarkan:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);



5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4575);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4576);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4616);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6279);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6322)
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyisihan Piutang dan Penyisihan Dana Bergulir Pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1752);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 4 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 4 Tahun 2020);
17. Peraturan Bupati Tana Toraja Nomor 33 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Nomor 32 Tahun 2020);
18. Peraturan Bupati Tana Toraja Nomor 26 Tahun 2017 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Tana Toraja.
19. Peraturan Bupati Tana Toraja Nomor 30 Tahun 2020 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Tana Toraja.



1.3 Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan

Sistematika penulisan catatan atas laporan keuangan adalah sebagai berikut:

Bab I. Pendahuluan

- 1.1 Maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan;
- 1.2 Landasan hukum penyusunan laporan keuangan;
- 1.3 Sistematika penulisan catatan atas laporan keuangan;

Bab II. Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan dan Pencapaian Target Kinerja APBD

- 2.1 Ekonomi makro;
- 2.2 Kebijakan Keuangan;
- 2.3 Indikator pencapaian target kinerja APBD;

Bab III. Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan

- 3.1 Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan;
- 3.2 Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan;

Bab IV. Kebijakan Akuntansi

- 4.1 Entitas akuntansi / entitas pelaporan keuangan daerah;
- 4.2 Basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah;
- 4.3 Basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah;
- 4.4 Penerapan kebijakan akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam standar akuntansi pemerintah pada pemerintah daerah;

Bab V. Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

- 5.1 Penjelasan Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran
- 5.2 Penjelasan Pos-pos Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih
- 5.3 Penjelasan Pos-pos Neraca
- 5.4 Penjelasan Pos-pos Laporan Operasional
- 5.5 Penjelasan Pos-pos Laporan Arus Kas
- 5.6 Penjelasan Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas

Bab VI. Penjelasan Atas Informasi-Informasi Non Keuangan

BabVII. Penutup



BAB II EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD

2.1 Ekonomi Makro

Berdasarkan Data-data yang diperoleh dari buku Tana Toraja Dalam Angka Tahun 2022, penduduk Kabupaten Tana Toraja di tahun 2021 sebanyak 285.179 jiwa. Kepadatan penduduk di Kabupaten Tana Toraja tahun 2021 mencapai 139 jiwa/km². Kepadatan penduduk di 19 Kecamatan cukup beragam dengan kepadatan penduduk tertinggi terletak di Kecamatan Makale dengan kepadatan sebesar 982 jiwa/ km² dan terendah di Kecamatan Bonggakaradeng sebesar 39 jiwa/ km².

Data Ekonomi Makro Kabupaten Tana Toraja Tahun 2019 – 2021 sebagai berikut:

Tabel 2.1 Data Ekonomi Makro Kabupaten Tana Toraja Tahun 2019-2021

Indikator	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021
Ketenagakerjaan			
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	78,50	73,25	77,99
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	2,74	2,60	3,1
Rasio Gini	0,362	0,348	
Laju Pertumbuhan Ekonomi	7,22	-0,28	5,19
Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	67,25	68,75	69,49
Kemiskinan			
Jumlah Penduduk Miskin (Ribuan Jiwa)	28,71	28,41	29,33
Persentase Penduduk Miskin (Persen)	12,35	12,10	10,29
Indeks Kedalaman Kemiskinan	2,27	2,25	1,66
Indeks Keparahan Kemiskinan	1,12	0,74	0,36
Garis Kemiskinan (Rupiah/Kapita/Bulan)	316.911	284.100	350.220

Sumber: Tana Toraja dalam Angka Tahun 2022, Badan Pusat Statistik Kabupaten Tana Toraja

2.2 Kebijakan Keuangan

Kebijakan Keuangan Pemerintah Kabupaten Tana Toraja Tahun Anggaran 2021 mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2021 – 2026. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2021 - 2026 merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Bupati Tana Toraja yang penyusunannya berpedoman pada RPJPD Kabupaten Tana Toraja dan memperhatikan RPJMN, RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan, RTRW Kabupaten Tana Toraja serta rencana pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten tetangga.

Dalam Tahun 2021 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah disusun berdasarkan regulasi pengelolaan keuangan daerah yakni Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021.

Dalam upaya meningkatkan pelaksanaan pembangunan di berbagai bidang, stabilitas perekonomian adalah merupakan salah satu prasyarat dasar untuk tercapainya peningkatan kesejahteraan rakyat melalui pertumbuhan yang tinggi dan peningkatan kualitas pertumbuhan, serta dapat memberikan kepastian berusaha bagi para pelaku ekonomi. Oleh karenanya stabilitas ekonomi makro akan dapat dicapai apabila hubungan variabel ekonomi makro yang utama berada dalam keseimbangan, neraca pembayaran, penerimaan dan pengeluaran fiskal serta tabungan dan investasi.

Perekonomian yang tidak stabil akan dapat menimbulkan biaya yang tinggi bagi perekonomian dan akan menyulitkan masyarakat baik swasta maupun rumah tangga. Tingkat investasi yang rendah akan menurunkan potensi pertumbuhan ekonomi jangka panjang dan adanya fluktuasi yang tinggi dalam pertumbuhan produksi, hal ini sangat berpengaruh terhadap



tenaga kerja dan ketersediaan lapangan kerja. Inflasi yang tinggi akan merupakan beban yang sangat berat dan sangat dirasakan oleh penduduk miskin, dimana daya beli (*purchasing power*) masyarakat akan semakin rendah. Maka dari itu Pemerintah Kabupaten Tana Toraja menerapkan kebijakan umum bidang keuangan daerah sebagai berikut:

1. Mendorong tumbuhnya sektor usaha swasta dalam semua ukuran, baik menengah maupun kecil yang akan berfungsi sebagai subyek pajak dan retribusi baru;
2. Meningkatkan penerimaan daerah yang berasal dari Dana Perimbangan dengan cara:
 - a. Mengusulkan rencana program dan kegiatan untuk setiap bidang pemerintahan yang dapat disampaikan kepada pemerintah melalui forum Musrenbang Provinsi dan Nasional,
 - b. Mendorong pimpinan OPD untuk melakukan koordinasi dengan Kementerian Teknis di tingkat pusat,
 - c. Menjalin hubungan kerja dan komunikasi yang intensif dengan para pelaku ekonomi daerah dan nasional untuk melakukan investasi di Kabupaten Tana Toraja,
 - d. Menerbitkan profil investasi pada berbagai sektor potensial untuk disebarluaskan kepada pihak-pihak terkait secara periodik.
3. Memberikan kemudahan perizinan kepada investor yang terkait untuk penanaman modal di Kabupaten Tana Toraja,
4. Penajaman skala prioritas program dan kegiatan yang paling banyak memberikan kontribusi kepada upaya pencapaian visi dan misi daerah.

2.2.1 Arah Kebijakan Pendapatan Daerah

Pendapatan Daerah adalah semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah, menambah ekuitas dana, merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran dan tidak perlu dibayar kembali oleh daerah. Pendapatan daerah dikelompokkan atas:

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terdiri dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah;
2. Pendapatan Transfer terdiri dari Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat dan Pendapatan Transfer Antar Daerah. Pendapatan Transfer pemerintah pusat terdiri dari Dana Perimbangan yang terdiri dari Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Dana Desa. Pendapatan Transfer Antar Daerah terdiri dari Pendapatan Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan;
3. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah terdiri dari Hibah dan Lain-lain Pendapatan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Untuk mendukung upaya peningkatan pendapatan daerah dilakukan melalui penerapan kebijakan pendapatan antara lain:

1. Intensifikasi dan ekstensifikasi penerimaan pajak dan retribusi daerah dengan tetap berpedoman pada prinsip keadilan melalui upaya pemutakhiran data sumber-sumber pendapatan daerah;
2. Mengoptimalkan pengelolaan BUMD agar menghasilkan penerimaan;
3. Menciptakan kegiatan yang berorientasi pada terciptanya peningkatan sumber-sumber penerimaan baru;
4. Meningkatkan pelaksanaan pengawasan yang berkesinambungan terhadap sumber-sumber pendapatan dan perbaikan atau pengelolaan sistem dan prosedur pengelolaan pelayanan sumber-sumber pendapatan daerah;
5. Perbaikan dan pengelolaan sistem dan prosedur pengelolaan pelayanan publik;
6. Menerapkan norma dan prinsip anggaran yang berbasis kinerja dengan memberikan penekanan pada aspek-aspek transparansi dan akuntabilitas, disiplin anggaran, keadilan anggaran serta efisiensi dan efektivitas.



2.2.2 Arah Kebijakan Belanja Daerah

Kebijakan Belanja disusun dengan pendekatan anggaran belanja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan dengan berpedoman pada prinsip-prinsip penganggaran. Ini bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta menjamin efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran ke dalam program/kegiatan.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, maka struktur APBD Kabupaten Tana Toraja untuk Belanja dikelompokkan atas Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga dan Belanja Transfer.

Belanja Operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek; Belanja Modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi; Belanja Tidak Terduga merupakan pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat di prediksi sebelumnya; Belanja Transfer merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah Lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Desa.

2.2.3 Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah, baik yang berasal dari penerimaan daerah maupun pengeluaran daerah, yang perlu dibayar atau yang akan diterima kembali, yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit dan/atau memanfaatkan surplus anggaran. Penerimaan pembiayaan antara lain dapat berasal dari pencairan sisa lebih perhitungan tahun yang lalu, dari pinjaman, dan dari hasil divestasi. Sementara pengeluaran pembiayaan antara lain dapat digunakan untuk pembayaran kembali pokok pinjaman, pemberian pinjaman kepada entitas lain, dan penyertaan modal oleh pemerintah.

Pembiayaan merupakan transaksi keuangan untuk menutup defisit atau untuk memanfaatkan surplus. Defisit atau surplus terjadi apabila ada selisih antara Anggaran Pendapatan Daerah dan Belanja Daerah. Pembiayaan disediakan untuk menganggarkan setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Untuk mengatasi permasalahan umum yang sering terjadi dalam bidang pembiayaan pada tahun-tahun sebelumnya, maka ditetapkan kebijakan sebagai berikut:

1. Seluruh OPD wajib menyusun rencana pagu kebutuhan anggaran untuk setiap kegiatan dengan mengacu pada Standar Analisa Belanja dan Harga Satuan Setempat;
2. Penggunaan SILPA dalam bentuk pemberian Anggaran Belanja Tambahan diutamakan kepada OPD yang mengajukan rencana tambahan anggaran untuk pelaksanaan kegiatan pelayanan umum yang terukur.

2.3 Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD

Target Kinerja dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun Anggaran 2021 adalah target yang ditetapkan oleh setiap Organisasi Perangkat Daerah dalam melaksanakan program maupun kegiatannya dalam periode 1 (satu) tahun anggaran.

Secara umum target APBD Kabupaten Tana Toraja tercapai sesuai target yang ditetapkan. Target Pendapatan Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp1.200.521.228.957,00 dengan realisasi sebesar Rp1.102.376.766.452,96 atau 91,82 %. Tercapainya pendapatan ini merupakan kontribusi pemerintah pusat melalui Dana Perimbangan, Transfer Pemerintah Pusat Lainnya dan Transfer Pemerintah Provinsi dengan target sebesar Rp1.077.376.147.000,00 dengan realisasi sebesar Rp1.014.493.601.479,00 atau 94,16%. Target Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp123.145.081.957,00 dengan realisasi sebesar Rp87.883.164.973,96 atau 71,37%.



BAB III IKHTISAR PENCAPAIAN TARGET KINERJA KEUANGAN

3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan

Anggaran Daerah pada hakikatnya merupakan salah satu alat untuk meningkatkan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan tujuan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggungjawab. Penyelenggaraan fungsi pemerintahan daerah akan terlaksana secara optimal apabila penyelenggaraan urusan pemerintahan diikuti dengan pemenuhan sumber-sumber keuangan daerah. Pada Tahun Anggaran 2021 Anggaran Belanja Daerah Kabupaten Tana Toraja ditetapkan sebesar Rp1.204.509.633.921,00 dan direncanakan didanai melalui penerimaan pendapatan yang bersumber pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp123.145.081.957,00. Pendapatan Transfer yang berasal dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi sebesar Rp1.077.376.147.000,00 sehingga akan menghasilkan defisit anggaran sebesar (Rp3.988.404.964,00).

Realisasi sasaran kinerja fiskal Pemerintah Kabupaten Tana Toraja selama Tahun Anggaran 2021 dapat dilihat secara ringkas pada tabel berikut ini:

Tabel 3.1 Realisasi Sasaran Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Tana Toraja T.A. 2021
(dalam rupiah)

Uraian	Target (Anggaran)	Realisasi	%
I. Pendapatan	1.200.521.228.957,00	1.102.376.766.452,96	91,82
I.1. Pendapatan Asli Daerah	123.145.081.957,00	87.883.164.973,96	71,37
I.2. Dana Transfer	996.176.147.000,00	929.848.360.219,00	93,34
I.3. Lain-lain Pendapatan yang Sah	81.200.000.000,00	84.645.241.260,00	104,24
II. Belanja	1.204.509.633.921,00	1.049.701.515.679,57	87,15
II.1. Belanja Operasi	811.913.230.273,00	708.956.213.333,57	87,32
II.2. Belanja Modal	206.915.659.578,00	155.404.494.851,00	75,11
II.3. Belanja Tidak Terduga	3.606.710.070,00	3.557.364.000,00	98,63
II.4. Belanja Transfer	182.074.034.000,00	181.783.443.495,00	99,84
Surplus/(Defisit)	(3.988.404.964,00)	52.675.250.773,39	(1.320,71)
III. Pembiayaan	3.988.404.964,00	55.443.674.105,40	1.390,12
III.1. Penerimaan	3.988.404.964,00	55.443.674.105,40	1.390,12
III.2. Pengeluaran			
Pembiayaan Netto	3.988.404.964,00	55.443.674.105,40	1.390,12
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) sebelum Koreksi	0,00	108.118.924.878,79	
Koreksi SiLPA			
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA)	0,00	108.118.924.878,79	

Tabel di atas memperlihatkan bahwa, secara umum realisasi Pendapatan Daerah sebesar Rp1.102.376.766.452,96 atau 91,82% belum mencapai target yang telah ditetapkan, yaitu sebesar Rp1.200.521.228.957,00. Untuk Pendapatan Transfer, realisasi penerimaan pada Tahun Anggaran 2021 adalah sebesar Rp929.848.360.219,00 dari target anggaran sebesar Rp996.176.147.000,00.

Untuk pos Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah terealisasi sebesar Rp84.645.241.260,00. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, Lain-lain Pendapatan yang Sah dibagi menurut jenis pendapatan yang mencakup:

1. Hibah yang berasal dari pemerintah, pemerintah daerah lainnya, badan/lembaga/organisasi swasta dalam negeri, kelompok masyarakat/perorangan, dan lembaga luar negeri yang tidak mengikat;
2. Dana darurat dari pemerintah dalam rangka penanggulangan korban/kerusakan akibat bencana alam;
3. Bantuan keuangan dari provinsi atau dari pemerintah daerah lainnya.



Dalam kaitannya dengan anggaran dan realisasi Belanja Daerah, pada Tahun Anggaran 2021 belanja daerah dialokasikan sebesar Rp1.204.509.633.921,00 dan direalisasikan sebesar Rp1.049.701.515.679,57 atau 87,15% sehingga masih terdapat efisiensi belanja sebesar Rp154.808.118.241,43. Belanja Operasional dianggarkan sebesar Rp811.913.230.273,00 dan dana yang direalisasikan sebesar Rp708.956.213.333,57 atau sebesar 87,32%. Anggaran dan realisasi Belanja Operasional ini terdiri atas:

Tabel 3.2 Realisasi Belanja Operasional

(dalam rupiah)

No	Belanja Operasi	Anggaran	Realisasi	%
1	Belanja Pegawai	472.926.792.060,00	440.418.572.040,00	93,13
2	Belanja Barang	308.286.559.749,00	248.283.221.027,57	80,54
3	Belanja Subsidi	1.715.603.200,00	1.373.697.200,00	80,07
4	Belanja Hibah	27.573.883.264,00	18.061.428.266,00	65,50
5	Belanja Bantuan Sosial	1.410.392.000,00	819.294.800,00	58,09
	Jumlah	811.913.230.273,00	708.956.213.333,57	87,32

3.2 Hambatan dan Kendala yang Ada Dalam Pencapaian Target yang Telah Ditetapkan

Secara umum faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam pencapaian kinerja keuangan Tahun Anggaran 2021 masih sama dengan tahun-tahun sebelumnya, yaitu:

1. Masih kurang optimalnya pengelolaan potensi yang ada di Kabupaten Tana Toraja (baik pajak maupun retribusi daerah).
2. Masih terbatasnya sarana dan prasarana yang menunjang pelayanan kepada masyarakat, sehingga berdampak kepada kurang pedulinya masyarakat dalam memenuhi kewajiban membayar Pajak dan Retribusi Daerah.
3. Adanya program-program lanjutan strategis, terutama program dan kegiatan fisik dengan nilai anggaran yang cukup besar sehingga berpengaruh terhadap keseluruhan rencana alokasi anggaran belanja.
4. Masih adanya kebutuhan yang belum terakomodasi dikarenakan keterbatasan sumber dana yang tersedia.
5. Adanya pandemi COVID-19.

Sedangkan faktor-faktor penunjang dalam pencapaian kinerja adalah:

1. Adanya peningkatan kapasitas sumber daya aparatur baik melalui pembinaan dan pelatihan internal, ataupun melalui peningkatan jenjang pendidikan.
2. Adanya perbaikan sistem kerja dan sarana dan prasarana yang mendukung pencapaian target kinerja.
3. Semakin meningkatnya koordinasi antara dinas/badan/kantor dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi.
4. Semakin meningkatnya koordinasi dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, dan instansi vertikal lainnya.



BAB IV KEBIJAKAN AKUNTANSI

4.1 Entitas Akuntansi/Entitas Pelaporan Keuangan Daerah

Entitas Pelaporan dalam LKPD Kabupaten Tana Toraja Tahun Anggaran 2021 adalah Pemerintah Kabupaten Tana Toraja. Selain itu Pemerintah Kabupaten Tana Toraja memiliki entitas akuntansi yang terdiri dari OPD dan PPKD (BUD) yang menyampaikan laporan keuangan sehubungan dengan anggaran/barang yang dikelolanya.

4.2 Basis Akuntansi Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Pemerintah Kabupaten Tana Toraja menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

4.3 Basis Pengukuran Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Pemerintah Kabupaten Tana Toraja dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

4.4 Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan Dengan Ketentuan Yang Ada Dalam SAP Pada Pemerintah Daerah

Kebijakan Akuntansi adalah prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Pada penyusunan laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2021 Kebijakan Akuntansi yang diterapkan sesuai dengan Peraturan Bupati Tana Toraja Nomor 26 Tahun 2017 dan Nomor 30 Tahun 2020 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Tana Toraja. Di samping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Tana Toraja adalah sebagai berikut:

1. Pendapatan- LRA

- a. Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.
- b. Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Daerah.



- c. Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- d. Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

2. Pendapatan- LO

- a. Pendapatan-LO adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- b. Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan/atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi.
- c. Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- d. Pendapatan- LO disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

3. Belanja

- a. Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- b. Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari Kas Umum Daerah.
- c. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Pengguna Anggaran.
- d. Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

4. Beban

- a. Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- b. Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- c. Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

5. Aset

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

a. Aset Lancar

- 1) Aset Lancar mencakup kas dan setara kas yang diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.
- 2) Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.
- 3) Piutang dinyatakan dalam neraca menurut nilai yang timbul berdasarkan hak yang telah dikeluarkan surat keputusan penagihan atau yang dipersamakan, yang diharapkan diterima pengembaliannya dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
- 4) Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TPA/TGR.



- 5) Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil perhitungan fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan cara memperhitungkan saldo awal persediaan ditambah pembelian atau perolehan persediaan, yang hasilnya dikalikan nilai per unit sesuai dengan metode yang digunakan.

b. Aset Tetap

- 1) Aset Tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun.
- 2) Nilai Aset Tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- 3) Nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap atas perolehan aset tetap ditetapkan sebagai berikut:
 - a) Pengeluaran untuk persatuan peralatan dan mesin dan alat olah raga yang sama dengan atau lebih dari Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
 - b) Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang sama dengan atau lebih dari Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
 - c) Nilai satuan minimum kapitalisasi Aset Tetap dikecualikan terhadap pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan dan aset tetap lainnya.

c. Aset Lainnya

- 1) Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah Aset Tak Berwujud, dan Aset Lain-lain.
- 2) Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual.
- 3) Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah yang dihentikan dari penggunaan operasional entitas.

6. Kewajiban

- a. Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- b. Kewajiban pemerintah diklasifikasikan ke dalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.
 - 1) Kewajiban Jangka Pendek
Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.
Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK), Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.
 - 2) Kewajiban Jangka Panjang
Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.
- c. Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

7. Ekuitas

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.



8. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih

- a. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih adalah cadangan yang harus dibentuk sebesar persentase tertentu dari piutang berdasarkan penggolongan kualitas piutang. Penilaian kualitas piutang dilakukan dengan mempertimbangkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah.
- b. Kualitas piutang didasarkan pada kondisi masing-masing piutang pada tanggal pelaporan sesuai dengan Peraturan Bupati Tana Toraja Nomor 26 Tahun 2017 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Tana Toraja. Dasar yang digunakan untuk menghitung penyisihan piutang adalah kualitas piutang. Berikut tarid penyisihan piutang tidak tertagih berdasarkan kualitas piutangnya.

Tabel 4.1 Rincian Kualitas Piutang

No	Kualitas Piutang	Taksiran Piutang Tidak Tertagih
1.	Lancar	0,5 %
2.	Kurang Lancar	10 %
3.	Diragukan	50 %

9. Penyisihan Dana Bergulir

- a. Penyisihan Dana Bergulir Tidak Tertagih adalah cadangan yang harus dibentuk sebesar persentase tertentu dari dana bergulir berdasarkan penggolongan kualitas dana bergulir. Penilaian kualitas dana bergulir dilakukan dengan mempertimbangkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah.
- b. Kualitas Dana Bergulir didasarkan pada kondisi masing-masing dana bergulir pada tanggal pelaporan sesuai dengan Peraturan Bupati Tana Toraja Nomor 26 Tahun 2017 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Tana Toraja. Untuk menentukan besarnya dana bergulir yang diragukan tertagih terlebih dahulu harus dilakukan pengelompokan dana bergulir berdasarkan umur dana bergulir (*aging schedule*) sebagai dasar perhitungan. Besarnya dana bergulir yang diragukan tertagih pada setiap akhir tahun ditentukan sebagai berikut:
 - (a) Kurang dari 1 tahun disisihkan sebesar 0,5% dari dana bergulir dengan kualitas lancar;
 - (b) 1 tahun sampai dengan 2 tahun disisihkan sebesar 10% dari dana bergulir dengan kualitas kurang lancar;
 - (c) 3 tahun sampai dengan 4 tahun disisihkan sebesar 50% dari dana bergulir dengan kualitas diragukan setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada);
 - (d) Diatas 5 tahun disisihkan sebesar 100% dari dana bergulir dengan kualitas macet setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada).

10. Penyusutan Aset Tetap

- a. Penyusutan Aset Tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap.
- b. Penyusutan Aset Tetap tidak dilakukan terhadap:
 - 1) Tanah
 - 2) Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP)
 - 3) Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.
- c. Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap bulan tanpa memperhitungkan adanya nilai sisa (nilai residu).
- d. Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap bulan selama masa manfaat. Masa Manfaat Aset Tetap diklasifikasikan sesuai dengan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Tana Toraja.



BAB V PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

Bagian ini membahas secara rinci mengenai pos-pos yang terdapat dalam laporan keuangan, dimana pos pendapatan, belanja, dan pembiayaan terdapat dalam Laporan Realisasi Anggaran, pos aset, kewajiban, dan ekuitas dana terdapat dalam Neraca. Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan non operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO. Di samping itu pula terdapat penjelasan mengenai aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas sebagaimana yang tercantum dalam Laporan Arus Kas.

Laporan Realisasi Anggaran menyajikan informasi mengenai realisasi pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit dan pembiayaan yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam Tahun Anggaran 2021.

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan non operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO.

Neraca menggambarkan posisi keuangan Pemerintah Kabupaten Tana Toraja mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana pada tanggal 31 Desember 2021. Laporan Arus Kas menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama Tahun Anggaran 2021 dan saldo kas dan setara kas pada tanggal 31 Desember 2021.

5.1 Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran menyajikan informasi realisasi pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit dan pembiayaan yang masing-masing di bandingkan dengan anggarannya dalam satu periode. Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun Anggaran 2021 merupakan rekapitulasi dari laporan realisasi anggaran OPD lingkup Pemerintah Kabupaten Tana Toraja.

Pendapatan Asli Daerah terdiri dari Pendapatan Pajak Daerah, Pendapatan Retribusi, Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan, dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah. Pemerintah Daerah telah berupaya untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dari tahun ke tahun. Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan meningkatkan penerimaan pajak dan retribusi daerah. Faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan pendapatan asli daerah dalam tahun 2021 antara lain mencakup: (i) kesadaran masyarakat untuk membayar pajak dan retribusi; (ii) potensi-potensi pendapatan baru yang dapat digali; dan (iii) Penegakan Perda Pendapatan.

Belanja Daerah dilakukan berdasarkan pada prinsip pengendalian anggaran belanja daerah dengan tetap menjamin terpenuhinya kebutuhan dasar dan alokasi belanja minimum, dengan mempertimbangkan penghematan dan efisiensi penggunaan belanja daerah, menjamin terlaksananya kegiatan administrasi pemerintahan, serta terselenggaranya agenda-agenda penting daerah.

Belanja Daerah meliputi (i) Belanja Operasi, (ii) Belanja Modal, (iii) Belanja Tak Terduga, dan (iv) Transfer. Belanja Operasi ditujukan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan pembangunan tanpa menimbulkan aset tetap. Belanja Modal ditujukan untuk mendukung kegiatan pembangunan berupa aset tetap. Belanja Tak Terduga ditujukan untuk mengantisipasi di luar perencanaan pemerintah daerah. Belanja Transfer ditujukan untuk pemerataan pembangunan.

1. Pendapatan	2021	2020
	<u>Rp1.102.376.766.452,96</u>	<u>Rp1.132.684.863.534,75</u>

Pada Tahun Anggaran 2021, Pemerintah Kabupaten Tana Toraja menganggarkan pendapatan sebesar Rp1.200.521.228.957,00 yang terealisasi sebesar Rp1.102.376.766.452,96 atau mencapai 91,82%. Sementara pada Tahun Anggaran 2020 Pemerintah Kabupaten Tana Toraja merealisasikan pendapatannya senilai Rp1.132.684.863.534,75 atau mengalami penurunan pada Tahun Anggaran 2021 Rp30.308.097.081,79 atau 2,76%. Rincian anggaran dan pendapatan Tahun Anggaran 2021 dan 2020 akan dijabarkan pada tabel berikut:



Tabel 5.1 Rincian Pendapatan

(dalam rupiah)

No	Uraian	Tahun 2021		%	Tahun 2020
		Anggaran	Realisasi		Realisasi
	PENDAPATAN	1.200.521.228.957,00	1.102.376.766.452,96	91,82	1.132.684.863.534,75
A.	Pendapatan Asli Daerah	123.145.081.957,00	87.883.164.973,96	71,37	110.936.063.512,19
B.	Pendapatan Transfer	996.176.147.000,00	929.848.360.219,00	93,34	958.760.505.384,56
C.	Pendapatan Lain-Lain yang Sah	81.200.000.000,00	84.645.241.260,00	104,24	62.988.294.638,00

Rincian pendapatan per kode rekening dapat dilihat pada **Lampiran 1**.

A. Pendapatan Asli Daerah	<u>2021</u>	<u>2020</u>
	Rp87.883.164.973,96	Rp110.936.063.512,19

Pada Tahun 2021 Pemerintah Kabupaten Tana Toraja menganggarkan Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp123.145.081.957,00 dan realisasi sebesar Rp87.883.164.973,96 atau 71,37%. Pendapatan ini mengalami penurunan senilai Rp23.052.898.538,23 atau 22,12% dari Tahun Anggaran 2020 yang terealisasi senilai Rp110.936.063.512,19.

Tabel 5.2 Rincian Pendapatan Asli Daerah

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Tahun 2021		%	Tahun 2020
		Anggaran	Realisasi		Realisasi
1	Pendapatan Pajak Daerah	12.850.000.000,00	13.007.460.300,00	101,23	11.028.317.168,50
2	Pendapatan Retribusi Daerah	15.000.000.000,00	7.803.351.613,00	52,02	7.163.530.253,75
3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	9.500.000.000,00	8.489.122.352,00	89,36	8.599.872.702,00
4	Lain-lain PAD yang Sah	85.795.081.957,00	58.583.230.708,96	68,28	84.144.343.387,94
	Jumlah	123.145.081.957,00	87.883.164.973,96	71,37	110.936.063.512,19

1) Pendapatan Pajak Daerah	<u>2021</u>	<u>2020</u>
	13.007.460.300,00	Rp11.028.317.168,50

Pendapatan Pajak Daerah adalah penerimaan asli daerah yang dipungut Pemerintah Kabupaten Tana Toraja dari Wajib Pajak. Pada Tahun 2021 Pemerintah Kabupaten Tana Toraja menganggarkan Pendapatan Pajak Daerah senilai Rp12.850.000.000,00 dan terealisasi senilai Rp13.007.460.300,00 atau 101,23%. Pendapatan ini mengalami kenaikan senilai Rp1.979.143.131,50 atau 15,22% dari Tahun Anggaran 2020 yang terealisasi senilai Rp11.028.317.168,50. Rincian pajak daerah akan dijabarkan pada tabel berikut.

Tabel 5.3 Rincian Pendapatan Pajak Daerah

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Tahun 2021		%	Tahun 2020
		Anggaran	Realisasi		Realisasi
1	Pajak Hotel	580.000.000,00	353.224.128,00	60,90	280.728.734,00
2	Pajak Restoran	495.000.000,00	1.536.240.713,00	310,35	310.004.636,00
3	Pajak Hiburan	50.000.000,00	11.627.500,00	23,26	16.025.320,00
4	Pajak Reklame	1.000.000.000,00	1.153.301.973,00	115,33	770.828.423,00
5	Pajak Penerangan Jalan	8.000.000.000,00	5.203.216.323,00	65,04	4.887.584.500,00
6	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	1.400.000.000,00	653.786.981,00	46,70	1.109.684.340,00
7	Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan	0,00	2.618.536.732,00		2.428.634.736,00
8	Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	1.325.000.000,00	1.477.525.950,00	111,51	1.224.826.479,50
	Jumlah	12.850.000.000,00	13.007.460.300,00	101,23	11.028.317.168,50



2) Pendapatan Retribusi Daerah 2021
Rp7.803.351.613,00 2020
Rp7.163.530.253,75

Retribusi Daerah adalah Penerimaan Asli Daerah yang dipungut Pemerintah Kabupaten Tana Toraja dari Wajib Retribusi. Pada Tahun 2021 Pemerintah Kabupaten Tana Toraja menganggarkan Pendapatan Retribusi Daerah senilai Rp15.000.000.000,00 dan terealisasi senilai Rp7.803.351.613,00 atau 52,02%. Pendapatan ini mengalami kenaikan senilai Rp639.821.359,25 atau 9,25% dari Tahun Anggaran 2020 yang terealisasi senilai Rp7.163.530.253,75. Rincian retribusi daerah akan dijabarkan pada tabel berikut.

Tabel 5.4 Rincian Pendapatan Retribusi Daerah

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Tahun 2021		%	Tahun 2020
		Anggaran	Realisasi		Realisasi
1	Retribusi Pelayanan Kesehatan	750.000.000,00	589.258.500,00	78,57	896.557.347,00
2	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	150.000.000,00	94.115.000,00	62,74	62.820.000,00
3	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	500.000.000,00	13.400.000,00	2,68	90.570.000,00
4	Retribusi Pelayanan Pasar	487.362.500,00	361.336.000,00	74,14	318.448.500,00
5	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	100.000.000,00	0,00	-	130.200.000,00
6	Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	20.250.000,00	72.494.000,00	358,00	79.250.000,00
7	Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	175.000.000,00	196.064.080,00	112,04	136.515.200,00
8	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	67.137.500,00	554.099.550,00	825,32	346.080.425,00
9	Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan	500.000.000,00	263.096.000,00	52,62	91.281.000,00
10	Retribusi Terminal	480.000.000,00	46.788.000,00	9,75	
11	Retribusi Tempat Khusus Parkir	250.000.000,00	5.500.000,00	2,20	67.080.000,00
12	Retribusi Rumah Potong Hewan	3.110.250.000,00	3.591.825.000,00	115,48	2.451.320.000,00
13	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	7.680.000.000,00	801.037.500,00	10,43	1.464.905.000,00
14	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah				300.000,00
15	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	650.000.000,00	1.211.527.983,00	186,39	981.232.781,75
16	Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol	10.000.000,00		-	
17	Retribusi Izin Trayek	70.000.000,00	2.810.000,00	4,01	21.501.000,00
18	Tunggakan Retribusi Pasar				25.469.000,00
Jumlah		15.000.000.000,00	7.803.351.613,00	52,02	7.163.530.253,75

3) Pendapatan Bagi Hasil 2021
Rp8.489.122.352,00 2020
Rp8.599.872.702,00
Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Pendapatan Bagi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan merupakan penerimaan Pemerintah Kabupaten Tana Toraja yang diperoleh dari bagian laba (dividen) atas modal yang ditanamkan atau disertakan PT. Bank Sulselbar dalam Tahun Anggaran 2021 berdasarkan Akta RUPS Luar Biasa Nomor 47 tanggal 26 Maret 2021. Pada Tahun 2021 Pemerintah Kabupaten Tana Toraja menganggarkan Pendapatan Bagi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan senilai Rp9.500.000.000,00 dan terealisasi senilai Rp8.489.122.352,00 atau 89,36%. Pendapatan ini mengalami penurunan senilai Rp110.750.350,00 atau 1,30% dari Tahun Anggaran 2020 yang terealisasi senilai Rp8.599.872.702,00.

4) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang Sah 2021
Rp58.583.230.708,96 2020
Rp84.144.343.387,94

Lain-lain PAD yang Sah merupakan penerimaan asli daerah Pemerintah Kabupaten Tana Toraja selain penerimaan pajak daerah, retribusi daerah dan hasil kekayaan daerah yang dipisahkan. Pada Tahun Anggaran 2021, jumlah Lain-lain PAD



yang Sah yang diterima oleh Pemerintah Kabupaten Tana Toraja seluruhnya sebesar Rp58.583.230.708,96 atau terealisasi sebesar 68,28% jika dibandingkan dengan anggarannya yaitu Rp85.795.081.957,00. Pendapatan tersebut mengalami penurunan sebesar Rp25.561.112.678,98 atau 33,71% dari realisasi tahun 2020 yaitu Rp84.144.343.387,94.

Tabel 5.5 Rincian Lain - lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang Sah

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Tahun 2021		%	Tahun 2020
		Anggaran	Realisasi		Realisasi
1	Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin	0,00	367.720.000,00		
2	Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya	46.914.093.000,00	43.555.700,00	0,09	92.369.000,00
3	Penerimaan Jasa Giro	9.058.318.000,00	3.623.778.997,00	40,00	2.655.284.929,00
4	Pendapatan Bunga	9.507.000.000,00	673.287.669,00	7,08	1.733.219.177,00
5	Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah	2.000.000.000,00	431.599.304,00	21,58	4.064.359.066,46
6	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan				468.137.817,00
7	Pendapatan Denda Pajak		49.369,00		2.518.607,00
8	Pendapatan Denda Retribusi Daerah	3.286.500.000,00	0,00		0,00
9	Pendapatan dari Pengembalian	0,00	280.067.300,55		1.313.294.406,00
10	Pendapatan BLUD	15.029.170.957,00	53.163.172.369,41	353,73	69.815.160.385,48
11	Pendapatan dari Pengembalian Dana Tidak Terduga				4.000.000.000,00
	Jumlah	85.795.081.957,00	58.583.230.708,96	68,28	84.144.343.387,94

B. Pendapatan	2021	2020
Transfer	Rp929.848.360.219,00	Rp958.760.505.384,56

Pemerintah Kabupaten Tana Toraja menganggarkan Pendapatan Transfer tahun 2021 sebesar Rp996.176.147.000 dan direalisasikan sebesar Rp929.848.360.219,00 atau sebesar 93,34%. Pendapatan ini mengalami penurunan senilai Rp28.912.145.165,56 atau 3,14% dari realisasi tahun sebelumnya yaitu senilai Rp958.760.505.384,56.

1) Pendapatan Transfer	2021	2020
Pemerintah Pusat- Dana Perimbangan	Rp754.231.210.626,00	Rp757.792.133.705,00

Pada Tahun Anggaran 2021, Pemerintah Kabupaten Tana Toraja menganggarkan Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan senilai Rp791.652.113.000,00 dan terealisasi senilai Rp754.231.210.626,00 atau 95,27% dari anggarannya. Realisasi tersebut mengalami penurunan senilai Rp3.560.923.079,00 atau 0,47% dari realisasi tahun sebelumnya yaitu senilai Rp757.792.133.705,00. Rincian pendapatan transfer akan dijelaskan pada tabel berikut.

Tabel 5.6 Rincian Pendapatan Transfer

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Tahun 2021		%	Tahun 2020
		Anggaran	Realisasi		Realisasi
1	Dana Bagi Hasil Pajak	9.127.463.000,00	14.343.536.807,00	157,15	11.426.556.537,00
2	Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam)	4.998.756.000,00	8.240.585.642,00	164,85	4.125.943.519,00
3	Dana Alokasi Umum	537.030.126.000,00	537.030.126.000,00	100,00	544.504.787.000,00
4	Dana Alokasi Khusus	240.495.768.000,00	194.616.962.177,00	80,92	197.734.846.649,00
	Jumlah	791.652.113.000,00	754.231.210.626,00	95,27	757.792.133.705,00

a) Dana Bagi Hasil Pajak	2021	2020
	Rp14.343.536.807,00	Rp11.426.556.537,00



Dana Bagi Hasil Pajak merupakan Pendapatan Daerah yang diperoleh dari Dana Perimbangan dari Pemerintah Pusat. Pada Tahun Anggaran 2021, jumlah Dana Bagi Hasil Pajak yang diterima oleh Pemerintah Kabupaten Tana Toraja seluruhnya sejumlah Rp14.343.536.807,00 atau terealisasi sebesar 157,15% dari anggarannya yaitu Rp9.127.463.000,00. Realisasi tersebut mengalami kenaikan senilai Rp2.916.980.270,00 atau 25,53% dari realisasi tahun 2020 yaitu Rp11.426.556.537,00. Rincian Pendapatan Dana Bagi Hasil Pajak akan dijelaskan dengan perincian sebagai berikut.

Tabel 5.7 Rincian Bagi Hasil Pajak

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Tahun 2021		%	Tahun 2020
		Anggaran	Realisasi		Realisasi
1	DBH Pajak Bumi dan Bangunan	3.872.011.000,00	7.636.595.867,00	197,23	3.680.137.935,00
2	DBH PPh Pasal 21	5.255.452.000,00	6.359.502.300,00	121,01	7.243.983.989,00
3	DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPND		347.438.640,00		502.434.613,00
	Jumlah	9.127.463.000,00	14.343.536.807,00	157,15	11.426.556.537,00

b) Dana Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam

2021
Rp8.240.585.642,00

2020
Rp4.125.943.519,00

Dana Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam merupakan Pendapatan Daerah yang diperoleh dari Dana Perimbangan dari Pemerintah Pusat. Pada Tahun Anggaran 2021, Dana Bagi Hasil Bukan Pajak/ Sumber Daya Alam dianggarkan senilai Rp4.998.756.000,00 dan terealisasi sebesar Rp8.240.585.642,00 atau 164,85%. Nilai tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp4.114.642.123,00 atau 99,73% dari realisasi Tahun Anggaran 2020 yaitu Rp4.125.943.519,00. Secara lebih rinci, nilai Dana Bagi Hasil Bukan Pajak/ Sumber Daya Alam akan dijabarkan dalam tabel berikut.

Tabel 5.8 Rincian Bukan Bagi Hasil Pajak

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Tahun 2021		%	Tahun 2020
		Anggaran	Realisasi		Realisasi
1	Bagi Hasil dari Iuran Hak Pengusahaan Hutan				28.376.422,00
2	Bagi Hasil dari Iuran Eksplorasi dan Iuran Eksploitasi (Royalti)				3.020.001.352,00
3	Bagi Hasil dari Pungutan Hasil Perikanan				788.276.289,00
4	Bagi Hasil dari Pertambangan Minyak Bumi				91.656,00
5	Bagi Hasil dari Pertambangan Gas Bumi				289.197.800,00
6	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)		185.623.499,00		
7	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Minyak Bumi	773.508.000,00	200,00	0,00	
8	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Gas Bumi		1.195.798.368,00		
9	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Landrent	3.075.253.000,00	214.000,00	0,01	
10	Dana Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Royalty		4.790.021.181,00		
11	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan- Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)	21.676.000,00	540.908.819,00	2.495,43	
12	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Perikanan	1.128.319.000,00	1.528.019.575,00	135,42	
	Jumlah	4.998.756.000,00	8.240.585.642,00	164,85	4.125.943.519,00



c) Dana Alokasi Umum (DAU)	2021	2020
	Rp537.030.126.000,00	Rp544.504.787.000,00

Dana Alokasi Umum merupakan Dana Perimbangan yang diperoleh Pemerintah Kabupaten Tana Toraja dari Pemerintah Pusat dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan otonomi daerah. Pada Tahun Anggaran 2021, Pemerintah Kabupaten Tana Toraja menerima Dana Alokasi Umum sejumlah Rp537.030.126.000,00 atau sebesar 100% dari yang dianggarkan yaitu Rp537.030.126.000,00. Dana Alokasi Umum Tahun Anggaran 2021 tersebut mengalami penurunan sebesar Rp7.474.661.000,00 atau 1,39% jika dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2020 yaitu senilai Rp544.504.787.000,00.

d) Dana Alokasi Khusus (DAK)	2021	2020
	Rp194.616.962.177,00	Rp197.734.846.649,00

Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik merupakan Dana Perimbangan dari Pemerintah Pusat yang berasal dari APBN yang dialokasikan kepada Pemerintah Kabupaten Tana Toraja untuk membiayai kebutuhan khusus (*specific grant*). Pada Tahun Anggaran 2021, Pemerintah Kabupaten Tana Toraja menganggarkan Dana Alokasi Khusus sejumlah Rp240.495.768.000,00 dan terealisasi senilai Rp194.616.962.177,00 atau 80,92%. Realisasi ini mengalami penurunan senilai Rp3.117.884.472,00 atau 1,60% dari realisasi tahun sebelumnya yaitu senilai Rp197.734.846.649,00.

d.1. Dana Alokasi Khusus Fisik

Pada Tahun Anggaran 2021, Dana Alokasi Khusus Fisik dianggarkan senilai Rp127.585.685.000,00 dan terealisasi senilai Rp108.205.037.747,00 atau 84,81%. Dana Alokasi Khusus Fisik sebesar mengalami kenaikan senilai Rp19.801.539.337,00 jika dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2020 yaitu Rp88.403.498.410,00 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.9 Rincian Dana Alokasi Khusus Fisik

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Tahun 2021		%	Tahun 2020
		Anggaran	Realisasi		Realisasi
1	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD	14.466.348.000,00	13.769.201.000,00	95,18	
2	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP	1.526.688.000,00	1.421.494.400,00	93,11	
3	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-Perpustakaan Daerah	10.000.000.000,00	9.276.448.000,00	92,76	
4	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kesehatan Dasar	17.856.975.000,00	7.757.049.980,00	43,44	31.133.727.516,00
5	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kesehatan Rujukan	30.778.219.000,00	26.671.178.870,00	86,66	
6	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kefarmasian	2.553.554.000,00	2.251.166.005,00	88,16	
7	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Penguatan Intervensi <i>Stunting</i>	2.050.000.000,00	2.015.944.600,00	98,34	
8	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-KB	1.444.915.000,00	1.909.606.700,00	132,16	
9	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Penurunan <i>Stunting</i> (KB)	43.499.000,00	43.100.000,00	99,08	
10	DAK Fisik-Bidang Pertanian-Penugasan-Pembangunan/Renovasi Sarana dan Prasarana Fisik Dasar Pembangunan Pertanian	4.458.704.000,00	4.201.138.800,00	94,22	1.108.000.000,00
11	DAK Bidang Pendidikan				19.572.385.000,00
12	DAK Bidang Perumahan dan Pemukiman				3.520.843.000,00



No.	Uraian	Tahun 2021		%	Tahun 2020
		Anggaran	Realisasi		Realisasi
13	DAK Fisik-Bidang Kelautan dan Perikanan-Penugasan	973.120.000,00	961.531.000,00	98,81	1.067.649.183,00
14	DAK Fisik-Bidang Pariwisata-Penugasan	3.875.998.000,00	2.277.281.586,00	58,75	3.828.762.629,00
15	DAK Fisik-Bidang Jalan-Reguler-Jalan	14.084.345.000,00	14.084.097.750,00	100,00	21.596.354.000,00
16	DAK Fisik-Bidang Jalan-Penugasan-Jalan	9.365.627.000,00	9.365.185.600,00	100,00	
17	DAK Fisik-Bidang Air Minum-Penugasan	6.407.575.000,00	5.786.314.456,00	90,30	1.177.262.782,00
18	DAK Fisik-Bidang Sanitasi-Penugasan	2.641.118.000,00	2.641.118.000,00	100,00	4.117.621.000,00
19	DAK Fisik-Bidang Irigasi-Penugasan	2.300.000.000,00	1.908.281.000,00	82,97	1.280.893.300,00
20	DAK Fisik-Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan-Penugasan-Lingkungan Hidup	2.759.000.000,00	1.864.900.000,00	67,59	
Jumlah		127.585.685.000,00	108.205.037.747,00	84,81	88.403.498.410,00

d.2. Dana Alokasi Khusus Non Fisik

Dana Alokasi Khusus Non Fisik sebesar Rp86.411.924.430,00 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.10 Rincian Dana Alokasi Khusus Non Fisik

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Tahun 2021		%	Tahun 2020
		Anggaran	Realisasi		Realisasi
1	DAK Non Fisik-Tambahan Penghasilan Guru PNSD	70.182.483.000,00	70.182.483.000,00	100,00	1.477.904.000,00
2	Tunjangan Profesi Guru				62.253.317.000,00
3	DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD	804.000.000,00	804.000.000,00	100,00	
4	DAK Non Fisik-TKG PNSD	6.335.562.000,00	6.061.497.000,00	95,67	7.350.526.000,00
5	DAK Non Fisik-BOP PAUD	3.178.200.000,00	3.023.700.000,00	95,14	3.161.400.000,00
6	Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan	1.337.600.000,00	1.158.400.000,00	86,60	902.350.000,00
7	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	18.662.113.000,00	0,00	0,00	27.976.390.713,00
8	DAK Non Fisik-BOKKB-Pengawasan Obat dan Makanan	469.110.000,00	0,00	0,00	0,00
9	DAK Non Fisik-BOKKB-Akreditasi Puskesmas	1.532.750.000,00	0,00	0,00	0,00
10	DAK Non Fisik-BOKKB-Jaminan Persalinan	1.969.805.000,00	0,00	0,00	0,00
11	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	5.015.788.000,00	1.944.349.549,00	38,76	4.312.869.173,00
12	DAK Non Fisik- Peningkatan Kapasitas Koperasi dan UKM (PK2UKM)	390.304.000,00	383.025.000,00	98,14	417.358.000,00
13	DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan	1.206.040.000,00	1.029.282.381,00	85,34	1.138.383.755,00
14	DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Kepariwisata	862.578.000,00	861.437.500,00	99,87	340.849.598,00
15	DAK Non Fisik-Dana Bantuan BLPS	963.750.000,00	963.750.000,00	100,00	
Jumlah		112.910.083.000,00	86.411.924.430,00	76,53	109.331.348.239,00

2) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Dana Lainnya	2021	2020
	<u>Rp124.774.034.000,00</u>	<u>Rp232.797.738.264,00</u>

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Dana Lainnya berupa Dana Penyesuaian dan Dana Lembang. Pada Tahun Anggaran 2021 terealisasi sebesar Rp124.774.034.000,00 dengan rincian sebagai berikut



Tabel 5.11 Rincian Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Dana Lainnya

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Tahun 2021		%	Tahun 2020
		Anggaran	Realisasi		Realisasi
	Dana Penyesuaian				
1	Dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD				1.477.904.000,00
2	Tunjangan Profesi Guru				62.253.317.000,00
3	Bantuan Operasional Penyelenggaraan PAUD				3.161.400.000,00
4	Bantuan Operasional Kesehatan				27.976.390.713,00
5	Akreditasi Puskesmas				0,00
6	Jaminan Persalinan				0,00
7	Bantuan Operasional KB				4.312.869.173,00
8	Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan				1.138.383.755,00
9	Tunjangan Khusus Guru				7.350.526.000,00
10	Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan				902.350.000,00
11	Dana Pelayanan Kepariwisata				340.849.598,00
12	Pengawasan Obat dan Makanan				0,00
13	Dana Peningkatan Kapasitas Koperasi dan UKM				417.358.000,00
	Jumlah Dana Penyesuaian	0,00	0,00		109.331.348.239,00
	Dana Lembang				
1	Dana Lembang	124.774.034.000,00	124.774.034.000,00	100	123.466.390.025,00
	Jumlah	124.774.034.000,00	124.774.034.000,00	100	232.797.738.264,00

3) Pendapatan Transfer Antar Daerah	<u>2021</u>	<u>2020</u>
	Rp50.843.115.593,00	Rp77.501.981.654,56

Pendapatan Transfer antar daerah terdiri dari Pendapatan Bagi Hasil Pajak dan Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi sebagai berikut.

a) Pendapatan Bagi Hasil Pajak	<u>2021</u>	<u>2020</u>
	Rp46.624.743.593,00	Rp38.535.511.254,56

Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi diperoleh dari Pemerintah Sulawesi Selatan. Pada Tahun Anggaran 2021 jumlah dana bagi hasil pajak yang diterima oleh Pemerintah Kabupaten Tana Toraja sejumlah Rp46.624.743.593,00 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.12 Rincian Pendapatan Lainnya

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Tahun 2021		%	Tahun 2020
		Anggaran	Realisasi		Realisasi
1	Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	48.800.000.000,00	9.320.163.153,00	19,10	7.714.036.348,00
2	Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor		6.410.042.447,00		4.917.665.669,00
3	Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor		11.803.287.990,00		10.170.270.147,00
4	Bagi Hasil Pajak Air Permukaan		402.838.698,00		183.968.391,00
5	Bagi Hasil Pajak Rokok		18.688.411.305,00		15.280.206.153,56
6	Bagi Hasil Bea Cukai dari Hasil Tembakau				178.658.130,00
7	Bagi Hasil Getah Pinus				90.706.416,00
	Jumlah	48.800.000.000,00	46.624.743.593,00	95,54	38.535.511.254,56

b) Bantuan Keuangan	<u>2021</u>	<u>2020</u>
	Rp4.218.372.000,00	Rp38.966.470.400,00



Dana Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, dalam periode Tahun Anggaran 2021 terealisasi sejumlah Rp4.218.372.000,00 atau sebesar 13,63% dari yang dianggarkan sebesar Rp30.950.000.000,00. Dana Bantuan Keuangan adalah Dana Kesehatan Gratis, Pencegahan Stunting dan Gizi Buruk di Kabupaten Tana Toraja.

C. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	2021	2020
	Rp84.645.241.260,00	Rp62.988.294.638,00

Pemerintah Kabupaten Tana Toraja menganggarkan Lain-lain Pendapatan yang Sah tahun 2021 sebesar Rp81.200.000.000,00 dan direalisasikan sebesar Rp84.645.241.260,00 atau sebesar 104,24%. Realisasi tersebut mengalami kenaikan senilai Rp21.656.946.622,00 atau 34,38% jika dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya yaitu Rp62.988.294.638,00. Rincian Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah akan dijabarkan dalam tabel berikut.

Tabel 5.13 Rincian Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Tahun 2021		%	Tahun 2020
		Anggaran	Realisasi		Realisasi
1	Pendapatan Hibah	40.000.000.000,00	28.101.016.487,00	70,25	62.988.294.638,00
2	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	41.200.000.000,00	56.544.224.773,00	137,24	0,00
Jumlah		81.200.000.000,00	84.645.241.260,00	104,24	62.988.294.638,00

1) Pendapatan Hibah	2021	2020
	Rp28.101.016.487,00	Rp62.988.294.638,00

Pemerintah Kabupaten Tana Toraja pada Tahun Anggaran 2021 menganggarkan dan merealisasikan pendapatan hibah masing-masing senilai Rp40.000.000.000,00 dan Rp28.101.016.487,00 atau 70,25% dari anggarannya. Pendapatan Hibah tersebut merupakan pendapatan Hibah Jalan Daerah (PHJD) Tahun 2021 dari Pemerintah Pusat. Realisasi pendapatan hibah mengalami penurunan senilai Rp34.887.278.151,00 atau 55,39% jika dibandingkan dengan pendapatan hibah tahun sebelumnya yaitu Rp62.988.294.638,00.

2) Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	2021	2020
	Rp56.544.224.773,00	Rp0,00

Pemerintah Kabupaten Tana Toraja pada Tahun Anggaran 2021 menganggarkan dan merealisasikan Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Perundang-Undangan masing-masing senilai Rp41.200.000.000,00 dan Rp56.544.224.773,00 atau 137,24% dari anggarannya. Pendapatan tersebut terdiri atas Pendapatan Hibah Dana BOS, Pendapatan atas Pengembalian Hibah, dan Pendapatan Dana Kapitasi JKN. Rincian Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan akan dijabarkan melalui tabel berikut.



Tabel 5.14 Rincian Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Tahun 2021		%	Tahun 2020
		Anggaran	Realisasi		Realisasi
1	Pendapatan Hibah Dana BOS	41.200.000.000,00	40.882.473.000,00	99,23	0,00
2	Pendapatan atas Pengembalian Hibah		3.154.869.078,00		0,00
3	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP		12.506.882.695,00		
Jumlah		41.200.000.000,00	56.544.224.773,00	137,24	0,00

Terdapat kesalahan penganggaran pada Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP yang dianggarkan pada akun Lain-lain PAD yang Sah. Hal ini menyebabkan nilai anggaran pada akun tersebut nol. Selain itu, saldo nol pada realisasi Pendapatan Hibah Dana BOS pada Tahun Anggaran 2020 dikarenakan pendapatan tersebut dicatat sebagai Pendapatan Hibah pada Tahun Anggaran 2020.

	2021	2020
2. BELANJA	Rp1.049.701.515.679,57	Rp1.112.242.904.839,58

Pada Tahun Anggaran 2021 anggaran belanja dialokasikan sebesar Rp1.204.509.633.921,00 dan terealisasi sebesar Rp1.049.701.515.679,57 atau mencapai 87,15% dari anggaran. Realisasi belanja daerah sebesar Rp1.204.509.633.921,00 dialokasikan untuk:

Tabel 5.15 Rincian Belanja

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Tahun 2021		%	Tahun 2020
		Anggaran	Realisasi		Realisasi
1	Belanja Operasi	811.913.230.273,00	708.956.213.333,57	87,32	677.308.206.918,05
2	Belanja Modal	206.915.659.578,00	155.404.494.851,00	75,11	191.525.186.723,53
3	Belanja Tak Terduga	3.606.710.070,00	3.557.364.000,00	98,63	56.515.100.000,00
4	Belanja Transfer	182.074.034.000,00	181.783.443.495,00	99,84	186.894.411.198,00
Jumlah		1.204.509.633.921,00	1.049.701.515.679,57	87,15	1.112.242.904.839,58

	2021	2020
1. Belanja Operasi	Rp708.956.213.333,57	Rp677.308.206.918,05

Pada Tahun Anggaran 2021 anggaran belanja operasi dialokasikan sebesar Rp811.913.230.273,00 dan terealisasi sebesar Rp708.956.213.333,57 atau mencapai 87,32% dari anggaran. Realisasi belanja operasi sebesar Rp708.956.213.333,57 dialokasikan sebagai berikut.

Tabel 5.16 Rincian Belanja Operasi

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Tahun 2021		%	Tahun 2020
		Anggaran	Realisasi		Realisasi
1	Belanja Pegawai	472.926.792.060,00	440.418.572.040,00	93,13	441.762.507.116,00
2	Belanja Barang dan Jasa	308.286.559.749,00	248.283.221.027,57	80,54	170.993.682.474,05
3	Belanja Subsidi	1.715.603.200,00	1.373.697.200,00	80,07	1.500.000.000,00
4	Belanja Hibah	27.573.883.264,00	18.061.428.266,00	65,50	63.034.017.328,00
5	Belanja Bantuan Sosial	1.410.392.000,00	819.294.800,00	58,09	18.000.000,00
Jumlah		811.913.230.273,00	708.956.213.333,57	87,32	677.308.206.918,05

	2021	2020
a) Belanja Pegawai	Rp.440.418.572.040,00	Rp441.762.507.116,00



Belanja Pegawai/Personalia merupakan belanja yang dibayarkan oleh Pemerintah Kabupaten Tana Toraja untuk pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tana Toraja pada Tahun Anggaran 2021 yang seluruhnya berjumlah Rp440.418.572.040,00 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.17 Rincian Belanja Pegawai

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Tahun 2021		%	Tahun 2020
		Anggaran	Realisasi		Realisasi
1	Gaji dan Tunjangan	314.625.843.752,00	295.932.629.845,00	94,06	298.512.453.374,00
2	Tambahan Penghasilan PNS	108.766.556.083,00	103.934.821.997,00	95,56	85.807.221.999,00
3	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	1.693.293.000,00	487.606.600,00	28,80	0,00
4	Insentif Pemungutan Pajak Daerah				327.626.928,00
5	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah				397.597.429,00
6	Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	13.018.600.000,00	12.132.410.158,00	93,19	
7	Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	813.034.225,00	166.000.470,00	20,42	
8	Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	706.800.000,00	701.440.000,00	99,24	2.828.000.000,00
9	Honorarium PNS				9.999.717.400,00
10	Honorarium Non PNS				361.990.000,00
11	Uang Lembur				191.942.000,00
12	Belanja Pegawai BLUD	33.302.665.000,00	27.063.662.970,00	81,27	32.616.486.483,00
13	Belanja Pegawai Dana BOS	0,00	0,00		6.225.952.711,00
14	Belanja Pegawai untuk BOK	0,00	0,00		4.279.681.792,00
15	Belanja Pegawai untuk JKN	0,00	0,00		213.837.000,00
Jumlah Belanja Pegawai		472.926.792.060,00	440.418.572.040,00	93,13	441.762.507.116,00

b) Belanja Barang dan Jasa	2021	2020
	<u>Rp248.283.221.027,57</u>	<u>Rp170.993.682.474,05</u>

Belanja Barang dan Jasa merupakan belanja yang dibayarkan oleh Pemerintah Kabupaten Tana Toraja untuk kegiatan operasional Pemerintah Kabupaten Tana Toraja pada Tahun Anggaran 2021 yang seluruhnya berjumlah Rp248.283.221.027,57 dengan perincian sebagai berikut:

Tabel 5.18 Rincian Belanja Barang dan Jasa

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Tahun 2021		%	Tahun 2020
		Anggaran	Realisasi		Realisasi
1	Belanja Barang	42.585.148.369,00	32.792.096.999,00	77,00	21.986.486.517,00
2	Belanja Jasa	129.019.720.297,00	101.538.982.825,00	78,70	67.461.395.576,00
3	Belanja Pemeliharaan	14.661.715.247,00	7.341.282.733,00	50,07	5.084.510.484,00
4	Belanja Perjalanan Dinas	48.543.747.692,00	33.376.588.445,00	68,76	16.786.346.742,00
5	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	10.224.793.138,00	7.104.133.330,00	69,48	
6	Belanja Barang dan Jasa BOS	43.044.400.006,00	44.020.257.690,00	102,27	25.038.694.690,00
7	Belanja Barang dan Jasa BLUD	20.207.035.000,00	22.109.879.005,57	109,42	21.999.222.196,05
8	Belanja Barang dan Jasa BOK				9.256.422.650,00
9	Belanja Barang dan Jasa JKN				3.380.603.619,00
Jumlah		308.286.559.749,00	248.283.221.027,57	80,54	170.993.682.474,05

c) Belanja Subsidi	2021	2020
	<u>Rp1.373.697.200,00</u>	<u>Rp1.500.000.000,00</u>



Belanja Subsidi pada Tahun Anggaran 2021 dianggarkan sebesar Rp1.715.603.200,00 dan terealisasi sebesar Rp1.373.697.200,00 atau mencapai 80,07% terdapat penurunan sebesar Rp126.302.800,00 atau 9,19% dari realisasi tahun sebelumnya yaitu Rp1.500.000.000,00.

Pemberian Subsidi kepada PT. Wings Abadi yang bertujuan untuk membantu biaya operasional penerbangan sehingga tersedia layanan angkutan udara yang berkualitas dan mudah bagi masyarakat sesuai dengan SK Bupati Tana Toraja Nomor 87/III/ Tahun 2021 tanggal 31 Maret 2021 tentang Pemberian Subsidi kepada PT. Wings Abadi.

d) Belanja Hibah	2021	2020
	Rp18.061.428.266,00	Rp63.034.017.328,00

Belanja Hibah adalah pemberian uang/barang atau jasa dari Pemerintah Kabupaten Tana Toraja kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya. Pada Tahun Anggaran 2021 belanja hibah dianggarkan sebesar Rp27.573.883.264,00 dan terealisasi sebesar Rp18.061.428.266,00 atau mencapai 65,50% dari anggaran. Rincian realisasi belanja hibah Tahun Anggaran 2021 adalah sebagai berikut.

Tabel 5.19 Rincian Belanja Hibah

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Tahun 2021		%	Tahun 2020
		Anggaran	Realisasi		Realisasi
1	Belanja Hibah kepada Kelompok Masyarakat				13.502.221.328,00
2	Belanja Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan				675.000.000,00
3	Belanja Hibah kepada Badan/Lembaga/Organisasi				48.856.796.000,00
4	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	26.911.330.816,00	17.426.896.202,00	64,76	
5	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	662.552.448,00	634.532.064,00	95,77	
	Jumlah	27.573.883.264,00	18.061.428.266,00	65,50	63.034.017.328,00

e) Belanja Bantuan Sosial	2021	2020
	Rp819.294.800,00	Rp18.000.000,00

Belanja Bantuan Sosial merupakan belanja bantuan keuangan yang dibayarkan oleh Pemerintah Kabupaten Tana Toraja kepada pihak lain. Pada Tahun Anggaran 2021 belanja bantuan sosial dianggarkan sebesar Rp1.410.392.000,00 dan terealisasi sebesar Rp819.294.800,00 atau mencapai 58,09%. Belanja Bantuan Sosial meningkat sebesar Rp801.294.800,00 atau 97,80% dari realisasi Tahun Anggaran 2020 yaitu senilai Rp18.000.000,00. Bantuan Sosial diberikan kepada masyarakat yang terpapar COVID-19, anak yang dalam kasus hukum/pendampingan kepada anak di bawah umur, bingkisan kepada orang yang mengalami gangguan jiwa dan bantuan kepada masyarakat yang terkena bencana alam.

2. Belanja Modal	2021	2020
	Rp155.404.494.851,00	Rp191.525.186.723,53

Pada Tahun Anggaran 2021 Anggaran Belanja Modal dialokasikan sebesar Rp206.915.659.578,00 dan terealisasi sebesar Rp155.404.494.851,00 atau mencapai 75,11% dari anggaran. Realisasi belanja modal sebesar Rp155.404.494.851,00 dialokasikan sebagai berikut.



Tabel 5.20 Rincian Belanja Modal

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Tahun 2021		%	Tahun 2020
		Anggaran	Realisasi		Realisasi
1	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	48.910.596.148,00	40.268.649.540,00	82,33	37.569.459.855,60
2	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	46.239.518.830,00	30.161.338.486,00	65,23	31.170.135.375,00
3	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	111.181.080.600,00	84.400.315.825,00	75,91	119.144.404.176,93
4	Belanja Aset Tetap Lainnya	584.464.000,00	574.191.000,00	98,24	3.641.187.316,00
Jumlah Belanja Modal		206.915.659.578,00	155.404.494.851,00	75,11	191.525.186.723,53

a) Belanja Modal Tanah	<u>2021</u>	<u>2020</u>
	Rp0,00	Rp0,00

Belanja Modal Tanah Tahun Anggaran 2021 tidak dianggarkan.

b) Belanja Modal Peralatan dan Mesin	<u>2021</u>	<u>2020</u>
	Rp40.268.649.540,00	Rp37.569.459.855,60

Belanja Modal Peralatan dan Mesin merupakan belanja yang menambah aset tetap peralatan dan mesin Pemerintah Kabupaten Tana Toraja pada Tahun Anggaran 2021 sejumlah Rp40.268.649.540,00 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.21 Rincian Belanja Modal Peralatan dan Mesin

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Tahun 2021		%	Tahun 2020
		Anggaran	Realisasi		Realisasi
1	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Besar Darat	125.000.000,00	99.771.600,00	79,82	29.815.000,00
2	Belanja Modal Alat Bantu	3.730.718.000,00	3.709.793.500,00	99,44	0,00
3	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor	4.956.500.000,00	2.667.937.000,00	53,83	3.511.073.999,00
4	Belanja Modal Pengadaan Alat Ukur	117.850.000,00	114.050.000,00	96,78	0,00
5	Belanja Modal Pengadaan Alat Pengolahan	33.600.000,00	33.600.000,00	100,00	0,00
6	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Kantor	1.100.843.630,00	640.216.277,00	58,16	188.115.000,00
7	Belanja Modal Pengadaan Alat Rumah Tangga	1.136.346.764,00	903.376.567,00	79,50	269.976.400,00
8	Belanja Modal Pengadaan Komputer	1.357.493.434,00	1.019.089.100,00	75,07	868.489.300,00
9	Belanja Modal Pengadaan Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	193.000.000,00	76.500.000,00	39,64	383.943.500,00
10	Belanja Modal Pengadaan Alat Studio	370.500.000,00	358.976.000,00	96,89	233.160.000,00
11	Belanja Modal Pengadaan Alat Komunikasi	75.400.000,00	23.105.000,00	30,64	63.800.000,00
12	Belanja Modal Pengadaan Alat Kedokteran	30.813.145.000,00	26.639.998.870,00	86,46	8.452.554.793,60
13	Belanja Modal Pengadaan Alat Kesehatan	3.566.925.837,00	3.386.850.326,00	94,95	4.943.427.286,00
14	Belanja modal Pengadaan Unit-unit Laboratorium	10.000.000,00	9.900.000,00	99,00	0,00
15	Belanja Modal Alat Kesehatan Kerja	15.200.000,00	10.900.000,00	71,71	0,00
16	Belanja Modal Peralatan Umum	56.730.000,00	40.000.000,00	70,51	0,00
17	Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya	291.043.483,00	79.550.400,00	27,33	0,00
18	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	960.300.000,00	455.034.900,00	47,38	0,00
19	Belanja Modal DAK Pendidikan	0,00	0,00		1.458.000.000,00
20	Belanja Modal Dana BOS	0,00	0,00		16.136.768.125,00
21	Belanja Modal JKN	0,00	0,00		1.030.336.452,00
Jumlah		48.910.596.148,00	40.268.649.540,00	82,33	37.569.459.855,60



c) Belanja Modal Gedung dan Bangunan	2021	2020
	Rp30.161.338.486,00	Rp31.170.135.375,00

Belanja Modal Gedung dan Bangunan merupakan belanja yang menambah aset tetap Pemerintah Kabupaten Tana Toraja berupa konstruksi gedung dan bangunan pada Tahun Anggaran 2021 dianggarkan sebesar Rp46.239.518.830,00 dan terealisasi sebesar Rp30.161.338.486,00 atau mencapai 65,23%. Realisasi tersebut mengalami penurunan senilai Rp1.008.796.889,00 atau 3,34% dari total realisasi tahun sebelumnya senilai Rp 31.170.135.375,00.

d) Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	2021	2020
	Rp84.400.315.825,00	Rp119.144.404.176,93

Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan merupakan belanja yang menambah aset tetap Pemerintah Kabupaten Tana Toraja berupa konstruksi jalan, irigasi dan jaringan pada Tahun Anggaran 2021 sejumlah Rp84.400.315.825,00 dengan rincian sebagai berikut

Tabel 5.22 Rincian Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Tahun 2021		%	Tahun 2020
		Anggaran	Realisasi		Realisasi
1	Belanja Modal Pengadaan Jalan	99.238.195.284,00	74.545.143.019,00	75,12	105.764.518.945,93
2	Belanja Modal Jembatan	2.596.000.000,00	1.621.228.400,00	62,45	0,00
3	Belanja Modal Pengadaan Bangunan Air Irigasi	2.850.000.000,00	2.368.160.950,00	83,09	2.459.365.117,00
4	Belanja Modal Instalasi Air Bersih/Air Baku	10.000.000,00	10.000.000,00	100,00	0,00
5	Belanja Modal Jaringan Air Minum Lainnya	6.486.885.316,00	5.855.783.456,00	90,27	0,00
6	Belanja Modal Pengadaan Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah	0,00	0,00		841.260.000,00
7	Belanja Modal Pengadaan Instalasi Pengolahan Sampah Non Organik	0,00	0,00		10.039.510.114,00
8	Belanja Modal Pengadaan Jaringan Listrik	0,00	0,00		39.750.000,00
	Jumlah	111.181.080.600,00	84.400.315.825,00	75,91	119.144.404.176,93

e) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	2021	2020
	Rp574.191.000,00	Rp3.641.187.316,00

Belanja Modal Aset Tetap Lainnya merupakan belanja yang menambah aktiva tetap Pemerintah Kabupaten Tana Toraja dalam periode Tahun Anggaran 2021 sejumlah Rp574.191.000,00 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.23 Rincian Belanja Modal Aset Tetap Lainnya

(dalam rupiah)

No.	Uraian	2021		%	Tahun 2020
		Anggaran	Realisasi		Realisasi
1	Belanja Modal Pengadaan Buku				49.995.314,00
2	Belanja Modal untuk BLUD RSUD Lakipadada				3.591.192.002,00
3	Belanja Modal Aset Tetap Dalam Renovasi	569.464.000,00	559.191.000,00	98,20	
4	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	15.000.000,00	15.000.000,00	100,00	
	Jumlah	584.464.000,00	574.191.000,00	98,24	3.641.187.316,00



3. Belanja Tidak Terduga	2021	2020
	Rp3.557.364.000,00	Rp56.515.100.000,00

Belanja Tidak Terduga merupakan belanja yang dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Tana Toraja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan berulang. Dalam periode Tahun Anggaran 2021 dianggarkan sebesar Rp3.606.710.070,00 dan terealisasi sebesar Rp3.557.364.000,00 atau 98,63%. Realisasi ini mengalami penurunan senilai Rp52.957.736.000,00 atau 1.488,68% dari realisasi tahun sebelumnya yaitu Rp56.515.100.000,00.

4. Belanja Transfer	2021	2020
	Rp181.783.443.495,00	Rp186.894.411.198,00

Belanja Transfer Pemerintah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2021 terealisasi sebesar Rp181.783.443.495,00 atau sebesar 99,84%. Pada Tahun 2021, Belanja Bantuan Keuangan kepada Partai Politik tidak lagi di Belanja Transfer tetapi pada Belanja Operasi (Belanja Hibah). Belanja transfer tahun 2021 dijelaskan sebagai berikut.

Tabel 5.24 Rincian Belanja Transfer

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Tahun 2021		%	Tahun 2020
		Anggaran	Realisasi		Realisasi
1	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa	200.000.000,00	129.631.427,00	64,82	157.085.650,00
2	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	200.000.000,00	114.967.000,00	57,48	175.291.500,00
3	Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	56.900.000.000,00	56.764.811.068,00	99,76	61.825.474.200,00
4	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	124.774.034.000,00	124.774.034.000,00	100,00	124.074.007.400,00
5	Transfer Bantuan Keuangan Lainnya (Partai Politik)				662.552.448,00
Jumlah		182.074.034.000,00	181.783.443.495,00	99,84	186.894.411.198,00

3. PEMBIAYAAN	2021	2020
	Rp55.443.674.105,40	Rp36.456.486.410,23

Pembiayaan bersih Pemerintah Kabupaten Tana Toraja pada Tahun Anggaran 2021 dianggarkan sebesar Rp3.988.404.964,00 dan terealisasi sebesar Rp55.443.674.105,40 atau mencapai 1.390,12% dari anggaran. Realisasi pembiayaan daerah tersebut dialokasikan sebagai berikut.

Tabel 5.25 Rincian Pembiayaan

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Tahun 2021		%	Tahun 2020
		Anggaran	Realisasi		Realisasi
1	Penerimaan Pembiayaan	3.988.404.964,00	55.443.674.105,40	1.390,12	36.456.486.410,23
2	Pengeluaran Pembiayaan	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah Pembiayaan Neto		3.988.404.964,00	55.443.674.105,40	1.406,46	36.456.486.410,23

1. Penerimaan Pembiayaan	2021	2020
	Rp55.443.674.105,40	Rp36.456.486.410,23

Penggunaan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) tahun 2021 dianggarkan sebesar Rp3.988.404.964,00 dan terealisasi sebesar Rp55.443.674.105,40 atau mencapai 1.390,12%.



Tabel 5.26 Rincian Penerimaan Pembiayaan

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Tahun 2021		Tahun 2020
		Anggaran	Realisasi	Realisasi
1	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer	0,00	43.989.392.372,00	0,00
2	Pelampauan Penerimaan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	0,00	25.133.610,91	0,00
3	Penghematan Belanja	0,00	32.566.200,00	0,00
4	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya.	0,00	11.396.581.922,49	36.456.486.410,23
Jumlah		0,00	55.443.674.105,40	36.456.486.410,23

2. Pengeluaran Pembiayaan	<u>2021</u>	<u>2020</u>
	Rp0,00	Rp0,00

Pengeluaran Pembiayaan tahun 2021 tidak dianggarkan sehingga tidak ada realisasi pengeluaran pembiayaan.

3. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SiLPA)	<u>2021</u>	<u>2020</u>
	Rp108.118.924.878,79	Rp56.898.445.105,40

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SiLPA) Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp108.118.924.878,79 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.27 Rincian Komponen SiLPA

(dalam rupiah)

No.	Komponen SiLPA	Nilai
1	Kas di Kas Daerah	97.195.558.165,46
2	Kas di Bendahara Penerimaan	682.628.000,00
3	Kas di Bendahara Pengeluaran	386.638.419,00
4	Kas di BLUD	8.727.948.306,33
5	Kas di Bendahara JKN	513.453.688,00
6	Kas di Bendahara Dana BOS	612.698.300,00
Total SiLPA		108.118.924.878,79

5.2 Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih

Laporan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL) menyajikan informasi kenaikan atau penurunan Saldo Anggaran Lebih Tahun Anggaran 2021 yang dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

1. Saldo Anggaran Lebih Awal

Nilai saldo anggaran lebih awal pada tanggal 1 Januari 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp56.898.445.105,40 dan 36.456.486.410,23.

2. Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan

Jumlah penggunaan SAL untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp55.443.674.105,40.

3. Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA)

SiLPA/SiKPA adalah selisih lebih/kurang antara realisasi pendapatan LRA dan belanja, serta penerimaan dan pengeluaran pembiayaan dalam APBD selama satu periode pelaporan. Jumlah Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA) untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp108.118.924.878,79.

4. Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya

Koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya merupakan koreksi atas kelebihan pencatatan Kas di Bendahara Pengeluaran pada Tahun Anggaran 2020 yang telah disetorkan ke Kas Daerah senilai Rp803.114.000,00. Selanjutnya terdapat pula koreksi atas kelebihan catat kas di Bendahara Penerimaan tahun sebelumnya dikarenakan uang yang masih ada di kolektor senilai Rp651.657.000,00.



5. Saldo Anggaran Lebih Akhir

Jumlah Saldo Anggaran Lebih Akhir adalah gunggung saldo yang berasal dari akumulasi SiLPA/SiKPA tahun-tahun anggaran sebelumnya dan tahun anggaran berjalan serta penyesuaian lain yang diperkenankan. Untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 Saldo Anggaran Lebih adalah sebesar Rp108.770.581.878,79.

5.3 Penjelasan atas Pos-Pos Neraca

Pemerintah Kabupaten Tana Toraja pada Tahun Anggaran 2021 menyajikan aset sebesar Rp3.496.810.439.958,00, kewajiban sebesar Rp120.281.237.555,07 dan ekuitas sebesar Rp3.376.529.201.902,93. Komposisi Aset, Kewajiban dan Ekuitas Dana Tahun Anggaran 2021 dan 2020 dapat disajikan pada tabel sebagai berikut:

Tabel 5.28 Komposisi Aset, Kewajiban dan Ekuitas

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Tahun 2021	Tahun 2020	Kenaikan (Penurunan)	%
1	Aset	3.496.810.439.458,00	3.400.594.423.001,90	96.208.231.456,10	2,83
	Jumlah Aset	3.496.810.439.458,00	3.400.594.423.001,90	96.208.231.456,10	2,83
2	Kewajiban	120.281.237.555,07	71.539.681.230,00	48.741.556.325,07	68,13
3	Ekuitas	3.376.529.201.902,93	3.329.054.741.771,90	47.474.460.131,03	1,43
	Jumlah Kewajiban dan Ekuitas	3.496.810.439.458,00	3.400.594.423.001,90	96.208.231.456,10	2,83

1. Aset	2021	2020
	Rp3.496.810.439.458,00	Rp3.400.594.423.001,90

Jumlah Aset Pemerintah Kabupaten Tana Toraja per 31 Desember 2021 dan 2020 adalah sebesar Rp3.496.810.439.458,00 dan Rp3.400.594.423.001,90 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.29 Rincian Aset

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Tahun 2021	Tahun 2020
1	Aset Lancar	167.793.295.432,98	109.657.159.293,70
2	Investasi Jangka Panjang	37.302.310.129,00	41.241.192.808,00
3	Aset Tetap	3.260.833.904.341,70	3.219.817.777.168,87
4	Aset Lainnya	30.880.929.554,33	29.878.293.731,33
	Jumlah Aset	3.496.810.439.458,00	3.400.594.423.001,90

a. Aset Lancar	2021	2020
	Rp167.793.295.432,98	Rp109.657.159.293,70

Jumlah Aset Lancar Pemerintah Kabupaten Tana Toraja per 31 Desember 2021 dan 2020 adalah sebesar Rp167.793.295.432,98 dan Rp109.657.159.293,70 yang akan dijabarkan pada tabel berikut.

Tabel 5.30 Rincian Aset Lancar

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Tahun 2021	Tahun 2020
1	Kas	108.299.547.190,79	57.137.568.443,40
2	Piutang Pajak Daerah	2.014.708.079,00	1.161.571.633,31
3	Piutang Retribusi Daerah	1.213.467.990,00	37.400.380,00
4	Piutang Lain-lain PAD yang Sah	29.491.923.837,17	12.431.149.511,17
5	Beban dibayar di muka	0,00	3.020.713.250,00
6	Piutang Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah	8.824.034.429,00	0,00
7	Persediaan	34.230.329.040,34	35.868.756.075,82
8	Penyisihan Piutang	(16.280.715.133,33)	(1.010.509.398,69)
	Jumlah Aset Lancar	167.793.295.432,98	109.657.159.293,70

Sementara itu, Pemerintah Kabupaten Tana Toraja menyajikan saldo kas per 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing senilai Rp108.299.547.190,79 dan Rp57.137.568.443,40. Berikut rincian saldo kas per 31 Desember 2021 dan 2020.



Tabel 5.31 Rincian Kas

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Tahun 2020	Tahun 2020
1	Kas di Kas Daerah	97.195.558.165,46	44.047.092.182,91
2	Kas di Bendahara Penerimaan	682.628.000,00	1.598.154.300,00
3	Kas di Bendahara Pengeluaran	386.638.419,00	1.145.616.777,00
4	Kas di BLUD	8.727.948.306,33	5.193.352.812,49
5	Kas di Bendahara Kapitasi JKN	513.453.688,00	1.163.746.043,00
6	Kas di Bendahara Dana BOS	612.698.300,00	3.750.482.990,00
7	Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran	180.622.312,00	239.123.338,00
Jumlah Kas dan Setara Kas		108.299.547.190,79	57.137.568.443,40

1) Kas di Kas Daerah	2021	2020
	<u>Rp97.195.558.165,46</u>	<u>44.047.092.182,91</u>

Kas di Kas Daerah merupakan saldo kas Pemerintah Kabupaten Tana Toraja per 31 Desember 2021 dan 2020 sebesar Rp97.195.558.165,46 dan Rp44.047.092.182,91 yang berada di rekening Kas Daerah. Berikut disajikan rincian kas di kas daerah.

Tabel 5.32 Rincian Kas Daerah

(dalam rupiah)

No.	Nama Rekening	Nomor Rekening	Peruntukan Rekening	Tahun 2021	Tahun 2020
I	Bank Sulselbar Cabang Makale				
1)	Rekening Kas Umum Daerah Kab. Tana Toraja	0110-001-000004302-1	DAU, DAK, Dana Bagi Hasil	43.451.112.897,53	2.767.644.553,53
2)	Rekening Kas Daerah Tk. II Tana Toraja	0110-001-000001581-8	PAD	319.870.516,00	224.917.907,00
3)	Rekening Dana Transfer Pusat dan Provinsi	0110-001-0000015851-1	Transfer Pusat/ Bantuan Provinsi	53.273.818.954,39	40.996.829.911,39
4)	Rekening Urusan Kas dan Perhitungan (UKP)	110-001-000008023-7	Penampungan PFK	32.566.200,00	32.566.200,00
II	Bank BRI Cabang Makale				
1)	Kas Daerah Kabupaten Tana Toraja	0232-01-000038-30-3	Penerimaan PBB, Jasa Giro/ Deposito	10.370.690,00	10.353.859,00
III	Bank BNI Cabang Pembantu Makale				
1)	Pemda Kabupaten Tana Toraja	0258359410	Jasa Giro/ Bunga Deposito	14.712.694,00	14.664.262,00
IV	Bank Mandiri Cabang Pembantu Tana Toraja				
1)	Pemda Kabupaten Tana Toraja	152-00-1051861-7	Jasa Giro/ Bunga Deposito	115.489,99	115.489,99
V	Bank BRI Cabang Rantepao				
1)	Titipan SBI Nasabah	0232-01-000691-99-9	Kewajiban Segera	92.990.723,55	0,00
Jumlah Kas Daerah				97.195.558.165,46	44.047.092.182,91

Senilai Rp7.678.088.525,00 dari kas yang tersaji pada Rekening Dana Transfer Pusat dan Provinsi merupakan kas yang diterima setelah tanggal neraca atas pendapatan transfer bagi hasil pajak dari provinsi Tahun Anggaran 2021. Selain itu, senilai Rp92.990.723,55 yang tersaji pada rekening Bank BRI Cabang Rantepao merupakan sisa kas atas pembayaran Tunjangan Profesi Guru yang belum disalurkan.

2) Kas di Bendahara Penerimaan	2021	2020
	<u>Rp682.628.000,00</u>	<u>Rp1.598.154.300,00</u>

Kas di Bendahara Penerimaan merupakan pos untuk menampung saldo kas yang berasal dari sisa pungutan pendapatan daerah yang masih berada di Bendahara Penerimaan dan belum disetorkan ke Kas Daerah sampai dengan 31 Desember 2021 sebesar Rp682.628.000,00. Saldo kas di Bendahara Penerimaan terdiri dari Kas di Bendahara Penerimaan pada Badan Pendapatan Daerah. Atas saldo kas tersebut, telah disetorkan pada Tahun Anggaran 2022. Berikut rincian Kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2021.



Tabel 5.33 Rincian Kas di Bendahara Penerimaan

(dalam rupiah)

No.	Nama O P D	Tahun 2020	Tahun 2021	No STS	Penyetoran pada TA 2022
1	Dinas Pariwisata	104.200.000,00	0,00		
	- Obyek Wisata Burake	104.200.000,00	0,00		
2	Dinas Pertanian	1.250.000,00			
	- Retribusi Pemeriksaan Kesehatan Hewan	1.250.000,00	0,00		
3	Badan Pendapatan Daerah	1.492.704.300,00	0,00		
	a. Pajak Rumah Makan:	12.842.000,00			
	- UPTD Wilayah Makale	655.000,00	682.628.000,00	0016	5 Jan 2022
	- UPTD Wilayah Mengkendek	162.000,00	6.100.000,00		
	- UPTD Wilayah Saluputti	870.000,00	85.000,00	0007, 0073	4 Jan 2022, 17 Jan 2022
	- Rumah Makan Kuliner Malam	6.020.000,00	0,00	1280	20 April 2022
	- Kuliner Siang 2020	5.135.000,00	555.000,00	0007, 0016, 0945	4 Jan 2022, 5 Jan 2022, 5 April 2022
	b. Retribusi Pasar:	26.472.000,00	2.655.000,00		
	- UPTD Wilayah Makale	10.174.000,00	2.805.000,00	0014, 1284	5 Jan 2022, 20 April 2022
	- UPTD Wilayah Mengkendek	7.592.000,00	8.928.000,00	0036, 0133, 0262	13 Jan 2022, 20 Jan 2022, 7 Feb 2022
	- UPTD Wilayah Saluputti	7.852.000,00	1.414.000,00	6, 1212	4 Jan 2022, 18 April 2022
	- Pasar Buakayu	854.000,00	2.120.000,00		
	c. Retribusi Pasar Hewan:	0,00	5.394.000,00		
	- UPTD Wilayah Saluputti	0,00	0,00		
	d. Retribusi MCK:	444.000,00	100.000,00		
	- UPTD Wilayah Mengkendek	244.000,00	0,00		
	- Pasar Makale	0,00	100.000,00	0015	5 Jan 2022
	- Pasar Buakayu	200.000,00	0,00		
	e. Retribusi Rumah Potong Hewan:	905.150.000,00	545.625.000,00		
	- Kecamatan Makale	171.200.000,00	94.375.000,00	0008, 0024, 0037, 0072, 0122, 0220	4 jan 2022, 7 jan 2022, 13 jan 2022, 17 jan 2022, 19 jan 2022, 31 jan 2022
	- Kecamatan Makale Utara	57.575.000,00	775.000,00	0155	21 Jan 2022
	- Kecamatan Makale Selatan	102.550.000,00	100.000,00	0019	5 Jan 2022
	- Kecamatan Sangalla	0,00	64.900.000,00	0199, 0210, 0678	26 Jan 2022, 28 Jan 2022, 11 Maret 2022
	- Kecamatan Sangalla Utara	78.675.000,00	575.000,00	0220	31 Jan 2022
	- Kecamatan Sangalla Selatan	6.850.000,00	3.700.000,00	0027	10 Jan 2022
	- Kecamatan Mengkendek	65.275.000,00	15.300.000,00	0220	31 Jan 2022
	- Kecamatan Gandang Batu Sillanan	111.650.000,00	114.475.000,00	0024, 0037, 0122, 0179	7 Jan 2022, 13 Jan 2022, 19 Jan 2022, 24 Jan 2022
	- Kecamatan Rantetayo	31.700.000,00	14.000.000,00	0027	10 Jan 2022
	- Kecamatan Rembon	46.775.000,00	79.300.000,00	0008	4 Jan 2022
	- Kecamatan Saluputti	7.500.000,00	0,00		
	- Kecamatan Bittuang	10.350.000,00	0,00		
	- Kecamatan Kurra	33.675.000,00	19.775.000,00		
	- Kecamatan Bonggakaradeng	32.100.000,00	56.300.000,00	0019	5 Jan 2022
	- Kecamatan Malimbong Balepe	17.075.000,00	48.700.000,00	0179, 0248, 0401	24 Jan 2022, 3 Feb 2022, 15 Feb 2022
	- Kecamatan Rano	225.000,00	0,00	0072	17 Jan 2022
	- Kecamatan Masanda	53.750.000,00	3.150.000,00		
	- Kecamatan Simbuang	63.550.000,00	30.200.000,00	0131, 0248	20 Jan 2022, 3 Feb 2022
	- Kecamatan Mappak	14.675.000,00	0,00		
	f. Tempat Rekreasi	503.463.500,00	118.995.000,00		
	- Objek Wisata Pango-Pango	4.780.000,00	47.260.000,00	0004, 0069, 0134, 1450	4 Jan 202, 17 Jan 2022, 20 Jan 2022, 28 april 2022
	- Objek Wisata Burake	488.445.000,00	67.735.000,00	0004, 0077, 0722	4 Jan 202, 17 Jan 2022, 18 maret 2022



No.	Nama O P D	Tahun 2020	Tahun 2021	No STS	Penyetoran pada TA 2022
	- Objek Wisata Karuaya Bebo	84.000,00	0,00		
	- Objek Wisata Tilanga	4.002.500,00	0,00		
	- Objek Wisata Lemo	5.816.000,00	4.000.000,00	0069	17 Jan 2022
	- Objek Wisata Suaya	320.000,00	0,00		
	- Objek Wisata Kambira	16.000,00	0,00		
	g. Pajak Mineral	44.332.800,00	2.880.000,00		
	- Retribusi Pasir dan batu 1,8 M ³	1.058.400,00	2.880.000,00	0074	17 Jan 2022
	- Retribusi Batu Pecah 3.1 - 15 Cm 1,8M ³	300.000,00	0,00		
	- Retribusi batu Gunung 1,8 M ³	10.382.400,00	0,00		
	- Retribusi Pasir 1,8 M ³	6.822.000,00	0,00		
	- Retribusi Pasir 3 M ³	25.770.000,00	0,00		
	Jumlah	1.598.154.300,00	682.628.000,00		

Terdapat penurunan yang signifikan atas akun kas di bendahara penerima per 31 Desember 2021 yaitu senilai Rp915.526.300,00 atau 57,29%. Salah satu faktor yang menjadi penyebabnya yaitu reklasifikasi saldo kas di bendahara penerima menjadi saldo piutang senilai Rp657.661.000,00. Hal ini dikarenakan atas kas tersebut belum pernah diterima oleh bendahara penerimaan, melainkan masih di tangan kolektor. Secara lebih rinci, penjelasan saldo kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2021 dapat dilihat pada **Lampiran 2**.

3) Kas di Bendahara	2021	2020
Pengeluaran	Rp386.638.419,00	Rp1.145.616.777,00

Kas di Bendahara Pengeluaran pada Pemerintah Kabupaten Tana Toraja Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp386.638.419,00 dan Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp1.145.616.777,00 merupakan saldo uang persediaan yang harus dikembalikan ke Kas Daerah sebesar Rp386.638.419,00. Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran sebagai berikut.

Tabel 5.34 Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran

(dalam rupiah)

No	Nama O P D	Tahun 2021	Tahun 2020
1	Dinas Pendidikan	7.140.000,00	93.540.841,00
2	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	5.200.000,00	
3	Badan Penanggulangan Bencana		6.208.860,00
4	Dinas Kepemudaan dan Olah Raga	65.765.700,00	
5	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	37.736.699,00	
6	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan		2.660.200,00
7	Sekretariat Daerah	187.134.060,00	17.076,00
8	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	75.536.960,00	
9	Kecamatan Makale	0,00	26.106.000,00
10	Kecamatan Mengkendek	8.125.000,00	
11	Kecamatan Simbuang	0,00	909.500,00
12	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah		918.363.300,00
13	Badan Pendapatan Daerah		97.811.000,00
	Jumlah	386.638.419,00	1.145.616.777,00

Atas saldo kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2021 sebesar Rp386.638.419,00 telah disetor ke kas daerah pada tahun 2022 sebesar Rp386.443.059,00 dan sisa yang belum disetor sebesar Rp195.360,00 yang masih berada dalam rekening Bendahara Pengeluaran Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia. Rincian saldo kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2021 dapat dilihat pada **Lampiran 3**.



Tabel 5.35 Penyetoran Kas di Bendahara Pengeluaran

No.	Nama O P D	Tahun 2021	Nomor STS	Tanggal Penyetoran	Jumlah Penyetoran	Sisa yang belum Disetor
1	Dinas Pendidikan	7.140.000,00	0009, 0042	4-1-2022, 13-1-2022	7.140.000,00	0,00
2	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	5.200.000,00	0043	13-1-2022	5.200.000,00	0,00
3	Dinas Kepemudaan dan Olah Raga	65.765.700,00	0123, 0348	19-1-2022, 9-2-2022	65.765.700,00	0,00
4	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	37.736.699,00	0436	18-2-2022	37.736.699,00	0,00
5	Sekretariat Daerah	187.134.060,00	0206	28-1-2022	187.134.060,00	0,00
6	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	75.536.960,00	01, 02,03	25-4-2022, 26-4-2022	75.341.600,00	195.360,00
7	Kecamatan Mengkendek	8.125.000,00	0029	12-1-2022	8.125.000,00	0,00
Jumlah		386.638.419,00			386.443.059,00	195.360,00

Secara lebih rinci, penjelasan saldo kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2021 dapat dilihat pada **Lampiran 3**.

4) Kas di BLUD

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
	Rp8.727.948.306,33	Rp5.193.352.812,49

Kas di BLUD sebesar Rp8.790.212.592,33 merupakan sisa kas pada RSUD Lakipadada Tahun Anggaran 2021 yang terdiri dari:

Tabel 5.36 Rincian Kas di BLUD

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Nomor Rekening	Tahun 2021	Tahun 2020
1	Kas di Bendahara Penerimaan (BRI)		4.137.580,43	21.389.941,75
2	Kas di Bendahara Pengeluaran		14.499.544,45	23.561.350,70
3	Bendahara Penerimaan (BRI)	00000232-01-000729-30-2	8.184.678.327,85	1.503.498.628,84
4	Bendahara Pengeluaran (BRI)	023201000738306	342.950.308,00	27.919.344,00
5	Deposito (BRI)	0232-01-004542-40-2	0,00	3.500.000.000,00
6	Giro Tdk Hit BBB Pemerintah (BNI)	278429249	27.000.685,00	27.000.685,00
7	Assessment BNN (BRI)	23201000730303	13.247.322,20	13.232.364,20
8	Giro (BPD Sulsebar)	110-002-000019544-9	141.271.997,00	76.750.498,00
9	Gizi a.n. Maria Lita Rumpun	0232-01-077809-50-7	162.541,40	0,00
Jumlah			8.727.948.306,33	5.193.352.812,49

5) Kas di Bendahara Dana BOS

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
	Rp612.698.300,00	Rp3.750.482.990,00

Kas di Bendahara Dana BOS sebesar Rp612.698.300,00. Kas di Bendahara Dana BOS adalah pos untuk menampung sisa dana BOS pada masing-masing sekolah di Kabupaten Tana Toraja yang dapat dipergunakan kembali pada tahun anggaran berikutnya. Sampai dengan 31 Desember 2021 terdapat saldo kas di Bendahara BOS sebesar Rp612.698.300,00 yang terdiri dari sisa dana BOS pada SD dan SMP Negeri serta SD dan SMP Swasta di wilayah Kabupaten Tana Toraja, rincian sebagai berikut.

Tabel 5.37 Rincian Kas di Bendahara Dana BOS

(dalam rupiah)

No.	Dana BOS	Saldo Awal 2021	Penerimaan	Belanja	Saldo Akhir 2021
1	BOS Reguler SD Negeri	376.480.070,00	25.631.280.000,00	25.704.873.178,00	302.886.892,00
2	BOS Afiriasi SD Negeri	2.494.471.600,00	720.000.000,00	3.139.187.600,00	75.284.000,00
3	BOS Reguler SMP Negeri	304.703.800,00	14.171.193.000,00	14.299.447.392,00	176.449.408,00
4	BOS Afiriasi SMP Negeri	574.827.520,00	360.000.000,00	876.749.520,00	58.078.000,00
Jumlah		3.750.482.990,00	40.882.473.000,00	44.020.257.690,00	612.698.300,00

Rincian Kas di Bendahara Dana BOS dapat dilihat pada **Lampiran 5**.



6) Kas di Bendahara JKN	2021	2020
	Rp513.453.688,00	Rp1.163.746.043,00

Kas di Bendahara Kapitasi JKN adalah pos untuk menampung sisa dana kapitasi yang belum dibelanjakan oleh Bendahara Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) di Kabupaten Tana Toraja yang dapat dipergunakan kembali pada tahun anggaran berikutnya. Sampai dengan 31 Desember 2021 terdapat saldo kas di Bendahara FKTP sebesar Rp513.453.688,00. Rincian Kas di Bendahara Kapitasi JKN sebagai berikut.

Tabel 5.38 Rincian Kas di Bendahara Kapitasi JKN

(dalam rupiah)

No.	Nama FKTP	Tahun 2021	Tahun 2020
1	PKM Makale Utara	51.722.989,00	53.808.597,00
2	PKM Makale	29.450.490,00	21.538.783,00
3	PKM Sandabilik	100.959.472,00	250.447.876,00
4	PKM Tumbang Datu	232.108,00	32.023.102,00
5	PKM Kondoran	14.640.771,00	31.883.936,00
6	PKM Rantealang	47.224.097,00	21.522.715,00
7	PKM Ge'tengan	29.126.471,00	23.162.175,00
8	PKM Buntu Limbong	29.684.768,00	43.165.528,00
9	PKM Buntu	25.901.272,00	46.643.651,00
10	PKM Rantetayo	23.556.890,00	27.257.366,00
11	PKM Madandan	143.431,00	163.791,00
12	PKM Kurra	10.892.340,00	2.619.297,00
13	PKM Rembon	37.704.841,00	19.976.176,00
14	PKM Batusura	56.296.887,00	190.845.179,00
15	PKM Bittuang	123.312,00	31.288.275,00
16	PKM Ulusalu	27.394.429,00	52.877.392,00
17	PKM Ratte	113.510,00	87.914.099,00
18	PKM Rano	15.422.703,00	104.177.743,00
19	PKM Buakayu	4.948.519,00	3.966.067,00
20	PKM Lekke	295.941,00	28.653.663,00
21	PKM Kondodewata	209.203,00	89.810.632,00
22	PKM Tampo	7.509.244,00	
Jumlah		513.553.688,00	1.163.746.043,00

Kas di Bendahara Kapitasi JKN pada Neraca sebesar Rp513.453.688,00 dan pada rincian sebesar Rp513.553.688 sehingga terdapat selisih sebesar Rp100.000,00 diakibatkan karena pada PKM Tampo (PKM Baru) akan digunakan untuk administrasi pembukaan rekening. Rincian Kas di Bendahara JKN dapat dilihat pada **Lampiran 4**.

7) Kas Lainnya	2021	2020
	Rp180.622.312,00	Rp239.123.338,00

Kas lainnya yaitu Pajak Pusat yang masih belum disetorkan per 31 Desember 2021 sebesar Rp180.622.312,00 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.39 Rincian Saldo Pajak

(dalam rupiah)

No.	Nama FKTP	2021	2020
1	Dinas Pendidikan		17.587.177,00
2	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		23.878.011,00
3	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran		2.600.000,00
4	Badan Penanggulangan Bencana	90.000,00	130.850,00
5	Sekretariat Daerah	71.569.216,00	125.531.532,00
6	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	21.376.408,00	
7	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	87.586.688,00	53.906.103,00
8	Kecamatan Sangalla Utara		1.137.773,00
9	Kecamatan Kurra		12.268.419,00
10	Kecamatan Masanda		2.083.473,00
Jumlah		180.622.312,00	239.123.338,00

Saldo Pajak tersebut telah disetor ke Kas Negara sebesar 180.622.312,00.



8) Piutang Pajak	2021	2020
	Rp2.014.708.079,00	Rp1.470.945.997,00

Piutang Pajak adalah piutang yang timbul atas pendapatan pajak sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan atau peraturan daerah tentang perpajakan yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan. Sampai dengan 31 Desember 2021 terdapat saldo piutang pajak sebesar Rp2.014.708.079,00 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.40 Rincian Saldo Piutang Pajak

(dalam rupiah)

No	Uraian	Tahun 2021	Tahun 2020
1	Piutang Pajak Hotel	230.723.666,00	277.775.255,00
2	Piutang Pajak Restoran	143.088.352,00	173.246.549,00
3	Piutang Pajak Hiburan	3.604.500,00	4.498.000,00
5	Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan	1.637.291.561,00	1.015.426.193,00
Jumlah Piutang Pajak		2.014.708.079,00	1.470.945.997,00

Rincian Piutang Pajak dapat dilihat pada **Lampiran 6**.

9) Piutang Retribusi	2021	2020
	Rp1.213.467.990,00	Rp738.535.415,00

Saldo Piutang Retribusi per 31 Desember 2021 sebesar Rp1.213.467.990,00 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.41 Rincian Saldo Piutang Retribusi

(dalam rupiah)

No	Uraian	Tahun 2021	Tahun 2020
1	Piutang Retribusi Pelayanan Pasar	69.410.350,00	231.947.775,00
2	Piutang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	106.945.000,00	106.945.000,00
3	Piutang Retribusi Rumah Potong Hewan	261.830.000,00	140.705.000,00
4	Piutang Retribusi Tempat Rekreasi & Olah raga	531.144.000,00	14.999.000,00
5	Piutang Uang Kuliah Akper	239.250.000,00	239.250.000,00
6	Piutang Pengendalian Menara Telekomunikasi	4.688.640,00	4.688.640,00
7	Piutang Pendapatan Denda Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum - Retribusi MCK Pasar Buttu	200.000,00	
Jumlah Piutang Retribusi		1.213.467.990,00	738.535.415,00

Rincian piutang retribusi daerah dapat dilihat pada **Lampiran 7**.

10) Piutang Lain-Lain PAD yang Sah	2021	2020
	Rp29.491.923.837,17	Rp12.431.149.511,17

Saldo Piutang Lainnya merupakan Piutang Lain-lain PAD yang Sah per 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp29.491.923.837,17 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.42 Rincian Saldo Piutang Lainnya

(dalam rupiah)

No	Uraian	Tahun 2021	Tahun 2020
1	Piutang Dum Kendaraan Dinas Roda 2	990.500,00	990.500,00
2	Piutang TP/TGR	440.275.648,17	481.926.894,17
3	Piutang BLUD	29.050.657.689,00	11.948.232.117,00
Jumlah Piutang Lain-lain PAD yang Sah		29.491.923.837,17	12.431.149.511,17

(a) Piutang Dum Kendaraan Roda 2	2021	2020
	Rp990.500,00	Rp990.500,00

Piutang Dum Kendaraan Dinas Roda 2 sebesar Rp990.500,00 yaitu dom kendaraan dinas roda 2 yang di dom oleh Pegawai Pemerintah Daerah Tana Toraja (6 orang) dan sampai dengan 31 Desember 2021 belum disetor ke Kas Daerah sebagai berikut.



Tabel 5.43 Rincian Saldo Piutang Dum Kendaraan Dinas

(dalam rupiah)

No.	Nama Pembeli	Nomor Polisi	Tahun 2021	Tahun 2020
1	Drs. M. Linggiallo	DD 2156 U	120.000,00	120.000,00
2	Drs. Slamet Darmanto	DD 2345 U	150.000,00	150.000,00
3	Enos Karaeng	DD 2149 U	220.000,00	220.000,00
4	F.S.S. Paressa	DD 2191 U	275.000,00	275.000,00
5	Piter Patabang	DD 4008 U	50.000,00	50.000,00
6	P. Tandil Mallisa	DD 2144 U	175.500,00	175.500,00
	Jumlah		990.500,00	990.500,00

Rincian Piutang Dum kendaraan dinas dapat dilihat pada **Lampiran 8**.

(b) **Piutang TP/TGR** 2021 2020
Rp440.275.648,17 **Rp481.926.894,17**

Saldo Piutang TPTGR per 31 Desember 2021 dan 2020 sebesar Rp440.275.648,17 dan Rp481.926.894,17. Rincian piutang TPTGR dapat dilihat pada **Lampiran 8**.

(c) **Piutang BLUD** 2021 2020
Rp29.050.657.689,00 **Rp11.948.232.117,00**

Piutang Usaha BLUD pada RSUD Lakipadada per 31 Desember 2021 dan 2020 sebesar Rp29.050.657.689,00 dan Rp11.948.232.117,00. Rincian piutang usaha BLUD dapat dilihat pada **Lampiran 8**. Piutang Usaha BLUD ini merupakan piutang Pembayaran pengajuan klaim ke BPJS atas jasa yang telah di berikan RSUD Lakipadada pada tahun 2021.

11) **Piutang Transfer Pemerintah Provinsi** 2021 2020
Rp8.824.034.429,00 **Rp0,00**

Saldo Piutang Transfer Pemerintah Provinsi per 31 Desember 2021 sebesar Rp8.824.034.429,00 dan Tahun 2020 sebesar Rp0,00 dengan sebagai berikut.

Tabel 5.44 Rincian Saldo Piutang Transfer Pemerintah Provinsi

(dalam rupiah)

No	Uraian	Tahun 2021	Tahun 2020
1	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	2.833.564.298,00	0,00
2	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB)	1.940.628.827,00	0,00
3	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB)	3.700.835.775,00	0,00
4	PDAM	342.659.654,00	
5	AP BAKARU/ SAWITTO	6.345.875,00	0,00
	Jumlah Piutang Lainnya	8.824.034.429,00	0,00

Rincian Piutang Transfer Pemerintah Provinsi pada **Lampiran 9**.

12) **Penyisihan Piutang** 2021 2020
Rp16.280.715.133,33 **Rp1.010.509.398,69**

Saldo penyisihan piutang per 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp16.280.715.133,33 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.45 Rincian Saldo Penyisihan Piutang

(dalam rupiah)

No.	Nama Pembeli	Tahun 2021	Tahun 2020
1	Penyisihan Piutang Pajak Daerah	345.862.318,51	309.374.363,69
2	Penyisihan Piutang Retribusi	919.501.900,00	701.135.035,00
3	Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang Sah	14.971.230.742,67	
4	Penyisihan Piutang Transfer Antar Daerah	44.120.172,15	
	Jumlah	16.280.715.133,33	1.010.509.398,69

Selanjutnya, rincian penyisihan untuk masing-masing piutang dapat dilihat pada lampiran 6, 7, 8, dan 9 sesuai dengan jenis piutangnya.



13) Beban Dibayar Di Muka	2021	2020
	Rp0,00	Rp3.020.713.250,00

Beban Dibayar di Muka Pemerintah Kabupaten Tana Toraja per 31 Desember 2021 dan 2020 adalah sebesar Rp0,00 dan Rp3.020.713.250,00.

14) Persediaan	2021	2020
	Rp34.230.329.040,34	Rp35.868.756.075,82

Persediaan Pemerintah Kabupaten Tana Toraja per 31 Desember 2021 dan 2020 adalah sebesar Rp34.230.329.040,34 dan Rp35.868.756.075,82. Berikut rincian persediaan per 31 Desember 2021 dan 2020.

Tabel 5.46 Rincian Persediaan

(dalam rupiah)

No	Jenis Persediaan	Tahun 2021	Tahun 2020
I	Persediaan Bahan Pakai Habis	191.018.372,00	448.472.150,00
1	Persediaan Alat Tulis Kantor	79.575.722,00	197.657.240,00
2	Persediaan Barang Cetakan	111.442.650,00	250.814.910,00
II	Persediaan Bahan/Mateial	6.290.472.468,34	7.245.838.225,82
1	Persediaan Obat-Obatan	4.661.190.320,49	5.278.794.033,32
2	Persediaan untuk Pemeliharaan	16.267.910,00	65.655.965,00
3	Persediaan Barang Konsumsi	758.275,50	5.232.016,50
4	Persediaan Untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga	1.611.169.962,35	1.894.992.211,00
5	Persediaan Pita Cukai dan Leges	1.086.000,00	1.164.000,00
III	Persediaan Barang Lainnya	27.748.838.200,00	28.174.445.700,00
1	Persediaan Barang yang akan diberikan kepada Masyarakat	27.748.838.200,00	28.174.445.700,00
Jumlah Persediaan		34.230.329.040,34	35.868.756.075,82

Pos Persediaan merupakan pos untuk mencatat aset dalam bentuk barang atau perlengkapan (*supplies*) yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional Pemerintah Kabupaten Tana Toraja dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual kembali dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat dalam waktu satu tahun. Metode penilaian persediaan menggunakan inventarisasi fisik (*Stock Opname*). Rincian persediaan per-OPD selengkapnya pada **Lampiran 10**.

Sistem pencatatan persediaan pada Kabupaten Tana Toraja menggunakan perpektual dan periodik. Metode perpektual digunakan untuk pencatatan persediaan obat dan barang yang akan diserahkan. Sedangkan metode periodik digunakan untuk mencatat persediaan barang habis pakai, bahan material kecuali obat dan Persediaan barang lainnya kecuali barang yang akan diberikan, kepada pihak ketiga.

b. Investasi Jangka Panjang	2021	2020
	Rp37.302.310.129,00	Rp41.241.192.808,00

Investasi Jangka Panjang Pemerintah Kabupaten Tana Toraja per 31 Desember 2021 dan 2020 adalah sebesar Rp37.302.310.129,00 dan Rp41.241.192.808,00 terdiri dari investasi nonpermanen dan investasi permanen dengan perincian sebagai berikut.

Tabel 5.47 Rincian Investasi Jangka Panjang

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Tahun 2021	Tahun 2020
I.	Investasi Non Permanen	0,00	4.238.013.500,00
II.	Investasi Permanen	37.302.310.129,00	37.003.179.308,00
Jumlah		37.302.310.129,00	41.241.192.808,00



1) Investasi Non Permanen	<u>2021</u> Rp0,00	<u>2020</u> Rp4.238.013.500,00
----------------------------------	------------------------------	--

(a) Dana bergulir	<u>2021</u> Rp1.653.607.612,00	<u>2020</u> Rp1.653.607.612,00
--------------------------	--	--

Dana Bergulir sebesar Rp1.653.607.612,00 merupakan dana bergulir pada delapan OPD dengan rincian umum jatuh tempo, *aging schedule*, serta *Net Realizable Value*. Rincian Investasi Non Permanen dapat dilihat pada **Lampiran 11**.

(b) Penyisihan Dana bergulir	<u>2021</u> (Rp1.653.607.612,00)	<u>2020</u> (Rp1.653.607.612,00)
-------------------------------------	--	--

Investasi Non permanen Dana Bergulir telah disajikan dengan metode nilai bersih yang dapat direalisasikan (*Net Realizable Value*) dengan melakukan penyesuaian membentuk akun dana bergulir tidak tertagih berdasarkan penggolongan kualitas piutang.

(c) Investasi Non Permanen Lainnya	<u>2021</u> Rp4.238.013.500,00	<u>2020</u> Rp4.238.013.500,00
---	--	--

Nilai investasi non permanen lainnya berupa investasi kepada kelompok ternak per 31 Desember 2021 sebesar Rp4.238.013.500,00. Rincian dapat dilihat pada **Lampiran 12**.

(d) Penyisihan Investasi Non Permanen Lainnya	<u>2021</u> Rp(4.238.013.500,00)	<u>2020</u> 0,00
--	--	----------------------------

Nilai Investasi Non permanen Lainnya telah disajikan dengan metode nilai bersih yang dapat direalisasikan (*Net Realizable Value*) dengan melakukan penyesuaian membentuk akun penyisihan investasi non permanen lainnya berdasarkan penggolongan kualitas piutang.

2) Investasi Permanen	<u>2021</u> Rp37.302.310.129,00	<u>2020</u> Rp37.003.179.308,00
------------------------------	---	---

Saldo Investasi Permanen per 31 Desember 2021 sebesar Rp37.302.310.129,00 merupakan jumlah penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Tana Toraja pada PT Bank Sulselbar, BUMD dan PDAM Kabupaten Tana Toraja, dengan uraian sebagai berikut:

(a) **Total Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Tana Toraja pada PT Bank Sulselbar per 31 Desember 2021 adalah Rp26.586.000.000,00**

Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Tana Toraja per 31 Desember 2021 sebesar Rp26.586.000.000,00. Penyertaan modal pada PT Bank Sulselbar dicatat berdasarkan metode biaya (*cost method*) dengan persentase kepemilikan sebesar 1,97% sesuai dengan Laporan Auditor Independen Doli, Bambang, Sulistiyanto, Dadang dan Ali, Nomor 00009/3.0266/AU.1/07/0408-2/1/II/2021.

Investasi dicatat sebesar harga perolehannya dan deviden yang diperoleh dicatat sebagai pendapatan lain-lain. Perkiraan investasi jangka panjang akan dikredit dalam hal terdapat penerimaan deviden yang merupakan pembagian keuntungan atas periode sebelum penyertaan tersebut dilakukan atau jika perusahaan anak menderita kerugian yang sangat material yang menyebabkan penurunan nilai aktivitas dan rentabilitas investasi.



(b) Penyertaan Modal pada PDAM Kabupaten Tana Toraja disajikan sebesar Rp10.716.310.129,00

Persentase kepemilikan Pemerintah Kabupaten Tana Toraja adalah sebesar 100%. Penilaian investasi permanen pada PDAM Kabupaten Tana Toraja menggunakan metode ekuitas (equity method) yaitu sebesar biaya perolehan ditambah atau dikurangi sebesar bagian laba/rugi pemerintah setelah tanggal perolehan. Berdasarkan Laporan Keuangan PDAM Kabupaten Tana Toraja per 31 Desember 2021 (audited) diketahui bahwa nilai ekuitas PDAM Tana Toraja per 31 Desember 2021 sebesar Rp10.716.310.129,00.

Tabel 5.48 Rincian Penyertaan Modal pada PDAM
(dalam rupiah)

Uraian	Jumlah
Saldo Awal 1 Januari 2021	11.068.012.693,00
Koreksi Laba Rugi Tahun Sebelumnya	(138.294.964,00)
Laba (Rugi) Tahun 2021	(213.407.600,00)
Jumlah	10.716.310.129,00

(c) Penyertaan Modal pada Perusahaan Daerah Kabupaten Tana Toraja disajikan sebesar Rp0,00

Penyajian nilai tersebut berdasarkan Surat Keputusan Bupati Tana Toraja Nomor 21/II/2014 tanggal 12 Pebruari 2014 tentang Penyesuaian Nilai Penyertaan Aset Pemerintah Kabupaten Tana Toraja dan Penetapan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pengelola Aset Perusahaan Daerah Kabupaten Tana Toraja, yang menetapkan perubahan metode penilaian investasi Pemerintah Kabupaten Tana Toraja dari metode biaya ke metode ekuitas.

Penerapan nilai investasi pada Perusda dengan menggunakan metode ekuitas sebesar Rp0,00 dengan pertimbangan bahwa Perusda mengalami kerugian terus menerus dan sudah tidak layak melakukan aktivitas operasional. Sampai dengan penyusunan laporan keuangan per 31 desember 2021 status Perusda mati suri, sambil menunggu Peraturan Bupati tentang pembubaran Perusahaan Daerah. Penetapan aset Perusda baik pemanfaatan dan penatausahaannya telah diserahkan kepada BPKAD sejak tahun 2014.

c. Aset Tetap	2021	2020
	Rp3.260.833.904.341,70	Rp3.219.817.777.168,87

Aset Tetap Pemerintah Kabupaten Tana Toraja per 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp3.260.833.904.341,70 dan Rp3.219.817.777.168,87 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.49 Rincian Mutasi Aset Tetap

(dalam rupiah)

No	Nama OPD	Tahun 2021	Tahun 2020
1	Tanah	1.711.049.955.685,00	1.697.974.807.085,00
2	Peralatan dan Mesin	408.943.995.097,78	370.987.496.782,12
3	Gedung dan Bangunan	658.374.652.403,42	619.743.770.610,95
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	1.409.214.274.590,35	1.389.448.543.547,50
5	Aset Tetap Lainnya	39.487.667.991,00	36.928.874.387,00
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	31.570.711.465,00	69.400.269.255,00
7	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	(997.807.352.890,85)	(964.665.984.498,70)
	Jumlah	3.260.833.904.341,70	3.219.817.777.168,87

1) Tanah	2021	2020
	Rp1.711.049.955.685,00	Rp1.697.974.807.085,00

Aset Tetap Tanah Pemerintah Kabupaten Tana Toraja per 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp1.711.049.955.685,00 dan Rp1.697.974.807.085,00.



Tabel 5.50 Rincian Mutasi Tanah

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Saldo Per 31 Desember 2021	Saldo Per 31 Desember 2020
I	Saldo Awal 1 Januari 2021 (Audited)	1.697.974.807.085,00	1.781.056.157.785,00
II	Mutasi Hasil Inventarisasi	13.075.148.600,00	(83.081.350.700,00)
	1. Mutasi Tambah	13.075.148.600,00	23.065.049.300,00
	a. Aset Yang Belum dicatat Dalam KIB BMD Per 31 Desember 2020 (Penilaian Tanah di Bawah Irigasi Tahun 2021 (KIB A)	13.075.148.600,00	
	b. Aset Yang Belum dicatat Dalam KIB BMD Per 31 Desember 2020 : Penilaian KIB D (Penilaian Irigasi dan Jembatan Tahun 2021)	0,00	
	c. Aset Yang Belum dicatat Dalam KIB BMD Per 31 Desember 2020 (Hibah dari Kementerian Kesehatan, Kementerian PUPR dan Bank Sulselbar)	0,00	
	d. Aset Yang Belum dicatat Dalam KIB BMD Per 31 Desember 2020 (Dana Covid Tahun 2020)	0,00	
	e. Mutasi Aset Karena Inventarisasi Tahun 2021	0,00	
	f. Aset Yang Belum Tercatat Dalam KIB Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Tana Toraja (Penilaian KPKNL Tahun 2020)		22.081.733.000,00
	g. Aset Yang Belum dicatat Dalam KIB BMD Per 31 Desember 2019 (Penilaian Tanah di bawah jalan dan Irigasi Tahun 2020 dan Hibah dari Pemerintah Pusat)		983.316.300,00
	2. Mutasi Kurang	0,00	106.146.400.000,00
	a. SK Penghapusan BMD Tahun 2021	0,00	
	- Penyerahan Jalan dan Jembatan Desa Kepada Pemerintah Lembang (SK Penghapusan No. 340/XII/Tahun 2021)	0,00	
	- Penghapusan BMD Karena Hibah (SK Penghapusan No. 329/XII/Tahun 2021)	0,00	
	- Penghapusan Kendaraan Dinas Yang Telah didom (SK DOM No. 51/II/Tahun 2016)	0,00	
	- Penghapusan BMD yang telah dipindahtangankan (SK Penghapusan No. 333/XII/Tahun 2021)	0,00	
	b. Ubah Kondisi Berdasarkan Hasil Inventarisasi Tahun 2021	0,00	
	c. Perincian atas Aset Yang Dicatat Gelondongan (pindah ke Ekstrakomotabel setelah dirinci) / Koreksi Aset	0,00	
	d. Penyerahan Aset Tetap ke Provinsi (SK Penghapusan No. 481/XII/Tahun 2020 Tanggal 14 Desember 2020)		106.146.400.000,00
	e. Penghapusan Barang Milik Daerah dari Daftar Barang Milik Daerah		
III	Jumlah Aset Tetap Setelah Inventarisasi Tahun 2021 (I+II)	1.711.049.955.685,00	1.697.974.807.085,00
IV	Mutasi Tahun 2021	0,00	0,00
	1. Mutasi Tambah	0,00	0,00
	a. Belanja Modal Tahun 2021	0,00	
	b. Utang Tahun 2021 / Belanja Lainnya/Dana Bos	0,00	
	c. Distribusi Dari SKPD Lain / Jenis Aset Yang Lain	0,00	
	d. Kapitalisasi Aset (Biaya Umum)	0,00	
	e. Reklas Dari KDP Tahun 2020 ke Aset Permanen di Tahun 2021	0,00	
	f. KDP Tahun 2021 (Aset KDP di Tahun 2021)	0,00	
	2. Mutasi Kurang	0,00	0,00
	a. Tidak Tergolong Aset (Belanja Modal Tahun 2021 yang tidak memenuhi kriteria aset Tetap) dan Ekstrakompatabel serta Aset Tidak Berwujud (Contoh : Tidak material, masa manfaat kurang dari 1 tahun)	0,00	
	b. Distribusi/Reklasifikasi ke SKPD Lain / Jenis Aset Yang Lain	0,00	
	c. Lainnya / Pembayaran Utang Tahun Lalu yang dibayar tahun 2021	0,00	
V	Saldo Akhir Per 31 Desember 2021 (III + IV)	1.711.049.955.685,00	1.697.974.807.085,00



2) Peralatan dan Mesin	2021	2020
	408.943.995.097,78	Rp370.987.496.782,12

Aset Tetap Peralatan dan Mesin Pemerintah Kabupaten Tana Toraja per 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp408.943.995.097,78 dan Rp370.987.496.782,12 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.51 Rincian Mutasi Peralatan dan Mesin

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Saldo Per 31 Desember 2021	Saldo Per 31 Desember 2020
I	Saldo Awal 1 Januari 2021 (Audited)	370.987.496.782,12	319.289.218.039,12
II	Mutasi Hasil Inventarisasi	(6.754.441.033,34)	34.742.346.498,00
	1. Mutasi Tambah	3.103.308.600,00	37.830.683.826,00
	a. Aset Yang Belum dicatat Dalam KIB BMD Per 31 Desember 2020 (Penilaian Tanah di Bawah Irigasi Tahun 2021 (KIB A)	0,00	
	b. Aset Yang Belum dicatat Dalam KIB BMD Per 31 Desember 2020 : Penilaian KIB D (Penilaian Irigasi dan Jembatan Tahun 2021)		
	c. Aset Yang Belum dicatat Dalam KIB BMD Per 31 Desember 2020 (Hibah dari Kementerian Kesehatan, Kementerian PUPR dan Bank Sulselbar)	2.944.408.600,00	
	d. Aset Yang Belum dicatat Dalam KIB BMD Per 31 Desember 2020 (Dana Covid Tahun 2020)	157.400.000,00	
	e. Mutasi Aset Karena Inventarisasi Tahun 2021	1.500.000,00	
	f. Aset Yang Belum dicatat Dalam KIB BMD Per 31 Desember 2019 (Penilaian Tanah di bawah jalan dan Irigasi Tahun 2020 dan Hibah dari Pemerintah Pusat)		37.672.496.385,00
	g. Mutasi Aset Karena Inventarisasi Tahun 2020		158.187.441,00
	2. Mutasi Kurang	9.857.749.633,34	3.088.337.328,00
	a. SK Penghapusan BMD Tahun 2021	3.360.250.000,00	1.929.044.250,00
	- Penyerahan Jalan dan Jembatan Desa Kepada Pemerintah Lembang (SK Penghapusan No. 340/XII/Tahun 2021)		
	- Penghapusan BMD Karena Hibah (SK Penghapusan No. 329/XII/Tahun 2021)	352.800.000,00	
	- Penghapusan Kendaraan Dinas Yang Telah didom (SK DOM No. 51/II/Tahun 2016)	12.500.000,00	
	- Penghapusan BMD yang telah dipindahtangankan (SK Penghapusan No. 333/XII/Tahun 2021)	2.994.950.000,00	
	- Gedung Yang Dibongkar, Penyerahan ke Gereja Toraja, SMK Tiranis, Kehutanan (SK Penghapusan No. 485/XII/Tahun 2020)		1.100.219.250,00
	- Penghapusan Kendaraan Dinas Yang Telah di DUM		828.825.000,00
	b. Ubah Kondisi Berdasarkan Hasil Inventarisasi Tahun 2021	6.497.499.633,34	1.159.293.078,00
	c. Perincian atas Aset Yang Dicatat Gelondongan (pindah ke Ekstrakomotabel setelah dirinci) / Koreksi Aset		
III	Jumlah Aset Tetap Setelah Inventarisasi Tahun 2021 (I+II)	364.233.055.748,78	354.031.564.537,12
IV	Mutasi Tahun 2021	44.710.939.349,00	38.428.990.087,60
	1. Mutasi Tambah	50.174.124.938,00	48.800.144.767,60
	a. Belanja Modal Tahun 2021	40.268.649.540,00	46.129.572.654,60
	b. Utang Tahun 2021 / Belanja Lainnya/Dana Bos	7.715.376.599,00	
	c. Distribusi Dari SKPD Lain / Jenis Aset Yang Lain	2.145.245.800,00	1.311.462.115,00
	d. Kapitalisasi Aset (Biaya Umum)	44.852.999,00	
	e. Reklas Dari KDP Tahun 2020 ke Aset Permanen di Tahun 2021		
	f. KDP Tahun 2021 (Aset KDP di Tahun 2021)		
	g. Utang Tahun 2020 dan Dana Covid		1.359.109.998,00
	h. Koreksi BPK Aset dari Belanja Tidak Terduga yang Belum dicatat Dalam KIB BMD	597.621.650,00	
	2. Mutasi Kurang	6.060.807.239,00	10.371.154.680,00



No.	Uraian	Saldo Per 31 Desember 2021	Saldo Per 31 Desember 2020
a.	Tidak Tergolong Aset (Belanja Modal Tahun 2021 yang tidak memenuhi kriteria aset Tetap) dan Ekstrakompatabel serta Aset Tidak Berwujud (Contoh : Tidak material, masa manfaat kurang dari 1 tahun)	2.383.123.739,00	7.383.811.480,00
b.	Distribusi/Reklasifikasi ke SKPD Lain / Jenis Aset Yang Lain	3.677.683.500,00	2.814.283.200,00
c.	Lainnya / Pembayaran Utang Tahun Lalu yang dibayar tahun 2021		173.060.000,00
3.	Mapping dari Permendagri No. 17 Tahun 2007 ke Permendagri 108 Tahun 2016		1.439.599.423,40
4.	Koreksi BPK		(22.912.657.266,00)
	Aset dari Belanja Tidak Terduga yang Belum dicatat Dalam KIB BMD	597.621.650,00	
V	Saldo Akhir Per 31 Desember 2021 (III + IV)	408.943.995.097,78	370.987.496.782,12

Tabel 5.52 Komponen Aset Tetap – Peralatan Dan Mesin

(dalam rupiah)

Kode	Uraian	Saldo Per 31 Desember 2021	Saldo Per 31 Desember 2020
01	Alat Besar	14.865.417.633,00	14.929.096.633,00
02	Alat Angkutan	99.800.515.781,20	101.162.020.281,20
03	Alat Bengkel & Alat ukur	3.182.347.514,00	3.152.826.514,00
04	Alat Pertanian	1.550.735.293,00	1.547.613.293,00
05	Alat Kantor & Rumah Tangga	59.178.925.238,02	52.473.266.364,36
06	Alat Studio, Komunikasi Dan Pemancar	10.112.177.149,43	9.991.952.013,43
07	Alat Kedokteran Dan Kesehatan	131.302.355.680,97	105.727.817.015,97
08	Alat laboratorium	45.114.469.596,21	43.115.527.393,21
09	Alat-alat Persenjataan	1.521.125.500,00	1.391.125.500,00
10	Komputer	38.823.996.444,55	34.098.349.008,55
11	Alat Eksplorasi	0,00	0,00
12	Alat Pengeboran	0,00	0,00
13	Alat Produksi, Pengolahan Dan Pemurnian	7.500.000,00	7.500.000,00
14	Alat Bantu Eksplorasi	0,00	0,00
15	Alat Keselamatan Kerja	1.670.546.342,00	1.621.046.342,00
16	Alat Peraga	7.809.000,00	0,00
17	Peralatan Proses/Produksi	12.897.500,00	0,00
18	Rambu - Rambu	1.649.555.153,00	1.649.555.153,00
19	Peralatan Olah Raga	143.621.270,40	119.801.270,40
	Jumlah	408.943.995.097,78	370.987.496.782,12

3) Gedung dan Bangunan	2021	2020
	Rp658.374.652.403,42	Rp619.743.770.610,95

Aset Tetap Gedung dan Bangunan Pemerintah Kabupaten Tana Toraja per 31 Desember 2021 dan 2020 masing masing sebesar Rp658.374.652.403,42 dan Rp619.743.770.610,95 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.53 Rincian Mutasi Gedung dan Bangunan

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Saldo Per 31 Desember 2021	Saldo Per 31 Desember 2020
I	Saldo Awal 1 Januari 2021 (Audited)	619.743.770.610,95	580.164.733.647,79
II	Mutasi Hasil Inventarisasi	3.195.068.568,59	8.058.515.667,33
1.	Mutasi Tambah	5.460.610.542,59	9.598.820.842,68
a.	Aset Yang Belum dicatat Dalam KIB BMD Per 31 Desember 2020 (Penilaian Tanah di Bawah Irigasi Tahun 2021 (KIB A)		
b.	Aset Yang Belum dicatat Dalam KIB BMD Per 31 Desember 2020 : Penilaian KIB D (Penilaian Irigasi dan Jembatan Tahun 2021)		
c.	Aset Yang Belum dicatat Dalam KIB BMD Per 31 Desember 2020 (Hibah dari Kementerian Kesehatan, Kementerian PUPR dan Bank Sulselbar)	3.650.088.269,59	
d.	Aset Yang Belum dicatat Dalam KIB BMD Per 31 Desember 2020 (Dana Covid Tahun 2020)	152.454.500,00	
e.	Mutasi Aset Karena Inventarisasi Tahun 2021	1.658.067.773,00	677.642.557,68
f.	Aset Yang Belum dicatat Dalam KIB BMD (SIMDA Per 31 Desember 2019) (Penilaian KPKNL Tahun 2020)		2.803.712.000,00



Pemerintah Kabupaten Tana Toraja
 Catatan Atas Laporan Keuangan per 31 Desember Tahun Anggaran 2021
 Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2020
 (Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

No.	Uraian	Saldo Per 31 Desember 2021	Saldo Per 31 Desember 2020
9-	Aset Yang Belum dicatat Dalam KIB BMD Per 31 Desember 2019 (Penilaian Tanah di bawah jalan dan Irigasi Tahun 2020 dan Hibah dari Pemerintah Pusat)		6.117.466.285,00
2.	Mutasi Kurang	2.265.541.974,00	1.540.305.175,35
a.	SK Penghapusan BMD Tahun 2021	1.114.695.500,00	863.191.010,00
-	Penyerahan Jalan dan Jembatan Desa Kepada Pemerintah Lembang (SK Penghapusan No. 340/XII/Tahun 2021)		
-	Penghapusan BMD Karena Hibah (SK Penghapusan No. 329/XII/Tahun 2021)		
-	Penghapusan Kendaraan Dinas Yang Telah didom (SK DOM No. 51/II/Tahun 2016)		
-	Penghapusan BMD yang telah dipindahtangankan (SK Penghapusan No. 333/XII/Tahun 2021)	1.114.695.500,00	
-	Gedung Yang Dibongkar, Penyerahan ke Gereja Toraja, SMK Tiranis, Kehutanan (SK Penghapusan No. 485/XII/Tahun 2020)		863.191.010,00
b.	Ubah Kondisi Berdasarkan Hasil Inventarisasi Tahun 2021	1.150.846.474,00	677.114.165,35
c.	Perincian atas Aset Yang Dicatat Gelondongan (pindah ke Ekstrakomotabel setelah dirinci) / Koreksi Aset		
III	Jumlah Aset Tetap Setelah Inventarisasi Tahun 2021 (I+II)	622.938.839.179,54	588.223.249.315,12
IV	Mutasi Tahun 2021	35.435.813.223,88	31.725.570.960,83
1.	Mutasi Tambah	38.341.795.955,00	35.927.018.603,83
a.	Belanja Modal Tahun 2021	30.720.529.486,00	33.271.722.395,00
b.	Utang Tahun 2021 / Belanja Lainnya/Dana Bos		
c.	Distribusi Dari SKPD Lain / Jenis Aset Yang Lain	3.677.683.500,00	225.356.399,83
d.	Kapitalisasi Aset (Biaya Umum)	160.062.969,00	
e.	Reklas Dari KDP Tahun 2020 ke Aset Permanen di Tahun 2021	3.783.520.000,00	8.014.519.279,00
f.	KDP Tahun 2021 (Aset KDP di Tahun 2021)		
g.	KDP Tahun 2020 (Aset KDP di Tahun 2020)		(5.584.579.470,00)
2.	Mutasi Kurang	2.905.982.731,12	4.201.447.643,00
a.	Tidak Tergolong Aset (Belanja Modal Tahun 2021 yang tidak memenuhi kriteria aset Tetap) dan Ekstrakompatabel serta Aset Tidak Berwujud (Contoh : Tidak material, masa manfaat kurang dari 1 tahun)	121.622.710,12	79.134.500,00
b.	Distribusi/Reklasifikasi ke SKPD Lain / Jenis Aset Yang Lain	2.784.360.021,00	2.933.797.915,00
c.	Lainnya / Pembayaran Utang Tahun Lalu yang dibayar tahun 2021		1.188.515.228,00
3.	Mapping dari Permendagri No. 17 Tahun 2007 ke Permendagri 108 Tahun 2016		(1.319.298.153,00)
4.	Koreksi BPK atas LKPD Tahun 2020		1.114.248.488,00
V	Saldo Akhir Per 31 Desember 2021 (III + IV)	658.374.652.403,42	619.743.770.610,95

Tabel 5.54 Komponen Aset Tetap – Gedung dan Bangunan

(dalam rupiah)

Kode	Uraian	Saldo Per 31 Desember 2021	Saldo Per 31 Desember 2020
01	Bangunan Gedung	613.154.062.678,67	574.688.942.190,54
02	Monumen	35.185.674.199,18	35.185.674.199,18
03	Bangunan Menara	358.436.202,00	358.436.202,00
04	Tugu Titik Kontrol/Pasti	9.676.479.323,57	9.510.718.019,23
	Jumlah	658.374.652.403,42	619.743.770.610,95

4) Jalan Irigasi dan Jaringan

2021

Rp1.409.214.274.590,35

2020

Rp1.389.448.543.547,50

Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan Pemerintah Kabupaten Tana Toraja per 31 Desember 2021 dan 2020 masing masing sebesar Rp1.409.214.274.590,35 dan Rp1.389.448.543.547,50 dengan rincian sebagai berikut.



Tabel 5.55 Rincian Mutasi Jalan, Irigasi dan Jaringan

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Saldo Per 31 Desember 2021	Saldo Per 31 Desember 2020
I	Saldo Awal 1 Januari 2021 (<i>Audited</i>)	1.389.448.543.547,50	1.371.212.120.001,54
II	Mutasi Hasil Inventarisasi	(135.661.298.686,15)	(94.482.000.913,94)
1.	Mutasi Tambah	73.401.956.390,41	7.397.436.708,39
a.	Aset Yang Belum dicatat Dalam KIB BMD Per 31 Desember 2020 (Penilaian Tanah di Bawah Irigasi Tahun 2021 (KIB A)		
b.	Aset Yang Belum dicatat Dalam KIB BMD Per 31 Desember 2020 : Penilaian KIB D (Penilaian Irigasi dan Jembatan Tahun 2021)	74.767.785.000,00	
c.	Aset Yang Belum dicatat Dalam KIB BMD Per 31 Desember 2020 (Hibah dari Kementerian Kesehatan, Kementerian PUPR dan Bank Sulselbar)	293.739.163,41	
d.	Aset Yang Belum dicatat Dalam KIB BMD Per 31 Desember 2020 (Dana Covid Tahun 2020)		
e.	Mutasi Aset Karena Inventarisasi Tahun 2021	(1.659.567.773,00)	(835.829.998,61)
f.	Aset Yang Belum dicatat Dalam KIB BMD (SIMDA Per 31 Desember 2019) (Penilaian KPKNL Tahun 2020)		7.460.165.000,00
g.	Aset Yang Belum dicatat Dalam KIB BMD Per 31 Desember 2019 (Penilaian Tanah di bawah jalan dan Irigasi Tahun 2020 dan Hibah dari Pemerintah Pusat)		773.101.707,00
2.	Mutasi Kurang	209.063.255.076,56	101.879.437.622,33
a.	SK Penghapusan BMD Tahun 2021	209.063.255.076,56	101.879.437.622,33
-	Penyerahan Jalan dan Jembatan Desa Kepada Pemerintah Lembang (SK Penghapusan No. 340/XII/Tahun 2021)	209.063.255.076,56	
-	Penghapusan BMD Karena Hibah (SK Penghapusan No. 329/XII/Tahun 2021)		
-	Penghapusan Kendaraan Dinas Yang Telah didum (SK DOM No. 51/II/Tahun 2016)		
-	Penghapusan BMD yang telah dipindahtangankan (SK Penghapusan No. 333/XII/Tahun 2021)		
-	Penyerahan Aset Tetap ke Provinsi (SK Penghapusan No. 481/XII/Tahun 2020 Tanggal 14 Desember 2020)		101.879.437.622,33
b.	Ubah Kondisi Berdasarkan Hasil Inventarisasi Tahun 2021		
c.	Perincian atas Aset Yang Dicatat Gelondongan (pindah ke Ekstrakomptabel setelah dirinci) / Koreksi Aset		
III	Jumlah Aset Tetap Setelah Inventarisasi Tahun 2021 (I+II)	1.253.787.244.861,35	1.276.730.119.087,60
IV	Mutasi Tahun 2021	155.427.029.729,00	111.121.912.947,90
1.	Mutasi Tambah	155.487.874.729,00	138.230.775.072,83
a.	Belanja Modal Tahun 2021	84.400.315.825,00	113.479.381.382,93
b.	Utang Tahun 2021 / Belanja Lainnya/Dana Bos	33.160.070.561,00	
c.	Distribusi Dari SKPD Lain / Jenis Aset Yang Lain	660.084.221,00	1.622.335.800,00
d.	Kapitalisasi Aset (Biaya Umum)	3.221.366.332,00	1.297.788.380,00
e.	Reklasifikasi Dari KDP Tahun 2020 ke Aset Permanen di Tahun 2021	43.801.613.231,00	
f.	KDP Tahun 2021 (Aset KDP di Tahun 2021)	(9.755.575.441,00)	
g.	Utang Tahun 2020 dan Dana Covid		25.695.331.921,90
h.	Reklasifikasi Dari KDP Tahun 2019 ke Aset Permanen di Tahun 2020		36.464.436.105,00
i.	KDP Tahun 2020 (Aset KDP di Tahun 2020)		(40.328.498.517,00)
2.	Mutasi Kurang	60.845.000,00	27.108.862.124,93
a.	Tidak Tergolong Aset (Belanja Modal Tahun 2021 yang tidak memenuhi kriteria aset Tetap) dan Ekstrakompatabel serta Aset Tidak Berwujud (Contoh: Tidak material, masa manfaat kurang dari 1 tahun)	9.295.000,00	
b.	Distribusi/Reklasifikasi ke SKPD Lain / Jenis Aset Yang Lain	51.550.000,00	
c.	Lainnya / Pembayaran Utang Tahun Lalu yang dibayar tahun 2021		27.108.862.124,93
3.	Koreksi BPK atas LKPD Tahun 2020		1.596.511.512,00
V	Saldo Akhir Per 31 Desember 2021 (III + IV)	1.409.214.274.590,35	1.389.448.543.547,50



Tabel 5.56 Komponen Aset Tetap – Jalan, Jaringan dan Irigasi
 (dalam rupiah)

Kode	Uraian	Saldo Per 31 Desember 2021	Saldo Per 31 Desember 2020
01	Jalan & Jembatan	1.219.097.652.886,67	1.218.497.191.675,91
02	Bangunan Air	161.383.956.880,97	136.597.013.267,15
03	Instalasi	22.088.703.248,37	27.384.773.030,10
04	Jaringan	6.643.961.574,34	6.969.565.574,34
Jumlah		1.409.214.274.590,35	1.389.448.543.547,50

Terdapat penambahan Aset Tetap Jalan, Jaringan dan Irigasi senilai Rp74.767.785.000,00 dengan rincian aset Jembatan senilai Rp54.709.500.000,00 dan Aset Irigasi senilai Rp20.058.285.000,00 yang merupakan aset lama yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Tana Toraja yang baru dilakukan penilaian pada tahun 2022.

5) Aset Tetap Lainnya	2021	2020
	Rp39.487.667.991,00	Rp36.928.874.387,00

Aset Tetap Lainnya merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap di atas, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap digunakan. Aset tetap lainnya di neraca antara lain meliputi buku dan perpustakaan, barang bercorak kesenian dan kebudayaan serta hewan, ternak, dan tumbuhan. Aset Tetap Lainnya Pemerintah Kabupaten Tana Toraja per 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp39.487.667.991,00 dan Rp36.928.874.387,00 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.57 Rincian Mutasi Aset Tetap Lainnya

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Saldo Per 31 Desember 2021	Saldo Per 31 Desember 2020
I	Saldo Awal 1 Januari 2021 (<i>Audited</i>)	36.928.874.387,00	33.868.652.879,40
II	Mutasi Hasil Inventarisasi	0,00	0,00
	1. Mutasi Tambah	0,00	0,00
	a. Aset Yang Belum dicatat Dalam KIB BMD Per 31 Desember 2020 (Penilaian Tanah di Bawah Irigasi Tahun 2021 (KIB A)		
	b. Aset Yang Belum dicatat Dalam KIB BMD Per 31 Desember 2020 : Penilaian KIB D (Penilaian Irigasi dan Jembatan Tahun 2021)		
	c. Aset Yang Belum dicatat Dalam KIB BMD Per 31 Desember 2020 (Hibah dari Kementerian Kesehatan, Kementerian PUPR dan Bank Sulselbar)		
	d. Aset Yang Belum dicatat Dalam KIB BMD Per 31 Desember 2020 (Dana Covid Tahun 2020)		
	e. Mutasi Aset Karena Inventarisasi Tahun 2021		
	2. Mutasi Kurang	0,00	0,00
	a. SK Penghapusan BMD Tahun 2021	0,00	0,00
	- Penyerahan Jalan dan Jembatan Desa Kepada Pemerintah Lembang (SK Penghapusan No. 340/XII/Tahun 2021)		
	- Penghapusan BMD Karena Hibah (SK Penghapusan No. 329/XII/Tahun 2021)		
	- Penghapusan Kendaraan Dinas Yang Telah didum (SK DOM No. 51/II/Tahun 2016)		
	- Penghapusan BMD yang telah dipindahtangankan (SK Penghapusan No. 333/XII/Tahun 2021)		
	b. Ubah Kondisi Berdasarkan Hasil Inventarisasi Tahun 2021		
	c. Perincian atas Aset Yang Dicatat Gelondongan (pindah ke Ekstrakomptabel setelah dirinci) / Koreksi Aset		
III	Jumlah Aset Tetap Setelah Inventarisasi Tahun 2021 (I+II)	36.928.874.387,00	33.868.652.879,40
IV	Mutasi Tahun 2021	2.558.793.604,00	2.864.278.514,00
	1. Mutasi Tambah	2.573.793.604,00	2.939.078.514,00
	a. Belanja Modal Tahun 2021	15.000.000,00	124.795.314,00
	b. Utang Tahun 2021 / Belanja Lainnya/Dana Bos	2.558.793.604,00	
	c. Distribusi Dari SKPD Lain / Jenis Aset Yang Lain		2.814.283.200,00
	d. Kapitalisasi Aset (Biaya Umum)		
	e. Reklasifikasi Dari KDP Tahun 2020 ke Aset Permanen di Tahun 2021		
	f. KDP Tahun 2021 (Aset KDP di Tahun 2021)		



No.	Uraian	Saldo Per 31 Desember 2021	Saldo Per 31 Desember 2020
2.	Mutasi Kurang	15.000.000,00	74.800.000,00
a.	Tidak Tergolong Aset (Belanja Modal Tahun 2021 yang tidak memenuhi kriteria aset Tetap) dan Ekstrakomptabel serta Aset Tidak Berwujud (Contoh: Tidak material, masa manfaat kurang dari 1 tahun)	15.000.000,00	74.800.000,00
b.	Distribusi/Reklasifikasi ke SKPD Lain / Jenis Aset Yang Lain		
c.	Lainnya / Pembayaran Utang Tahun Lalu yang dibayar tahun 2021		
3.	Mapping dari Permendagri No. 17 Tahun 2007 ke Permendagri 108 Tahun 2016		(120.301.270,40)
4.	Koreksi BPKA atas LKPD Tahun 2020		316.244.264,00
V	Saldo Akhir Per 31 Desember 2021 (III + IV)	39.487.667.991,00	36.928.874.387,00

Tabel 5.58 Komponen Aset Tetap – Aset Tetap Lainnya

(dalam rupiah)

Kode	Uraian	Saldo Per 31 Desember 2021	Saldo Per 31 Desember 2020
01	Bahan Perpustakaan	39.335.792.991,00	36.776.999.387,00
02	Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga	100.375.000,00	100.375.000,00
03	Hewan	0,00	0,00
04	Biota Perairan	0,00	0,00
05	Tanaman	51.500.000,00	51.500.000,00
06	Barang Koleksi Non Budaya	0,00	0,00
07	Aset Tetap Dalam Renovasi	0,00	0,00
Jumlah		39.487.667.991,00	36.928.874.387,00

6) Konstruksi Dalam Pengerjaan	2021	2020
	Rp31.570.711.465,00	Rp69.400.269.255,00

Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) Pemerintah Daerah Kabupaten Tana Toraja per 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp31.570.711.465,00 dan Rp69.400.269.255,00. Rincian Mutasi Konstruksi Dalam Pengerjaan sebagai berikut

Tabel 5.59 Rincian Mutasi Konstruksi Dalam Pengerjaan

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Saldo Per 31 Desember 2021	Saldo Per 31 Desember 2020
I	Saldo Awal 1 Januari 2021 (Audited)	69.400.269.255,00	67.966.146.651,00
II	Mutasi Hasil Inventarisasi	0,00	0,00
1.	Mutasi Tambah	0,00	0,00
a.	Aset Yang Belum dicatat Dalam KIB BMD Per 31 Desember 2020 (Penilaian Tanah di Bawah Irigasi Tahun 2021 (KIB A)		
b.	Aset Yang Belum dicatat Dalam KIB BMD Per 31 Desember 2020 : Penilaian KIB D (Penilaian Irigasi dan Jembatan Tahun 2021)		
c.	Aset Yang Belum dicatat Dalam KIB BMD Per 31 Desember 2020 (Hibah dari Kementerian Kesehatan, Kementerian PUPR dan Bank Sulselbar)		
d.	Aset Yang Belum dicatat Dalam KIB BMD Per 31 Desember 2020 (Dana Covid Tahun 2020)		
e.	Mutasi Aset Karena Inventarisasi Tahun 2021		
2.	Mutasi Kurang	0,00	0,00
a.	SK Penghapusan BMD Tahun 2021	0,00	0,00
-	Penyerahan Jalan dan Jembatan Desa Kepada Pemerintah Lembang (SK Penghapusan No. 340/XII/Tahun 2021)		
-	Penghapusan BMD Karena Hibah (SK Penghapusan No. 329/XII/Tahun 2021)		
-	Penghapusan Kendaraan Dinas Yang Telah didum (SK DOM No. 51/II/Tahun 2016)		
-	Penghapusan BMD yang telah dipindahtangankan (SK Penghapusan No. 333/XII/Tahun 2021)		
b.	Ubah Kondisi Berdasarkan Hasil Inventarisasi Tahun 2021		
c.	Perincian atas Aset Yang Dicatat Gelondongan (pindah ke Ekstrakomptabel setelah dirinci) / Koreksi Aset		



Pemerintah Kabupaten Tana Toraja
 Catatan Atas Laporan Keuangan per 31 Desember Tahun Anggaran 2021
 Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2020
 (Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

No.	Uraian	Saldo Per 31 Desember 2021	Saldo Per 31 Desember 2020
III	Jumlah Aset Tetap Setelah Inventarisasi Tahun 2021 (I+II)	69.400.269.255,00	67.966.146.651,00
IV	Mutasi Tahun 2021	(37.829.557.790,00)	1.434.122.604,00
1.	Mutasi Tambah	(37.829.557.790,00)	1.434.122.604,00
a.	Belanja Modal Tahun 2021		
b.	Utang Tahun 2021 / Belanja Lainnya/Dana Bos		
c.	Distribusi Dari SKPD Lain / Jenis Aset Yang Lain		
d.	Kapitalisasi Aset (Biaya Umum)		
e.	Reklasifikasi Dari KDP Tahun 2020 ke Aset Permanen di Tahun 2021	(47.585.133.231,00)	(44.478.955.383,00)
f.	KDP Tahun 2021 (Aset KDP di Tahun 2021)	9.755.575.441,00	
g.	KDP Tahun 2020 (Aset KDP di Tahun 2020)		45.913.077.987,00
2.	Mutasi Kurang	0,00	0,00
a.	Tidak Tergolong Aset (Belanja Modal Tahun 2021 yang tidak memenuhi kriteria aset Tetap) dan Ekstrakompatabel serta Aset Tidak Berwujud (Contoh: Tidak material, masa manfaat kurang dari 1 tahun)		
b.	Distribusi/Reklasifikasi ke SKPD Lain / Jenis Aset Yang Lain		
c.	Lainnya / Pembayaran Utang Tahun Lalu yang dibayar tahun 2021		
V	Saldo Akhir Per 31 Desember 2021 (III + IV)	31.570.711.465,00	69.400.269.255,00

7) Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	2021 (Rp997.807.352.890,85)	2020 (Rp964.665.984.498,70)
---	--	--

Saldo Akumulasi Penyusutan Aktiva Tetap Pemerintah Kabupaten Tana Toraja per 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing sebesar (Rp997.807.352.890,85) dan (Rp964.665.984.498,70).

Tabel 5.60 Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Peralatan dan Mesin	Gedung dan Bangunan	Jalan, Irigasi dan Jaringan	Jumlah
1	Dinas Pendidikan	50.592.219.688,62	54.667.651.680,00	309.110.902,00	105.568.982.270,62
2	Dinas Kesehatan	58.349.303.891,00	9.827.513.152,00	147.949.235,00	68.324.766.278,00
3	RSUD Laki pada	73.825.952.341,33	6.837.292.491,00	590.340.497,00	81.253.585.329,33
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	14.792.957.217,00	205.446.022,00	489.780.840.301,81	504.779.243.540,81
5	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	4.504.537.933,00	17.993.261.603,00	47.430.956.848,00	69.928.756.384,00
6	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	4.463.758.059,20	-	-	4.463.758.059,20
7	Badan Penanggulangan Bencana	1.701.114.318,85	50.018,00	454.687,00	1.701.619.023,85
8	Dinas Sosial	466.793.994,00	307.120.659,00	-	773.914.653,00
9	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	267.510.216,00	9.200.000,00	5.478.193.776,00	5.754.903.992,00
10	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	625.186.434,00	-	-	625.186.434,00
11	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	2.164.789.588,00	1.033.284.182,00	323.111.397,00	3.521.185.167,00
12	Dinas Lingkungan Hidup	836.832.735,00	284.307.369,00	52.081.848,00	1.173.221.952,00
13	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	1.594.762.896,00	1.078.930.515,00	-	2.673.693.411,00
14	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Lembaga	1.003.795.408,00	-	26.951.350.000,00	27.955.145.408,00
15	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	2.341.825.289,00	521.700.984,00	-	2.863.526.273,00
16	Dinas Perhubungan	5.782.157.407,00	598.067.446,00	477.165.697,00	6.857.390.550,00
17	Dinas Komunikasi dan Informatika	1.259.131.902,00	82.230.440,00	-	1.341.362.342,00
18	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah	686.923.815,00	-	-	686.923.815,00
19	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu	782.255.725,00	148.331.685,00	-	930.587.410,00
20	Dinas Kepemudaan dan Olah Raga	484.350.983,66	17.708.333,00	-	502.059.316,66
21	Dinas Kebudayaan	360.054.917,00	-	-	360.054.917,00
22	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	588.964.931,00	86.031.577,00	1.077.782,00	676.074.290,00
23	Dinas Pariwisata	1.328.131.129,93	2.329.824.115,00	486.587.564,00	4.144.542.808,93
24	Dinas Pertanian	3.391.233.106,00	1.818.364.933,00	8.443.430.002,44	13.653.028.041,44
25	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	2.443.108.627,00	5.413.773.508,00	118.955.884,00	7.975.838.019,00



Pemerintah Kabupaten Tana Toraja
 Catatan Atas Laporan Keuangan per 31 Desember Tahun Anggaran 2021
 Dengan Angka Perbandingan Tahun Anggaran 2020
 (Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

No.	Uraian	Peralatan dan Mesin	Gedung dan Bangunan	Jalan, Irigasi dan Jaringan	Jumlah
26	Sekretariat Daerah	15.957.445.275,00	2.159.577.360,00	80.546.083,00	18.197.568.718,00
27	Sekretariat DPRD	6.327.072.353,00	1.766.688.333,00	10.286.645,00	8.104.047.331,00
28	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	2.068.498.414,00	-	6.975.302,00	2.075.473.716,00
29	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	12.090.755.126,00	2.759.206.336,00	3.682.020.119,00	18.531.981.581,00
30	Badan Pendapatan Daerah	1.771.188.952,00	-	-	1.771.188.952,00
31	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya	1.171.166.627,00	-	-	1.171.166.627,00
32	Inspektorat Daerah	2.317.424.714,00	44.454.683,00	4.666.200,00	2.366.545.597,00
33	Kecamatan Makale	1.510.094.850,00	604.436.666,00	3.164.870.257,00	5.279.401.773,00
34	Kecamatan Makale Utara	495.756.451,00	681.339.638,00	1.164.173.312,00	2.341.269.401,00
35	Kecamatan Makale Selatan	713.112.016,00	427.959.141,00	901.762.952,00	2.042.834.109,00
36	Kecamatan Sangalla	436.270.951,00	261.550.051,00	325.734.858,00	1.023.555.860,00
37	Kecamatan Sangalla Utara	434.822.887,00	169.552.642,00	578.253.447,00	1.182.628.976,00
38	Kecamatan Sangalla Selatan	660.203.457,00	296.301.775,00	158.477.356,00	1.114.982.588,00
39	Kecamatan Mengkendek	703.723.512,00	282.695.711,00	506.241.626,00	1.492.660.849,00
40	Kecamatan Gandang Batu Sillanan	1.091.288.500,00	299.522.480,00	738.487.749,00	2.129.298.729,00
41	Kecamatan Saluputti	588.938.524,00	393.757.658,00	167.055.298,00	1.149.751.480,00
42	Kecamatan Rembon	521.929.671,00	116.410.394,00	365.728.957,00	1.004.069.022,00
43	Kecamatan Malimbong Balepe	290.170.762,00	170.871.421,00	181.893.474,00	642.935.657,00
44	Kecamatan Rantetayo	581.303.743,00	215.634.331,00	437.028.560,00	1.233.966.634,00
45	Kecamatan Kurra	471.877.436,00	75.332.583,00	172.947.924,00	720.157.943,00
46	Kecamatan Bonggakaradeng	712.709.901,00	124.106.561,00	141.493.007,00	978.309.469,00
47	Kecamatan Rano	408.867.075,00	142.234.946,00	-	551.102.021,00
48	Kecamatan Bittuang	469.948.812,00	221.159.005,00	197.871.579,00	888.979.396,00
49	Kecamatan Masanda	235.110.591,00	140.339.471,00	-	375.450.062,00
50	Kecamatan Simbuang	731.313.085,00	168.254.612,00	605.688.530,00	1.505.256.227,00
51	Kecamatan Mappak	544.632.398,00	199.407.831,00	159.515.057,00	903.555.286,00
52	Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Linmas	539.865.201,00	-	-	539.865.201,00
	Jumlah	288.483.143.836,59	114.980.884.341,00	594.343.324.713,26	997.807.352.890,85

d. Aset Lainnya	2021	2020
	Rp30.880.929.554,33	Rp29.878.293.731,33

Aset Lainnya pada Pemerintah Kabupaten Tana Toraja per 31 Desember 2021 dan 2020 adalah sebesar Rp30.880.929.554,33 dan Rp29.878.293.731,33. Rincian aset lainnya akan dijabarkan sebagai berikut.

Tabel 5.61 Rincian Aset Lainnya

(dalam rupiah)

No.	Nama OPD	Tahun 2021	Tahun 2020
1	Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	417.445.000,00	417.445.000,00
2	Kemitraan dengan Pihak Ketiga	252.407.500,00	252.407.500,00
3	Aset Tidak Berwujud	2.872.313.993,00	2.797.513.993,00
4	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	(1.120.321.308,00)	(1.071.734.707,00)
5	Aset Lain-lain	94.992.678.701,67	87.755.457.294,33
6	Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain	(66.533.594.332,34)	(60.272.795.349,00)
	Jumlah	30.880.929.554,33	29.878.293.731,33

1) Tagihan Tuntutan Ganti Rugi	2021	2020
	Rp417.445.000,00	Rp417.445.000,00

Tagihan Tuntutan Ganti Rugi tahun 2021 dan 2020 sebesar Rp417.445.000,00 dan Rp417.445.000,00 merupakan Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah yang timbul dari hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. Pada Tahun Anggaran 2016 terdapat kasus ketekoran kas di Dinas Kesehatan sebesar Rp400.000.000,00 dan sedang dalam proses di aparat penegak hukum dan belum ada setoran ke kas daerah dan penggunaan secara pribadi sebesar Rp17.445.000,00 oleh bendahara penerimaan Kecamatan Sanggala Utara atas penerimaan retribusi rumah potong hewan Tahun Anggaran 2018. Penggunaan dana secara pribadi sebesar Rp77.815.000,00 oleh Sdr. N (Kasubbag Kepegawaian Tahun Anggaran 2019) Kecamatan Makale Selatan atas penerimaan retribusi rumah potong hewan Tahun Anggaran 2019 telah disetor ke kas daerah pada tanggal 14 Agustus 2020 dengan nomor STS 2504.



4) Aset Lain-lain	2021	2020
	<u>Rp94.992.678.701,67</u>	<u>Rp87.755.457.294,33</u>

Aset Lain-lain Pemerintah Kabupaten Tana Toraja untuk periode 2021 dan 2020 sebesar Rp94.992.678.701,67 dan Rp87.755.457.294,33. Rincian Aset Lain-lain dapat dilihat pada **Lampiran 15**.

5) Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	2021	2020
	<u>(Rp1.120.321.308,00)</u>	<u>(Rp1.071.734.707,00)</u>

Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud Pemerintah Kabupaten Tana Toraja untuk periode 31 Desember 2021 sebesar (Rp1.120.321.308,00).

6) Akumulasi Penyusutan Lain-lain	2021	2020
	<u>(Rp66.533.594.332,00)</u>	<u>(Rp60.272.795.349,00)</u>

Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain Pemerintah Kabupaten Tana Toraja untuk periode 31 Desember 2021 sebesar (Rp66.533.594.332,00).

2. Kewajiban	2021	2020
	<u>Rp120.281.237.555,07</u>	<u>Rp71.539.681.230,00</u>

Jumlah Kewajiban Pemerintah Kabupaten Tana Toraja per 31 Desember 2021 dan 2020 adalah sebesar Rp120.281.237.555,07 dan Rp71.539.681.230,00 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.64 Rincian Kewajiban

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Tahun 2021	Tahun 2020
1	Kewajiban Jangka Pendek	120.281.237.555,07	71.539.681.230,00
2	Kewajiban Jangka Panjang	0,00	0,00
Jumlah Kewajiban		120.281.237.555,07	71.539.681.230,00

a. Kewajiban Jangka Pendek	2021	2020
	<u>Rp120.273.452.555,07</u>	<u>Rp71.539.681.230,00</u>

Jumlah Kewajiban Jangka Pendek Pemerintah Kabupaten Tana Toraja per 31 Desember 2021 dan 2020 adalah sebesar Rp120.273.452.555,07 dan Rp71.539.681.230,00 yang akan dijabarkan pada tabel berikut.

Tabel 5.65 Rincian Kewajiban Jangka Pendek

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Tahun 2021	Tahun 2020
1	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	180.622.312,00	239.123.338,00
2	Bagian Lancar Utang Pemerintah Kabupaten / Kota	7.785.000,00	7.785.000,00
3	Utang Belanja	120.092.126.845,07	71.292.772.892,00
4	Utang Jangka Pendek Lainnya	703.398,00	0,00
Jumlah		120.281.237.555,07	71.539.681.230,00

1) Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	2021	2020
	<u>Rp180.622.312,00</u>	<u>Rp239.123.338,00</u>

Utang Pemotongan PPH/PPN Pemerintah Kabupaten Tana Toraja merupakan utang pemerintah atas pemotongan PPh/PPN Pusat yang belum disetor ke kas negara per 31 Desember 2021 sebesar Rp180.622.312,00 dengan rincian sebagai berikut:



Tabel 5.66 Rincian Utang PFK

(dalam rupiah)

No.	Nama OPD	Tahun 2021	Tahun 2020
1	Dinas Pendidikan		17.587.177,00
2	Dinas Kesehatan		0,00
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		23.878.011,00
4	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran		2.600.000,00
5	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	90.000,00	130.850,00
6	Sekretariat Daerah	71.569.216,00	125.531.532,00
7	Kecamatan Sangalla Utara		1.137.773,00
8	Kecamatan Saluputti		
9	Kecamatan Kurra		12.268.419,00
10	Kecamatan Masanda		2.083.473,00
11	Kecamatan Mappak		
12	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	21.376.408,00	
13	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	87.586.688,00	53.906.103,00
Jumlah		180.622.312,00	239.123.338,00

2) Bagian Lancar	2021	2020
Utang Pemerintah	<u>Rp7.785.000,00</u>	<u>Rp7.785.000,00</u>
Kabupaten/Kota		

Jumlah Utang kepada Pemerintah Kabupaten Toraja Utara per 31 Desember 2021 sebesar Rp7.785.000,00 dengan rincian pada **Lampiran 18**. Bagian lancar utang Pemerintah Kabupaten/Kota adalah utang jasa giro dan utang penerimaan BPHTB ke Kabupaten Toraja Utara.

3) Utang Belanja	2021	2020
	<u>Rp120.092.126.845,07</u>	<u>Rp71.292.772.892,00</u>

Utang Belanja Pemerintah Kabupaten Tana Toraja per 31 Desember 2021 dan 2020 adalah sebesar Rp120.092.126.845,07 dan Rp71.292.772.892,00. Pada Tahun Anggaran 2020 utang belanja terdiri dari utang belanja pada RSUD Lakipadada sebesar Rp3.845.981.220,00 dan Utang Kepada Pihak Ketiga sebesar Rp67.446.791.672,00. Utang Belanja dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.67 Rincian Utang Belanja

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Tahun 2021	Tahun 2020
1	Utang Belanja Pegawai	988.540.754,55	
2	Utang Belanja Barang dan Jasa	39.625.465.734,52	71.292.772.892,00
3	Utang Belanja Modal	79.478.120.356,00	
Jumlah		120.092.126.845,07	71.292.772.892,00

4) Utang Jangka Pendek Lainnya	2021	2020
	<u>Rp703.398,00</u>	<u>Rp0,00</u>

Utang Jangka pendek lainnya merupakan utang yang timbul dari kelebihan pembayaran PBB-P2 Tahun Anggaran 2021 senilai Rp703.398,00.

b. Kewajiban Jangka Panjang	2021	2020
	<u>Rp0,00</u>	<u>Rp0,00</u>

Jumlah Kewajiban Jangka Panjang Pemerintah Kabupaten Tana Toraja per 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp0,00. Tidak terdapat kewajiban jangka panjang pada Kabupaten Tana Toraja.



3. Ekuitas	2021	2020
	Rp3.376.529.201.902,93	Rp3.329.054.741.771,90

Jumlah Ekuitas Dana Pemerintah Kabupaten Tana Toraja per 31 Desember 2021 dan 2020 adalah sebesar Rp3.376.529.201.902,93 dan Rp3.329.054.741.771,90.

5.4 Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Operasional

Laporan Operasional menyediakan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan Pemerintah Kabupaten Tana Toraja yang tercerminkan dalam pendapatan-LO, beban, dan surplus/defisit-operasional dari suatu entitas pelaporan yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya.

1. Pendapatan – LO	2021	2020
	Rp1.002.966.867.966,96	Rp1.126.357.317.169,75

Jumlah Pendapatan-LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 2020 adalah sebesar Rp1.002.966.867.966,96 dan Rp1.126.357.317.169,75. Pendapatan tersebut dirinci sebagai berikut.

Tabel 5.68 Rincian Pendapatan LO

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Saldo Tahun 2021	Saldo Tahun 2020
	KEGIATAN OPERASIONAL		
	PENDAPATAN		
1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH		
a)	Pendapatan Pajak Daerah	13.541.613.984,00	11.785.834.918,50
b)	Pendapatan Retribusi Daerah	6.748.524.688,00	7.126.938.753,75
c)	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	8.489.122.352,00	8.599.872.702,00
d)	Lain-lain PAD yang Sah	75.644.005.034,96	77.095.870.772,94
	Jumlah Pendapatan Asli Daerah	104.423.266.058,96	104.608.517.147,19
2.	PENDAPATAN TRANSFER		
a.	Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan		
1)	Dana Bagi Hasil Pajak	14.343.536.807,00	11.426.556.537,00
2)	Dana Bagi Hasil Bukan Pajak(Sumber Daya Alam)	8.240.585.642,00	4.125.943.519,00
3)	Dana Alokasi Umum	537.030.126.000,00	544.504.787.000,00
4)	Dana Alokasi Khusus	194.616.962.177,00	88.403.498.410,00
	Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan	754.231.210.626,00	648.460.785.466,00
b.	Transfer Pemerintah Pusat Lainnya		
1)	Dana Penyesuaian		109.331.348.239,00
2)	Dana Desa	0,00	123.466.390.025,00
	Jumlah Pendapatan Transfer Pusat Lainnya	0,00	232.797.738.264,00
c.	Pendapatan Transfer Antar Daerah		
1)	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	55.448.778.022,00	38.535.511.254,56
2)	Bantuan Keuangan	4.218.372.000,00	38.966.470.400,00
	Jumlah Pendapatan Transfer Antar Daerah	59.667.150.022,00	38.966.470.400,00
	Jumlah Pendapatan Transfer	813.898.360.648,00	920.224.994.130,00
3	PENDAPATAN LAIN-LAIN YANG SAH		
a)	Pendapatan Hibah	28.101.016.487,00	62.988.294.638,00
b)	Lain - Lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang - Undangan – LO	56.544.224.773,00	38.535.511.254,56
	Jumlah Pendapatan Lain-lain Yang Sah	84.645.241.260,00	101.523.805.892,56
	JUMLAH PENDAPATAN	1.002.966.867.966,96	1.126.357.317.169,75

Pendapatan Asli Daerah merupakan Pendapatan-LO yang diperoleh diperoleh dirinci sebagai berikut.

1. Pendapatan Asli Daerah	2021	2020
	Rp104.423.266.058,96	Rp104.608.517.147,19



a. Pendapatan Pajak Daerah **2021** **2020**
Rp13.541.613.984,00 **Rp11.785.834.918,50**

Pendapatan Pajak Daerah adalah Pendapatan-LO yang diperoleh dari penerimaan pajak daerah yang sudah menjadi hak Pemerintah Kabupaten Tana Toraja sampai dengan 31 Desember 2021, saldo Pendapatan Pajak Daerah-LO sebesar Rp13.541.613.984,00 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.69 Rincian Pendapatan Pajak Daerah-LO

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Saldo Tahun 2021	Saldo Tahun 2020	Kenaikan/ Penurunan	%
1	Pajak Hotel-LO	306.172.539,00	304.003.100,00	2.169.439,00	0,71
2	Pajak Restoran-LO	1.492.679.516,00	321.597.605,00	1.171.081.911,00	364,15
3	Pajak Hiburan-LO	15.232.000,00	16.025.320,00	(793.320,00)	(4,95)
4	Pajak Reklame-LO	1.153.301.973,00	770.827.923,00	382.474.050,00	49,62
5	Pajak Penerangan Jalan-LO	5.203.216.323,00	4.887.584.500,00	315.631.823,00	6,46
6	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan - LO	653.786.981,00	1.109.684.340,00	(455.897.359,00)	(41,08)
7	Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan – LO	3.239.698.702,00	3.151.285.651,00	88.413.051,00	2,81
8	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) – LO	1.477.525.950,00	1.224.826.479,50	252.699.470,50	20,63
Jumlah		13.541.613.984,00	11.785.834.918,50	1.755.779.065,50	14,90

b. Pendapatan Retribusi Daerah **2021** **2020**
Rp6.748.524.688,00 **Rp7.126.938.753,75**

Pendapatan Retribusi Daerah adalah Pendapatan-LO yang diperoleh dari Penerimaan Retribusi Daerah yang sudah menjadi hak Pemerintah Kabupaten Tana Toraja sampai dengan 31 Desember 2021. Pendapatan Retribusi Daerah-LO sebesar Rp6.748.524.688,00 dirinci sebagai berikut.

Tabel 5.70 Rincian Pendapatan Retribusi Daerah-LO

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Saldo Tahun 2021	Saldo Tahun 2020	Kenaikan/ Penurunan	%
1	Retribusi Pelayanan Kesehatan	589.258.500,00		589.258.500,00	
2	Retribusi Pelayanan Persampahan/ kebersihan – LO	94.115.000,00	959.377.347,00	(865.262.347,00)	(90,19)
3	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum – LO	7.500.000,00	90.570.000,00	(83.070.000,00)	(91,72)
4	Retribusi Pelayanan Pasar – LO	341.146.000,00	318.351.000,00	22.795.000,00	7,16
5	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor – LO		130.200.000,00	(130.200.000,00)	(100,00)
6	Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus – LO	72.250.000,00	79.250.000,00	(7.000.000,00)	(8,83)
7	Retribusi Pelayanan Tera Ulang-LO		(11.122.500,00)	11.122.500,00	(100,00)
8	Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi	196.064.080,00	136.515.200,00	59.548.880,00	43,62
9	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah – LO	554.099.550,00	346.080.425,00	208.019.125,00	60,11
10	Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan-LO	95.276.575,00		95.276.575,00	
11	Retribusi Terminal – LO	46.788.000,00	91.281.000,00	(44.493.000,00)	(48,74)
12	Retribusi Tempat Khusus Parkir –LO	5.500.000,00	67.080.000,00	(61.580.000,00)	(91,80)
13	Retribusi Rumah Potong Hewan – LO	2.757.900.000,00	2.451.320.000,00	306.580.000,00	12,51
14	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah raga- LO	774.289.000,00	1.465.302.500,00	(691.013.500,00)	(47,16)
15	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan – LO	1.211.527.983,00	981.232.781,75	230.295.201,25	23,47
16	Retribusi Izin Trayek – LO	2.810.000,00	21.501.000,00	(18.691.000,00)	(86,93)
Jumlah		6.748.524.688,00	7.126.938.753,75	(378.414.065,75)	(5,31)



c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	2021	2020
	Rp8.489.122.352,00	Rp8.599.872.702,00

Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO sampai 31 Desember 2021 sebesar Rp8.489.122.352,00 merupakan deviden atas Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Tana Toraja di Bank Sulselbar berdasarkan Akta RUPS Luar Biasa Nomor 47 tanggal 26 Maret 2021.

d. Lain-lain PAD yang Sah	2021	2020
	Rp75.644.005.034,96	Rp77.095.870.772,94

Lain-lain PAD yang Sah-LO sampai dengan 31 Desember 2021 sebesar Rp75.644.005.034,96 sebagai berikut.

Tabel 5.71 Rincian Lain-lain PAD yang Sah-LO

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Saldo Tahun 2021	Saldo Tahun 2020
1	Hasil Penjual BMD Yang Tidak Dipisahkan – LO	411.275.700,00	0,00
2	Jasa Giro – LO	3.623.778.997,00	2.655.284.929,00
3	Pendapatan Bunga – LO	673.287.669,00	1.733.219.177,00
4	Penerimaan Atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah – LO	17.492.373.630,00	0,00
5	Pendapatan Denda Retribusi Daerah – LO	0,00	0,00
6	Pendapatan dari Pengembalian – LO	280.067.300,55	1.313.294.406,00
7	Pendapatan BLUD – LO	53.163.172.369,41	57.720.642.827,48
8	Pendapatan JKN – LO	0,00	0,00
9	Hasil Penjualan Aset Lainnya – LO	0,00	92.369.000,00
10	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah – LO	0,00	(2.985.984.548,54)
11	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan – LO	0,00	468.137.817,00
12	Pendapatan Denda Pajak – LO	49.369,00	4.389.607,00
13	Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum – LO	0,00	27.600.000,00
14	Dana Kapitasi – LO	0,00	12.066.917.558,00
15	Pendapatan dari Pengembalian Dana Tidak Terduga	0,00	4.000.000.000,00
	Jumlah	75.644.005.034,96	77.095.870.772,94

2. Pendapatan Transfer	2021	2020
	Rp813.898.360.648,00	Rp920.224.994.130,00

Pada tahun 2021 dan 2020 Pemerintah Kabupaten Tana Toraja menyajikan pendapatan transfer sebesar Rp813.898.360.648,00 dan Rp920.224.994.130,00. Pendapatan transfer akan dijabarkan sebagai berikut.

a. Dana Perimbangan-Dana Bagi Hasil Pajak	2021	2020
	Rp14.343.536.807,00	Rp11.426.556.537,00

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat dana Perimbangan dari Dana Bagi Hasil Pajak - LO sampai dengan 31 Desember 2021 sebesar Rp14.343.536.807,00 yang akan dijelaskan pada tabel berikut.

Tabel 5.72 Rincian Bagi Hasil Pajak Pemerintah Pusat-LO

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Saldo Tahun 2021	Saldo Tahun 2020
1	DBH Pajak Bumi dan Bangunan	7.636.595.867,00	3.680.137.935,00
2	DBH PPh Pasal 21	6.359.502.300,00	7.243.983.989,00
3	DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPDN	347.438.640,00	502.434.613,00
	Jumlah	14.343.536.807,00	11.426.556.537,00



b. Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam)-LO	2021	2020
	Rp8.240.585.642,00	Rp4.125.943.519,00

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat dana Perimbangan dari Dana Bagi Hasil Bukan Pajak-LO sampai dengan 31 Desember 2021 sebesar Rp8.240.585.642,00 sebagai berikut.

Tabel 5.73 Rincian Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam) - LO
 (dalam rupiah)

No.	Uraian	Saldo Tahun 2021	Saldo Tahun 2020
1	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Minyak Bumi	200,00	91.656,00
2	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Gas Bumi	1.195.798.368,00	289.197.800,00
3	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Landrent	214.000,00	0,00
4	Dana Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Royalty	4.790.021.181,00	3.020.001.352,00
5	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan- Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)	540.908.819,00	28.376.422,00
6	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Perikanan	1.528.019.575,00	788.276.289,00
7	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	185.623.499,00	0,00
	Jumlah	8.240.585.642,00	4.125.943.519,00

c. Dana Perimbangan- Dana Alokasi Umum- LO	2021	2020
	Rp537.030.126.000,00	Rp544.504.787.000,00

Jumlah Dana Alokasi Umum (DAU) Pemerintah Kabupaten Tana Toraja periode yang berakhir 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp537.030.126.000,00 dan Rp544.504.787.000,00 yang merupakan pendapatan Transfer-LO berupa DAU dari Pemerintah Pusat yang menjadi hak Pemerintah Kabupaten Tana Toraja Tahun Anggaran 2021.

d. Dana Perimbangan- Dana Alokasi Khusus -LO	2021	2020
	Rp194.616.962.177,00	Rp88.403.498.410,00

Jumlah Dana Alokasi Khusus -LO Pemerintah Kabupaten Tana Toraja untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp194.616.962.177,00 dan Rp88.403.498.410,00 yang akan dijelaskan pada tabel berikut.

Tabel 5.74 Rincian Dana Alokasi Khusus-LO

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Saldo Tahun 2021	Saldo Tahun 2020
	Dana Alokasi Khusus Fisik		
1	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD	13.769.201.000,00	
2	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP	1.421.494.400,00	
3	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-Perpustakaan Daerah	9.276.448.000,00	
4	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kesehatan Dasar	7.757.049.980,00	31.133.727.516,00
5	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kesehatan Rujukan	26.671.178.870,00	
6	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kefarmasian	2.251.166.005,00	
7	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Penguatan Intervensi Stunting	2.015.944.600,00	
8	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-KB	1.909.606.700,00	
9	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Penurunan Stunting (KB)	43.100.000,00	
10	DAK Fisik-Bidang Pertanian-Penugasan-Pembangunan/Renovasi Sarana dan Prasarana Fisik Dasar Pembangunan Pertanian	4.201.138.800,00	1.108.000.000,00
11	DAK Bidang Pendidikan		19.572.385.000,00
12	DAK Bidang Perumahan dan Pemukiman		3.520.843.000,00



No.	Uraian	Saldo Tahun 2021	Saldo Tahun 2020
13	DAK Fisik-Bidang Kelautan dan Perikanan-Penugasan	961.531.000,00	1.067.649.183,00
14	DAK Fisik-Bidang Pariwisata-Penugasan	2.277.281.586,00	3.828.762.629,00
15	DAK Fisik-Bidang Jalan-Reguler-Jalan	14.084.097.750,00	21.596.354.000,00
16	DAK Fisik-Bidang Jalan-Penugasan-Jalan	9.365.185.600,00	
17	DAK Fisik-Bidang Air Minum-Penugasan	5.786.314.456,00	1.177.262.782,00
18	DAK Fisik-Bidang Sanitasi-Penugasan	2.641.118.000,00	4.117.621.000,00
19	DAK Fisik-Bidang Irigasi-Penugasan	1.908.281.000,00	1.280.893.300,00
20	DAK Fisik-Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan-Penugasan-Lingkungan Hidup	1.864.900.000,00	
Jumlah Dana Alokasi Khusus Fisik		108.205.037.747,00	88.403.498.410,00
Dana Alokasi Khusus Non Fisik			
1	DAK Non Fisik-Tambahan Penghasilan Guru PNSD-LO	70.182.483.000,00	
2	Tunjangan Profesi Guru-LO		
3	DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD-LO	804.000.000,00	
4	DAK Non Fisik-TKG PNSD-LO	6.061.497.000,00	
5	DAK Non Fisik-BOP PAUD-LO	3.023.700.000,00	
6	Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan-LO	1.158.400.000,00	
7	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK-LO	0,00	
8	DAK Non Fisik-BOKKB-Pengawasan Obat dan Makanan-LO	0,00	
9	DAK Non Fisik-BOKKB-Akreditasi Puskesmas-LO	0,00	
10	DAK Non Fisik-BOKKB-Jaminan Persalinan-LO	0,00	
11	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB-LO	1.944.349.549,00	
12	DAK Non Fisik- Peningkatan Kapasitas Koperasi dan UKM (PK2UKM)-LO	383.025.000,00	
13	DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan-LO	1.029.282.381,00	
14	DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Kepariwisata-LO	861.437.500,00	
15	DAK Non Fisik-Dana Bantuan BLPS-LO	963.750.000,00	
Jumlah Dana Alokasi Khusus Non Fisik		86.411.924.430,00	0,00
JUMLAH DANA ALOKASI KHUSUS		194.616.962.177,00	88.403.498.410,00

3. Transfer Antar Daerah	2021	2020
– LO	Rp59.667.150.022,00	Rp77.501.981.654,56
a. Pendapatan Bagi Hasil - LO	2021	2020
	Rp55.448.778.022,00	Rp38.966.470.400,00

Jumlah Keuangan dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp55.448.778.022,00 dan Rp38.966.470.400,00.

Tabel 5.75 Rincian Bagi Hasil Pajak Pemerintah Provinsi - LO

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Saldo Tahun 2021	Saldo Tahun 2020
1	Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	12.153.727.451,00	7.714.036.348,00
2	Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	8.350.671.274,00	4.917.665.669,00
3	Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	15.504.123.765,00	10.170.270.147,00
4	Bagi Hasil Pajak Air Permukaan	720.833.835,00	183.968.391,00
5	Bagi Hasil Pajak Rokok	18.719.421.697,00	15.280.206.153,56
6	Bagi Hasil Bea Cukai dari Hasil Tembakau-LO		178.658.130,00
7	Bagi Hasil Getah Pinus – LO		90.706.416,00
Jumlah		55.448.778.022,00	38.535.511.254,56

b. Bantuan Keuangan	2021	2020
	Rp4.218.372.000,00	Rp38.966.470.400,00

Jumlah Keuangan dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp4.218.372.000,00 dan Rp38.966.470.400,00.



4. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah - LO	2021	2020
	Rp84.645.241.260,00	Rp62.988.294.638,00

a. Pendapatan Hibah	2021	2020
	Rp28.101.016.487,00	Rp19.135.206.657,00

Jumlah Pendapatan Hibah untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp28.101.016.487,00 dan Rp19.135.206.657,00. Pendapatan Hibah tersebut merupakan pendapatan Hibah Jalan Daerah (PHJD) Tahun 2021 dari Pemerintah Pusat senilai Rp28.101.016.487,00.

b. Lain - Lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang - Undangan - LO	2021	2020
	Rp56.544.224.773,00	Rp43.853.087.981,00

Jumlah Lain - Lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang - Undangan - LO untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp56.544.224.773,00 dan Rp43.853.087.981,00, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.76 Rincian Pendapatan Lainnya-LO

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Saldo Tahun 2021	Saldo Tahun 2020
1	Pendapatan Hibah Dana BOS – LO	40.882.473.000,00	43.853.087.981,00
2	Pendapatan atas Pengembalian Hibah - LO	3.154.869.078,00	
3	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP - LO	12.506.882.695,00	
	JUMLAH	56.544.224.773,00	43.853.087.981,00

2. BEBAN	2021	2020
	Rp1.161.998.091.883,65	Rp1.035.069.857.831,32

Pada tahun 2021 dan 2020 Pemerintah Kabupaten Tana Toraja menyajikan angka Beban pada laporan operasional sebesar Rp1.161.998.091.883,65 dan Rp1.035.069.857.831,32.

1) Beban Pegawai	2021	2020
	Rp440.418.572.040,00	Rp386.398.392.752,00

Jumlah Beban Pegawai pada periode yang berakhir 31 Desember 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp440.418.572.040,00 dan Rp386.398.392.752,00. Beban pegawai merupakan kompensasi terhadap pegawai baik dalam bentuk uang atau barang, yang harus dibayarkan kepada pejabat negara, pegawai negeri sipil, dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah daerah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan, kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Tabel 5.77 Rincian Beban Pegawai - LO

(dalam rupiah)

No.	Uraian Jenis Beban	Tahun 2021	Tahun 2020
1	Beban Gaji dan Tunjangan ASN- LO	295.932.629.845,00	296.846.004.396,00
2	Beban Tambahan Penghasilan ASN – LO	103.934.821.997,00	85.807.221.999,00
3	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN – LO	487.606.600,00	0,00
4	Beban Gaji dan Tunjangan DPRD – LO	12.132.410.158,00	0,00
5	Beban Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH – LO	166.000.470,00	0,00
6	Beban Penerimaan lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD serta KDH/WKDH- LO	701.440.000,00	2.828.000.000,00
7	Beban Pegawai BLUD – LO	27.063.662.970,00	
8	Insentif Pemungutan Pajak Daerah	0,00	327.626.928,00
9	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	0,00	397.597.429,00
10	Uang Lembur-LO	0,00	191.942.000,00
	Jumlah Beban Pegawai	440.418.572.040,00	386.398.392.752,00



2)	Beban Barang dan Jasa	2021	2020
		Rp254.644.573.326,17	Rp235.922.570.958,75

a.	Beban Persediaan	2021	2020
		Rp109.894.415.317,17	Rp20.075.176.172,70

Beban persediaan pada tahun 2021 dan 2020 adalah sebesar Rp109.894.415.317,17 dan Rp20.075.176.172,70. Beban persediaan diakui apabila persediaan telah digunakan. Pendekatan yang digunakan untuk persediaan pada Kabupaten Tana Toraja adalah pendekatan aset. Dimana seluruh persediaan yang dibeli diakui semua bebannya. Kemudian saat akhir tahun, dilakukan penilaian kembali atas persediaan. Apabila masih terdapat nilai persediaan, maka harus dilakukan pengurangan beban di akhir tahun.

Tabel 5.78 Rincian Beban Persediaan – LO

(dalam rupiah)

No.	Uraian Jenis Beban	Tahun 2021	Tahun 2020
1	Beban Bahan Pakai Habis		3.583.236.973,00
2	Beban Barang	36.660.145.291,60	
3	Beban Persediaan Bahan/ Material	0,00	6.602.830.926,70
4	Beban Cetak dan Penggandaan		1.428.616.120,00
5	Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	7.104.133.330,00	8.460.492.153,00
6	Beban Barang dan Jasa BOS	44.020.257.690,00	
7	Beban Barang dan Jasa BLUD	22.109.879.005,57	
	Jumlah Beban Persediaan	109.894.415.317,17	20.075.176.172,70

b.	Beban Jasa	2021	2020
		Rp104.033.554.741,00	Rp190.553.232.010,05

Jumlah Beban Jasa untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp104.033.554.741,00 dan Rp190.553.232.010,05. Beban Jasa merupakan penurunan manfaat ekonomi dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban akibat transaksi pengadaan barang dan jasa yang habis pakai, perjalanan dinas, pemeliharaan termasuk pembayaran honorarium kegiatan kepada non pegawai dan pemberian hadiah atas kegiatan tertentu terkait dengan suatu prestasi. Rincian Beban Jasa Tahun 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut.

Tabel 5.79 Rincian Beban Jasa - LO

(dalam rupiah)

No.	Uraian Jenis Beban	Tahun 2021	Tahun 2020
1	Beban Jasa Kantor	67.718.648.371,00	6.776.464.517,00
2	Belanja Premi Asuransi	27.861.529.501,00	21.663.345.309,00
3	Beban Sewa Tanah	485.403.850,00	
4	Beban Sewa Rumah /Gedung/Gudang/Parkir	434.918.000,00	171.350.000,00
5	Beban Sewa Sarana Mobilitas		69.008.500,00
6	Beban Sewa Alat Berat		
7	Beban Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor		299.800.000,00
8	Beban Sewa Peralatan dan Mesin	281.614.318,00	
9	Beban Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi	18.000.000,00	
10	Beban Makanan dan Minuman		7.525.079.250,00
11	Beban Pakaian Dinas dan Atributnya		772.622.000,00
12	Beban Pakaian Kerja		47.200.000,00
13	Beban Pakaian Khusus dan Hari-hari Tertentu		319.000.000,00
14	Beban Jasa Konsultansi Konstruksi	3.864.816.200,00	1.033.561.300,00
15	Beban Jasa Konsultansi Non Konstruksi	49.962.000,00	
16	Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (<i>Availability Payment</i>)	88.996.600,00	
17	Beban Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga		
18	Beban Beasiswa Pendidikan PNS	374.000.000,00	207.000.000,00
19	Beban Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	2.511.084.000,00	175.245.900,00
20	Beban Honorarium PNS		17.892.119.089,00
21	Beban Honorarium Non PNS		361.990.000,00
22	Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah	282.317.615,00	
23	Beban Barang Dana BOS		25.038.694.690,00



No.	Uraian Jenis Beban	Tahun 2021	Tahun 2020
24	Beban Barang Tanggap Darurat		91.990.000,00
25	Belanja Jasa Pihak Ketiga		35.765.156.915,00
26	Beban Operasional Manajemen Mutu		0,00
27	Beban Pegawai BLUD RSUD		32.616.486.483,00
28	Belanja Barang dan Jasa BLUD RSUD	62.264.286,00	21.999.222.196,05
29	Belanja Operasional Penyelenggaraan PAUD		21.000.000,00
30	Beban Operasional Kesehatan		575.850.800,00
31	Beban Buku Putusan Pengadilan		500.000,00
32	Beban Pegawai BOK		4.279.681.792,00
33	Beban Pegawai JKN		213.837.000,00
34	Belanja Barang dan Jasa BOK		9.256.422.650,00
35	Belanja Barang dan Jasa JKN		3.380.603.619,00
	Jumlah Beban Jasa	104.033.554.741,00	190.553.232.010,05

c. Beban Pemeliharaan	2021	2020
	<u>Rp7.340.014.823,00</u>	<u>Rp8.507.816.034,00</u>

Beban Pemeliharaan untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp7.340.014.823,00 dan Rp8.507.816.034,00 adalah sebagai berikut.

Tabel 5.80 Rincian Beban Pemeliharaan - LO

(dalam rupiah)

No.	Uraian Jenis Beban	Tahun 2021	Tahun 2020
1	Beban Pemeliharaan		5.022.213.194,00
2	Belanja Pemeliharaan Tanah	90.000.000,00	
3	Beban Perawatan Kendaraan Bermotor		3.485.602.840,00
4	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	3.106.759.073,00	
5	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	1.922.392.560,00	
6	Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	2.205.813.190,00	
7	Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	50.000,00	
8	Beban Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud – <i>Software</i>	15.000.000,00	
	Jumlah Beban Pemeliharaan	7.340.014.823,00	8.507.816.034,00

d. Beban Perjalanan Dinas	2021	2020
	<u>Rp33.376.588.445,00</u>	<u>Rp16.786.346.742,00</u>

Beban Perjalanan Dinas untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp33.376.588.445,00 dan Rp16.786.346.742,00.

3. Beban Subsidi	2021	2020
	<u>Rp1.373.697.200,00</u>	<u>Rp1.500.000.000,00</u>

Beban Subsidi untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp1.373.697.200,00 dan Rp1.500.000.000,00.

4. Beban Hibah	2021	2020
	<u>Rp 227.124.683.342,56</u>	<u>Rp49.531.796.000,00</u>

Beban Hibah untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp227.124.683.342,56 dan Rp49.531.796.000,00. Penambahan senilai Rp209.063.255.076,56 merupakan hibah Jalan dan Jembatan Desa Kepada Pemerintah Lembang (SK Penghapusan No. 340/XII/Tahun 2021). Beban Hibah merupakan Beban pemerintah dalam bentuk uang/barang atau jasa kepada pemerintah lainnya, perusahaan negara/daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat.



5. Beban Bantuan Sosial	2021	2020
	Rp819.294.800,00	Rp18.000.000,00

Beban Bantuan Sosial Tahun 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp819.294.800,00 dan Rp18.000.000,00. Beban bantuan sosial merupakan beban pemerintah dalam bentuk uang/barang atau jasa kepada masyarakat untuk menghindari terjadinya risiko sosial dan bersifat selektif.

6. Beban Penyusutan	2021	2020
	Rp161.008.957.795,28	Rp165.124.715.833,88

Jumlah Beban Penyusutan untuk Tahun 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp161.008.957.795,28 dan Rp165.124.715.833,88. Beban Penyusutan adalah merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan.

Tabel 5.81 Rincian Beban Penyusutan – LO

(dalam rupiah)

No.	Uraian Jenis Beban	Tahun 2021
1	Tanah	0,00
2	Peralatan dan Mesin	39.526.122.695,11
3	Gedung dan Bangunan	12.382.174.812,00
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	109.100.660.288,17
5	Aset Tetap Lainnya	0,00
Jumlah Beban Penyusutan		161.008.957.795,28

7. Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud Lainnya	2021	2020
	Rp203.006.600,00	Rp8.669.461.690,00

Jumlah Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud Lainnya untuk Tahun 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp203.006.600,00 dan Rp8.669.461.690,00.

Tabel 5.82 Rincian Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud Lainnya – LO

(dalam rupiah)

No.	Uraian Jenis Beban	Tahun 2021
1	Sekretariat Daerah	9.482.000,00
2	Dinas Komunikasi dan Informatika	24.816.000,00
3	Dinas Kesehatan	9.988.000,00
4	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	3.495.000,00
5	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	3.993.000,00
6	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	2.689.500,00
7	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	56.627.300,00
8	Badan Pendapatan Daerah	39.945.500,00
9	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	18.082.900,00
10	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	33.887.400,00
Jumlah		203.006.600,00

8. Beban Penyisihan Piutang	2021	2020
	Rp15.157.883.784,64	Rp1.010.509.398,69

Beban Piutang merupakan beban untuk mencatat estimasi ketidaktertagihan piutang dalam suatu periode. Jumlah Beban Piutang untuk Tahun 2021 dan 2020 adalah masing-masing Rp15.157.883.784,64 dan Rp1.010.509.398,69.

Tabel 5.83 Rincian Beban Penyisihan Piutang - LO

(dalam rupiah)

No.	Uraian Jenis Beban	Tahun 2021	Tahun 2020
1	Beban Penyisihan Piutang Pajak	36.006.604,82	309.374.363,69
2	Beban Penyisihan Piutang Retribusi	106.526.265,00	701.135.035,00
3	Beban Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang Sah	14.971.230.742,67	-
4	Beban Penyisihan Piutang Transfer Pemerintah Provinsi	44.120.172,15	-
Jumlah Beban Penyisihan Piutang		15.157.883.784,64	1.010.509.398,69



9. Beban Transfer	2021	2020
	Rp 57.009.409.495,00	Rp186.894.411.198,00

Beban Transfer Pemerintah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp57.009.409.495,00 dan Rp186.894.411.198,00 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.84 Rincian Beban Transfer - LO

(dalam rupiah)

No.	Uraian Jenis Beban	Tahun 2021	Tahun 2020
1	Beban Bantuan Keuangan Daerah Provinsi ke Kabupaten	0,00	
2	Beban Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	56.764.811.068,00	
3	Beban Transfer Bagi Hasil Pajak	244.598.427,00	332.377.150,00
4	Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Desa		185.899.481.600,00
5	Beban Transfer Bantuan Keuangan kepada Partai Politik		662.552.448,00
	Jumlah Beban Transfer	57.009.409.495,00	186.894.411.198,00

10. Beban Lain-lain	2021	2020
	Rp4.238.013.500,00	Rp0,00

Beban Lain-lain merupakan beban untuk mencatat penurunan nilai investasi jangka panjang non permanen berupa penyisihan piutang pinjaman ternak. Jumlah Beban Lain-lain yang dicatat pada TA 2021 dan 2020 senilai Rp4.238.013.500,00 dan Rp0,00.

3. Surplus/defisit dari kegiatan non operasional	2021	2020
	Rp87.047.859.772,48	Rp80.643.741.428,39

Jumlah surplus/defisit dari kegiatan non operasional untuk Tahun 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp87.047.859.772,48 dan Rp80.643.741.428,39. Surplus tersebut untuk mencatat mutasi tambah dan mutasi kurang aset.

a. Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	2021	2020
	(Rp87.047.859.772,48)	Rp80.643.741.428,39

Jumlah Surplus/Defisit dari kegiatan Non Operasional Lainnya untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2021 dan 2020 adalah sebesar Rp(87.047.859.772,48) dan Rp80.643.741.428,39.

4. Beban Luar Biasa	2021	2020
	Rp2.959.742.350,00	Rp265.394.279.624,33

Jumlah Beban Luar Biasa untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2021 dan 2020 adalah sebesar Rp2.959.742.350,00 dan Rp265.394.279.624,33. Beban ini merupakan beban tidak terduga yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Tana Toraja pada tahun berjalan.

5. Surplus/defisit LO	2021	2020
	(Rp74.943.106.000,52)	(Rp210.960.599.044,29)

Pada tahun 2021 dan tahun 2020 surplus defisit LO disajikan sebesar – (Rp74.943.106.000,52) dan sebesar (Rp210.960.599.044,29).



5.5. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Arus Kas

1. Arus Kas dari	2021	2020
Aktivitas Operasi	Rp207.668.469.924,39	Rp211.967.145.418,70

Kas Bersih diperoleh dari aktivitas operasi Pemerintah Kabupaten Tana Toraja pada Tahun Anggaran 2021 dan 2020 adalah sebesar Rp207.668.469.924,39 dan Rp211.967.145.418,70 yang terdiri dari:

Tabel 5.85 Rincian Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Tahun 2021	Tahun 2020
1	Arus Masuk Kas	1.101.965.490.752,96	1.132.684.863.534,75
2	Arus Keluar Kas	894.297.020.828,57	920.717.718.116,05
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi		207.668.469.924,39	211.967.145.418,70

a. Arus Masuk Kas	2021	2020
	Rp1.101.965.490.752,96	Rp1.132.684.863.534,75

Arus Masuk Kas yang diperoleh Pemerintah Kabupaten Tana Toraja selama Tahun Anggaran 2021 dan 2020 dari aktivitas operasi adalah sebesar Rp1.101.965.490.752,96 dan Rp1.132.684.863.534,75 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.86 Rincian Arus Masuk Kas dari Aktivitas Operasi

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Tahun 2021	Tahun 2020
1	Penerimaan Pajak Daerah	13.007.460.300,00	11.028.317.168,50
2	Penerimaan Retribusi Daerah	7.803.351.613,00	7.163.530.253,75
3	Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	8.489.122.352,00	8.599.872.702,00
4	Penerimaan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	58.171.955.008,96	84.144.343.387,94
5	Dana Perimbangan	754.231.210.626,00	757.792.133.705,00
6	Dana Desa	124.774.034.000,00	123.466.390.025,00
7	Pendapatan Bagi Hasil	46.624.743.593,00	38.535.511.254,56
8	Bantuan Keuangan	4.218.372.000,00	38.966.470.400,00
9	Pendapatan Hibah	28.101.016.487,00	62.988.294.638,00
10	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	56.544.224.773,00	
Jumlah Arus Masuk Kas		1.101.965.490.752,96	1.132.684.863.534,75

b. Arus Keluar Kas	2021	2020
	Rp894.297.020.828,57	Rp920.717.718.116,05

Arus Kas Keluar yang dialokasikan Pemerintah Kabupaten Tana Toraja selama Tahun Anggaran 2021 dan 2020 untuk aktivitas operasi adalah sebesar Rp894.297.020.828,57 dan Rp920.717.718.116,05 dengan perincian sebagai berikut

Tabel 5.87 Rincian Arus Keluar Kas untuk Aktivitas Operasi

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Tahun 2021	Tahun 2020
1	Pembayaran Pegawai	440.418.572.040,00	441.762.507.116,00
2	Pembayaran Barang dan Jasa	248.283.221.027,57	170.993.682.474,05
3	Pembayaran Subsidi	1.373.697.200,00	1.500.000.000,00
4	Pembayaran Hibah	18.061.428.266,00	63.034.017.328,00
5	Pembayaran Bantuan Sosial	819.294.800,00	18.000.000,00
6	Pembayaran Bantuan Keuangan	181.538.845.068,00	186.562.034.048,00
7	Pembayaran Tak Terduga	3.557.364.000,00	56.515.100.000,00
8	Transfer Bagi Hasil Pajak ke Kabupaten/Kota	244.598.427,00	332.377.150,00
Jumlah Arus Keluar Kas		894.297.020.828,57	920.717.718.116,05



2. Arus Kas dari	2021	2020
Aktivitas Investasi	(Rp154.993.219.151,00)	(Rp191.525.186.723,53)

Kas Bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi/investasi aset non keuangan Pemerintah Kabupaten Tana Toraja pada Tahun Anggaran 2021 dan 2020 adalah sebesar (Rp154.993.219.151,00) dan (Rp191.525.186.723,53) yang terdiri dari rincian berikut.

Tabel 5.88 Rincian Arus Kas Bersih untuk Aktivitas Investasi/ Investasi Aset Non Keuangan

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Tahun 2021	Tahun 2020
1	Arus Masuk Kas	411.275.700,00	0,00
2	Arus Keluar Kas	155.404.494.851,00	191.525.186.723,53
Arus Kas Bersih untuk Aktivitas Investasi		(154.993.219.151,00)	(191.525.186.723,53)

a. Arus Masuk Kas	2021	2020
	Rp411.275.700,00	Rp0,00

Arus Kas Masuk dari aktivitas investasi aset non keuangan pada Tahun Anggaran 2021 dan 2020 sebesar Rp411.275.700,00 dan Rp0,00. Arus masuk kas berasal dari penjualan atas aset daerah yang tidak dipisahkan senilai Rp411.275.700,00.

b. Arus Keluar Kas	2021	2020
	Rp155.404.494.851,00	Rp191.525.186.723,53

Arus Kas Keluar selama Tahun Anggaran 2021 dan 2020 untuk aktivitas investasi aset non keuangan Pemerintah Kabupaten Tana Toraja adalah sebesar Rp155.404.494.851,00 dan Rp191.525.186.723,53 dengan perincian sebagai berikut.

Tabel 5.89 Rincian Arus Keluar Kas untuk Aktivitas Investasi

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Tahun 2021	Tahun 2020
1	Perolehan Tanah	0,00	0,00
2	Perolehan Peralatan dan Mesin	40.268.649.540,00	37.569.459.855,60
3	Perolehan Gedung & Bangunan	30.161.338.486,00	31.170.135.375,00
4	Perolehan Jalan, Irigasi & Jaringan	84.400.315.825,00	119.144.404.176,93
5	Perolehan Aset Tetap Lainnya	574.191.000,00	3.641.187.316,00
Jumlah Arus Keluar Kas		155.404.494.851,00	191.525.186.723,53

3. Arus Kas dari	2021	2020
Aktivitas	Rp0,00	Rp0,00
Pendanaan		

Kas Bersih yang digunakan untuk aktivitas pendanaan/pembiayaan Pemerintah Kabupaten Tana Toraja pada Tahun Anggaran 2021 dan 2020 adalah sebesar Rp0,00 dan Rp0,00 yang terdiri dari:

a. Arus Kas Masuk	2021	2020
	Rp0,00	Rp0,00

Pemerintah Kabupaten Tana Toraja selama Tahun Anggaran 2020 dan 2019 dari aktivitas pendanaan Arus Kas Masuk yang diperoleh adalah sebesar Rp0,00.

b. Arus Keluar Kas	2021	2020
	Rp0,00	Rp0,00

Arus Keluar Kas yang dialokasikan Pemerintah Kabupaten Tana Toraja selama Tahun Anggaran 2021 dan 2020 untuk aktivitas pendanaan/pembiayaan adalah sebesar Rp0,00 dan Rp0,00 yaitu penambahan penyertaan modal.



4. Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris/Non Anggaran	2021	2020
	(Rp58.501.026,00)	(Rp136.701.748,00)

Kas Bersih yang diperoleh dari aktivitas Transitoris/Non Anggaran Pemerintah Kabupaten Tana Toraja pada Tahun Anggaran 2021 dan 2020 adalah sebesar (Rp58.501.026,00) dan (Rp136.701.748,00). Aktivitas Transitoris/Non Anggaran merupakan aktivitas penerimaan dan pengeluaran perhitungan pihak ketiga (PFK). Aktivitas penerimaan dan pengeluaran perhitungan pihak ketiga terdiri dari penerimaan dan pembayaran Tabungan Perumahan Pegawai (Taperum), Pajak Penghasilan (PPh) 21, PPh 22, PPh 23, PPh Pasal 4, dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas pengadaan barang dan jasa.

Tabel 5.90 Rincian Arus Kas untuk Aktivitas Transitoris/Non Anggaran

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Tahun 2021	Tahun 2020
I	Arus Masuk Kas		
	Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	32.076.630.641,00	239.123.338,00
	Jumlah Arus Masuk Kas	32.076.630.641,00	239.123.338,00
II	Arus Keluar Kas		
	Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	32.135.131.667,00	375.825.086,00
	Jumlah Arus Keluar Kas	32.135.131.667,00	375.825.086,00
	Jumlah Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris	(58.501.026,00)	(136.701.748,00)

5. Kenaikan/ Penurunan Kas	2021	2020
	Rp52.616.749.747,39	Rp20.305.256.947,17

Jumlah kenaikan/penurunan kas selama Tahun Anggaran 2021 dan Tahun Anggaran 2020 adalah Rp52.616.749.747,39 dan Rp20.305.256.947,17.

6. Saldo Awal Kas	2021	2020
	Rp57.137.568.443,40	Rp36.832.311.496,23

Saldo awal kas Tahun Anggaran 2021 dan 2020 merupakan saldo akhir kas tahun sebelumnya yaitu masing-masing senilai Rp57.137.568.443,40 dan Rp36.832.311.496,23.

7. Koreksi SiLPA Tahun Lalu	2021	2020
	(Rp1.454.771.000,00)	Rp0,00

Koreksi SiLPA tahun lalu merupakan koreksi atas kelebihan pencatatan Kas di Bendahara Pengeluaran pada Tahun Anggaran 2020 yang telah disetorkan ke Kas Daerah senilai Rp803.114.000,00. Selanjutnya terdapat pula koreksi atas kelebihan catat kas di Bendahara Penerima tahun sebelumnya dikarenakan uang yang masih ada di kolektor senilai Rp651.657.000,00.

8. Saldo Akhir Kas	2021	2020
	Rp108.299.547.190,79	Rp57.137.568.443,40

Saldo Akhir merupakan jumlah kenaikan/penurunan kas selama Tahun Anggaran 2021 ditambah dengan saldo awal kas di Kasda (Saldo Akhir Kas Tahun Anggaran 2020) yang disajikan sebagai berikut

Tabel 5.91 Rincian Kenaikan/Penurunan Bersih Kas Selama Periode 2021

(dalam rupiah)

Uraian	Tahun Anggaran 2021	Tahun Anggaran 2020
Kenaikan/Penurunan Bersih Kas Selama Periode	52.616.749.747,39	20.305.256.947,17
Saldo Awal Kas di BUD dan Bendahara Pengeluaran	57.137.568.443,40	36.832.311.496,23
Koreksi SiLPA Tahun Lalu	(1.454.771.000,00)	
Saldo Akhir Kas	108.299.547.190,79	57.137.568.443,40



Rincian Saldo Akhir Kas Tahun Anggaran 2021 terdiri dari:

Kas di Kas Daerah	97.195.558.165,46
Kas di Bendahara Penerimaan	682.628.000,00
Kas di Bendahara Pengeluaran	386.638.419,00
Kas di BLUD	8.727.948.306,33
Kas di Bendahara JKN	513.453.688,00
Kas di Bendahara Dana BOS	612.698.300,00
Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran	180.622.312,00
Jumlah	108.299.547.190,79

5.6 Penjelasan atas Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas

1. Ekuitas Awal

Nilai ekuitas pada tanggal 1 Januari 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp3.329.054.741.771,90 dan Rp3.534.951.256.014,71.

2. Surplus /(Defisit) LO

Jumlah Surplus/(Defisit) - LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 2020 adalah sebesar (Rp74.943.106.494,21) dan (Rp210.960.599.044,29). Surplus/(Defisit)(LO merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, surplus/defisit kegiatan non operasional, dan pos luar biasa.

3. Koreksi Ekuitas Lainnya

Koreksi ekuitas lainnya untuk tahun 2021

Tabel 5.92 Rincian Koreksi Ekuitas

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Tahun 2021	Tahun 2020
1	Koreksi Ekuitas - Aset Lancar	(28.428.450,00)	12.259.109.944,91
2	Koreksi Ekuitas - Aset Tetap	95.815.867,40	12.259.109.944,91
2	Koreksi Ekuitas - Aset Lainnya	(29.993.184.968,34)	(81.600.000,00)
3	Koreksi Ekuitas - Kewajiban	(92.990.723,55)	-
4	Koreksi Ekuitas - Lainnya	152.436.354.899,73	(7.113.425.143,43)
	Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan	122.417.566.625,24	5.064.084.801,48

4. Ekuitas Akhir

Nilai Ekuitas pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp3.376.529.201.902,93 dan Rp3.329.054.741.771,90.



BAB VI PENJELASAN ATAS INFORMASI NON KEUANGAN

A. Gambaran Umum Kabupaten Tana Toraja

1. Pembentukan

Kabupaten Tana Toraja dibentuk berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822).

2. Letak Geografis

Kabupaten Tana Toraja yang beribukota di Tana Toraja secara geografis terletak antara 2⁰-3⁰ Lintang Selatan dan 119⁰-120⁰ Bujur Timur yang berbatasan dengan:

- Sebelah Utara: Kabupaten Toraja Utara;
- Sebelah Selatan : Kabupaten Tana Toraja dan Kabupaten Pinrang;
- Sebelah Timur: Kabupaten Luwu;
- Sebelah Barat: Kabupaten Mamasa Provinsi Sulawesi Barat –
Kabupaten Luwu

Luas wilayah Kabupaten Tana Toraja tercatat 2.054,30 km². Iklim Kabupaten Tana Toraja tergolong iklim tropis basah temperatur suhu rata-rata berkisar antara 17,9⁰C – 30,5⁰ C dengan kelembaban udara antara 82-86%, curah hujan rata-rata sekitar 1500mm per tahun sampai lebih dari 3500 mm/tahun. Topografi Kabupaten Tana Toraja merupakan dataran tinggi yang di kelilingi oleh pegunungan dengan keadaan lerengnya curam yakni rata-rata kemiringannya di atas 25%. Kabupaten Tana Toraja terdiri dari pegunungan, dataran tinggi, dataran rendah dan sungai dengan ketinggian yang berkisar antara <300 m - > 2500 m di atas permukaan laut.

3. Pemerintahan

Wilayah Kabupaten Tana Toraja terbagi atas 19 Kecamatan. Sampai dengan saat ini terdapat 112 Lembang dan 47 Kelurahan yang ada di Kabupaten Tana Toraja dengan jumlah Pegawai Negeri Sipil per 31 Desember 2021 sebanyak 4.375 orang.

4. Struktur Organisasi Pemerintah Kabupaten Tana Toraja

Struktur organisasi Pemerintah Daerah Kabupaten Tana Toraja terdiri dari:

Bupati Tana Toraja	: Theofilus Allorerung, SE
Wakil Bupati Tana Toraja	: dr. Zadrak Tombeg, Sp.A
Ketua DPRD Kabupaten Tana Toraja	: Welem Sambolangi, SE
Wakil Ketua I DPRD	: Evivana Rombe Datu, S.Pd, MM
Wakil Ketua II DPRD	: Yohanis Lintin Paembongan, S.Th

Struktur Organisasi Pemerintah Daerah Kabupaten Tana Toraja adalah sebagai berikut:

1. Sekretariat Daerah
Sekretaris Daerah : Dr. Ir. Samuel Tande Bura, MM
Sekretaris Daerah membawahi:
 - Asisten Pemerintahan Umum: Ir. Isak Maraya Allo Somba
 - Asisten Ekonomi Pembangunan: Ir. Haris Paridi
 - Asisten Administrasi Umum : Sulaiman Malia, S.Sos, M.Si
2. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
3. Dinas/Badan/Kantor sebanyak 33 (tiga puluh tiga)
4. Kecamatan sebanyak 19 (sembilan belas)

Bupati dan Wakil Bupati terpilih Tana Toraja Theofilus Allorerung, SE dan dr. Zadrak Tombeg, Sp.A masa jabatan 2021-2016 merupakan periode pertama setelah menjadi pemenang



dalam Pilkada Serentak Kabupaten Tana Toraja pada Tahun 2020, yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Tana Toraja Tahun 2020.

B. Terkait Pengalihan Urusan Pemerintah Daerah

Berdasarkan dasar hukum pengalihan personil, pendanaan, sarana dan prasarana, serta dokumentasi (P3D) Bidang Pendidikan sebagai berikut:

1. Undang-Undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
2. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 120/253/SJ tanggal 16 Januari 2015 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintah setelah ditetapkannya UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
3. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 120/5935/SJ tanggal 16 Oktober 2015 tentang Percepatan Pelaksanaan Pengalihan Urusan Berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Gubernur Nomor 25 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengalihan Urusan Pemerintah Daerah di Bidang Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus pada Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.



BAB VII PENUTUP

Di dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, terdapat penegasan dibidang pengelolaan keuangan, yaitu bahwa kekuasaan pengelolaan keuangan negara adalah sebagai bagian dari kekuasaan pemerintahan, dan kekuasaan pengelolaan keuangan negara sebagian dilimpahkan kepada Gubernur/Bupati/Walikota selaku Kepala Pemerintahan Daerah. Ketentuan tersebut berdampak pada pengaturan pengelolaan keuangan daerah, yaitu bahwa Gubernur/Bupati/Walikota bertanggungjawab atas pengelolaan keuangan daerah sebagai bagian dari pemerintahan daerah.

Untuk memenuhi ketentuan tersebut, Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Tana Toraja Tahun Anggaran 2021 disusun dan disajikan sebagai media pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2021. Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Tana Toraja Tahun Anggaran 2021 ini merupakan hasil konsolidasi dari seluruh Laporan Keuangan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dengan melalui proses akuntansi dan pelaporan sebagaimana mestinya.

Sebagai penutup dapat disimpulkan bahwa proses pengelolaan keuangan daerah yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Tana Toraja masih perlu ditingkatkan lagi dengan optimalisasi penerimaan pendapatan daerah dan efisiensi belanja daerah, selain itu LKPD Kabupaten Tana Toraja Tahun Anggaran 2020 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 yang berbasis akrual.

Dengan ditemuinya berbagai kendala dalam pengelolaan keuangan daerah selama tahun anggaran 2021 ini, Pemerintah Kabupaten Tana Toraja bertekad untuk terus berupaya meningkatkan kualitas sistem pengelolaan keuangan daerah, baik dari sisi penyempurnaan aturan maupun dari sisi peningkatan kapasitas sumber daya aparatur pengelola keuangan daerah untuk Tana Toraja lebih baik.

BUPATI TANA TORAJA

THEOFILUS ALLORERUNG